

Marissa Grace Haque-Fawzi



# Muslimin Vietnam

dan Industri  
Halalnya

*Mereka Juga Belajar ke LPPOM MUI*

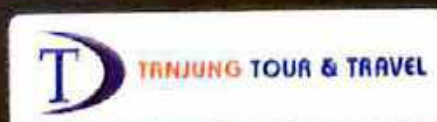




# Muslimin\* Vietnam dan Industri ≈ Halalnya

Islam adalah agama terbesar kedua di dunia. Pew Research (2015) memproyeksikan akan ada penambahan jumlah populasi muslim antara tahun 2010-2050. Statistik PBB juga mencatat pertumbuhan tahunan umat Islam sekitar 6,4%. Begitu besarnya populasi muslim menjadi peluang yang besar bagi para pelaku industri untuk mengisi ceruk pasar muslim terhadap produk halal. Seperti diketahui, bahwa umat Islam secara umum sangat berpegang teguh pada prinsip agama dalam aspek kehidupannya, terlebih yang menyangkut soal kehalalan makanan. Oleh karena itu, sertifikasi halal penting artinya untuk menjamin konsumen muslim memperoleh produk dan jasa yang halal.

Pasar industri halal yang kini semakin dilirik dan diminati oleh berbagai negara di dunia juga menarik minat Vietnam untuk memasuki ceruk pasar tersebut. Hal ini pun menjadi angin segar bagi muslimin Vietnam karena dapat menjadi peluang untuk turut berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Vietnam yang sedang berlari kencang. Keberadaan industri halal di Vietnam juga menguntungkan muslimin lain di dunia karena dapat memfasilitasi mereka dalam memperoleh produk dan jasa yang halal ketika bertunjing ke Vietnam. Lantas, sejauh mana kontribusi minoritas muslimin Vietnam dalam meningkatkan industri halal di Vietnam dan pertumbuhan ekonomi negaranya, serta apa yang dapat dikolaborasi dan dialiansikan bersama oleh Indonesia dan Vietnam terkait sertifikasi halal? Semua pertanyaan tersebut terjawab di dalam buku ini. Tidak hanya itu, pembaca juga dapat mengetahui sejarah singkat perjalanan muslimin di negeri yang terkenal dengan ideologi komunisnya.



Komplek Jatiwarna Indah  
Jl. Bunga Matahari V Blok E No 1  
Peridok Gedde-Bekasi 17415 INDONESIA  
Phone +6282299097179 Fax (+6221) 84990478  
Email: gramata\_publishing@yahoo.com  
gramata\_publishing@gmail.com  
http://www.penerbitgramata.com  
Fb: Gramata Publishing  
Twitter: @gramata\_publishing  
Tg: gramata\_publishing

ISBN 978-602-6972-39-2





# Muslimin Vietnam dan Industri Halalnya Mereka Juga Belajar ke LPPOM MUI

Bekasi: Gramata Publishing – 2019  
xxii+ 168 hlm.; 15,5 x 23 cm  
ISBN : 978-602-6972-40-8

## Penulis

Marissa Grace Haque- Fawzi

## Editor

Laila Febrina

## Desainer

Angga Priatna

## Diterbitkan Oleh

Gramata Publishing

Anggota IKAPI

2019-04-135-01

Komplek Jatiwarna Indah, Jl. Bunga Matahari V Blok E No.1

Pondok Gede-Bekasi 17415 INDONESIA

Phone +6282299097179 Fax (+62 21) 84990478

Email: [gramata\\_publishing@yahoo.com](mailto:gramata_publishing@yahoo.com), [gramata.publishing@gmail.com](mailto:gramata.publishing@gmail.com)

<http://www.penerbitgramata.com>, f: Gramata Publishing

twitter: [@gramata\\_publishing](https://twitter.com/gramata_publishing), instagram: [@gramata\\_publishing](https://www.instagram.com/gramata_publishing)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Gramata Publishing.

Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Ketentuan Pidana (Pasal 113, Ayat: 3)

"Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah."

Marissa Grace Haque-Fawzi

Muslimin   
Vietnam

dan Industri  
≈ Halalnya

*Mereka Juga Belajar ke LPPOM MUI*

# Muslimin Vietnam dan Industri Halalnya Mereka Juga Belajar ke LPPOM MUI

Bekasi: Gramata Publishing – 2019

xxii+ 168 hlm.; 15,5 x 23 cm

ISBN : 978-602-6972-40-8

## Penulis

Marissa Grace Haque- Fawzi

## Editor

Laila Febrina

## Desainer

Angga Priatna

## Diterbitkan Oleh

Gramata Publishing

Anggota IKAPI

2019-04-135-01

Komplek Jatiwarna Indah, Jl. Bunga Matahari V Blok E No.1

Pondok Gede-Bekasi 17415 INDONESIA

Phone +6282299097179 Fax (+62 21) 84990478

Email: [gramata\\_publishing@yahoo.com](mailto:gramata_publishing@yahoo.com), [gramata.publishing@gmail.com](mailto:gramata.publishing@gmail.com)

<http://www.penerbitgramata.com>, f: Gramata Publishing

twitter: [@gramata\\_publishing](https://twitter.com/gramata_publishing), instagram: [@gramata\\_publishing](https://www.instagram.com/gramata_publishing)

### Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Gramata Publishing.

Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Ketentuan Pidana (Pasal 113, Ayat: 3)

“Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar) rupiah.”



## **PRAKATA**



K.H.M. Cholil Nafis, Lc., Ph.D.

*Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat*



Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.A.

*Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW)*



Dr. Subarjo Joyosumarto

*Ketua IBS (STIE Indonesia Banking School)*



Marissa Grace Haque-Fawzi

*Penulis*



# PRAKATA

K.H.M. Cholil Nafis, Lc., Ph.D.

*Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat  
MUI Pusat*

Di tengah ramainya perbincangan syariat Islam, salah satu yang menjadi sorotan dan pertimbangan pertama bagi masyarakat muslim ketika memilih destinasi wisata adalah tempat dan makanan halal. Negara-negara yang memiliki banyak destinasi wisata menarik justru gagal dikunjungi oleh banyak wisatawan sebab jarang ada tempat atau rumah makan halal. Vietnam adalah salah satunya. Berdasarkan jumlah penduduk Vietnam, ada sekitar 160.000 ribu orang yang beragama Islam dari total populasi sekitar 90 juta penduduk. Namun, destinasi wisata halal di Vietnam jarang ditemukan karena pemeluk Islam di negara bekas jajahan Prancis tersebut hanya menjadi minoritas dan kurang perhatian dengan *booming-nya halal life style*.

Komunitas muslim di Vietnam terdapat di daerah yang dikenal dengan Distrik 8. Daerah tersebut merupakan kantong terbesar muslim Cham di kota metropolitan informal yang dikenal sebagai Saigon. Jumlah penghuninya sekitar 1.300 penduduk. Di sana, ada banyak restoran halal, masjid besar, dan madrasah. Cham awalnya adalah penduduk Hindu yang memerintah bagian selatan dan tengah Vietnam selama ratusan tahun. Namun, pada abad ke-15, secara bertahap masyarakatnya masuk Islam sehingga dikenal sebagai daerah muslim Cham.

Apabila diperhatikan, masih banyak masyarakat kita yang memiliki persepsi salah mengenai kehidupan yang tenteram dan bahagia. Sebagian besar dari mereka beranggapan bahwa hidup tenteram dan bahagia itu hanya dapat diraih dengan materi duniawi sehingga banyak masyarakat yang berlomba-lomba mencari dan menumpuk hartanya

tanpa memedulikan hukum dan kaidah syariat Islam sebagai tuntunan Ilahi. Golongan masyarakat tersebut tak peduli lagi tentang halal haram. Yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana caranya untuk memperoleh harta dan fasilitas yang serba mewah sebagai bentuk pemenuhan syahwat jasmaniah. Hal inilah yang kemudian menjadi problematika dan sumber kerusakan umat di akhir zaman ini.

Pada hakikatnya, kemewahan dan kesenangan duniawi itu hanyalah fatamorgana. Ibaratnya, manusia mengejar bayang-bayangnya sendiri yang kenyataannya hanyalah semu belaka. Hal seperti ini yang akan melahirkan penyesalan pada kemudian hari saat ajal menjemputnya. Sebagaimana Allah Swt. berfirman dalam surah At-Takasur ayat 1–2 yang berbunyi “*Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur*”.

Sangat jelas ayat tersebut menyatakan bahwa upaya mengejar dan menumpuk harta sebanyak mungkin tanpa memedulikan kaidah syariat Islam yang benar dapat melupakan manusia akan dirinya sebagai hamba Allah Swt. Apalagi, perilaku tersebut dapat mengakibatkan penderitaan sesama manusia. Dengan demikian, Islam jelas sekali menentukan bahwa manusia harus bersama-sama dalam kehidupan, termasuk dalam mencari apa yang dinamakan “kecukupan”, baik yang bersifat perorangan maupun keseluruhan masyarakat, yaitu harta yang baik, halal, dan juga dapat bermanfaat bagi sesamanya.

Hadirnya buku yang berjudul *Muslimin Vietnam dan Industri Halalnya* adalah angin segar di kalangan muslim Vietnam pada khususnya dan muslim dunia pada umumnya. Buku ini mengupas tuntas kendala minimnya destinasi dan produk halal yang ada di Vietnam dari berbagai sisi, terutama dari segi regulasi ekonomi.

Indonesia dapat dicontoh oleh Vietnam sebagai negara dengan beragam agama, namun berhasil melegitimasi hampir seluruh produk hasil produksi, baik dalam negeri maupun luar negeri yang terdata dengan baik melalui sebuah lembaga khusus, yaitu Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Lembaga ini merupakan lembaga satu-satunya di Indonesia yang menjadi kontrol terhadap kehalalan seluruh produk yang beredar di tengah masyarakat Indonesia.



Pembentukan LPPOM MUI atas mandat dari pemerintah agar MUI dapat berperan aktif dalam meminimalisasi kandungan makanan, obat-obatan, dan sebagainya yang diharamkan oleh agama Islam dan juga menjaga dari kandungan bahan yang dapat merusak kesehatan konsumennya. Hal tersebut bermula dari kasus yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1988 dengan ditemukannya sebuah produk yang mengandung lemak babi. Berdasarkan alasan tersebut serta beberapa pengkajian dan pertimbangan sehingga dianggap penting untuk didirikan LPPOM MUI. Tepat pada tanggal 6 Januari 1989, LPPOM MUI diresmikan untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal pada pangan, obat-obatan, dan kosmetika.

Untuk memperkuat kedudukan LPPOM MUI dalam menjalankan fungsi sertifikasi halalnya, pada tahun 1996, Departemen Agama Republik Indonesia, Departemen Kesehatan, dan MUI menandatangani nota kesepakatan kerja sama antara departemen dan lembaga. Nota kesepakatan tersebut, kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan Keputusan Menteri Agama 519 Tahun 2001 yang menjadi penguat legitimasi MUI sebagai sebuah lembaga yang menangani sertifikasi halal dan lembaga yang berhak melakukan pemeriksaan atau audit, penetapan fatwa, sampai penerbitan sertifikat halal sebuah produk.

Tentu dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal tersebut, LPPOM MUI tidak bekerja secara sendiri. LPPOM MUI melakukan kerja sama dengan beberapa kementerian, seperti Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kerja sama juga dilakukan dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) dan sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.

Pada tahun 2017 dan 2018, LPPOM MUI tercatat sebagai lembaga yang memperoleh sertifikat akreditasi Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai laboratorium halal dan sertifikasi halal dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Sampai saat ini, LPPOM MUI sebagai lembaga sertifikasi halal pertama di Indonesia semakin menunjukkan taringnya dan menjadi primadona sebagai lembaga yang sangat kredibel, baik di tingkat

nasional maupun internasional. Standar sertifikasi yang dikeluarkan LPPOM MUI tidak hanya diakui di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional.

Vietnam sebagai negara yang mempunyai banyak destinasi wisata, usaha pengembangan pariwisata halal untuk membidik wisatawan muslim dunia jangan hanya menjadi kebutuhan pemerintah. Pelaku usaha pariwisata juga harus melihat wisata halal sebagai potensi besar sehingga lebih banyak membuka layanan destinasi wisata dan produk halal untuk disajikan kepada wisatawan.

Pentingnya peningkatan produk halal melalui sertifikasi halal di Vietnam seperti yang dilakukan di Indonesia dapat menjadi ikon di negara tersebut sebagai destinasi favorit wisatawan muslim dan menjadi pendapatan (*income*) negara. Hadirnya buku yang mengupas sekaligus memberikan solusi terhadap potensi wisata dan makanan halal yang bersertifikat di Vietnam dapat menjadi jalan pembuka wisatawan muslim untuk tak perlu khawatir lagi saat berkunjung ke Vietnam. Kita menyaksikan di daerah Ho Chi Minh City ada sebuah jalan yang banyak menjual makanan halal yang dikenal dengan *halal street*. Di sepanjang kompleks ini, terdapat banyak tempat dan makanan halal, namun perlu didukung dengan sertifikasi halal yang kredibel.

Pembaca buku ini akan diantarkan untuk memahami lebih dalam tentang pentingnya sebuah lembaga yang dapat memberikan legitimasi kepada sebuah perusahaan yang membidik wisatawan muslim dunia. Oleh karena itu, sertifikat halal menjadi sangat penting sebab menjadi jaminan dan kepercayaan bagi wisatawan. Cara hidup halal dan tayib telah dicontohkan oleh Rasulullah saw., baik dari segi penampilan, gestur, keseharian, pola, dan gaya hidupnya. Berharap dengan membaca buku ini, dapat mengamalkan Alquran dan hadis dalam mengarungi kehidupan di akhir zaman ini.

Jakarta, 25 Maret 2019

K.H.M. Cholil Nafis, Lc., Ph.D.

(Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI  
Pusat)

# PRAKATA

Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H.

*Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW)*

Dipacu oleh minat masyarakat dunia yang bertumbuh terkait produk halal, menarik minat Vietnam untuk memasuki ceruk pasar industri halal. Vietnam sangat jeli melihat industri halal sebagai bisnis yang menjanjikan. Mengingat, umat Islam secara umum sangat berpegang teguh pada prinsip agama dalam aspek kehidupannya, khususnya yang menyangkut soal kehalalan makanan dan karena Islam adalah agama terbesar kedua di dunia, membuat pasar industri halal kini semakin dilirik dan diminati oleh berbagai negara di dunia.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Vietnam yang kini sedang berlari kencang merupakan angin segar bagi para muslim di Vietnam untuk turut berkontribusi dalam perkembangan industri halal. Meski populasi muslim di Vietnam tidak banyak, mereka termasuk yang turut serta aktif dalam perkembangan industri halalnya. Namun, perjalanan panjang Vietnam hingga menjadi hebat seperti sekarang ini ternyata ada turut serta Indonesia dalam transfer ilmu pengetahuan, salah satunya kepada LPPOM MUI di Bogor.

Ke depannya, tentu akan ada banyak peluang lain yang dapat dikolaborasikan antara Indonesia dan Vietnam terkait sertifikasi industri halal. Vietnam adalah mitra sekaligus pesaing bagi Indonesia, saling mem-*benchmark* satu dengan lainnya seakan tidak terhindarkan. Namun, Indonesia memang bukan Vietnam begitu juga sebaliknya.

Ideologi keduanya berbeda. Indonesia yang demokratis bukanlah Vietnam yang sosialis komunis.

Sejarah perjuangan eksistensi muslim di Indonesia juga berbeda dengan masyarakat muslim di Vietnam. Namun, ketika pertumbuhan ekonomi Vietnam kini lebih baik dari Indonesia dan Vietnam sedang bergiat mengejar ketertinggalannya dalam bidang industri halal, Indonesia yang telah maju dalam beberapa langkah terkait urusan sertifikasi halal tidak boleh lengah. Indonesia harus segera keluar dari “zona nyaman” hanya sebagai negara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sudah lahir di Indonesia. Semoga peraturan pemerintah (PP) yang diharapkan oleh banyak pihak di Indonesia segera menyusul keberadaannya sehingga mampu menunjang percepatan laju peningkatan ekonomi yang berpengaruh terhadap kontribusi produk domestik bruto (PDB) tahunan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Akhir kata, setelah buku halal di Vietnam ini lahir, diharapkan akan ada buku-buku lain sebagai referensi umat terkait halal di luar negeri lainnya.

Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.H.

(Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch/IHW)



# PRAKATA

Dr. Subarjo Joyosumarto  
*Ketua IBS (STIE Banking School)*

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pertama, saya ingin mengucapkan selamat dan apresiasi atas diterbitkannya buku *Muslimin Vietnam dan Industri Halalnya* yang ditulis oleh Ibu Marissa Grace Haque-Fawzi. Seperti diketahui, Ibu Marissa adalah Dosen Pascasarjana pada STIE Indonesia Banking School. Buku yang ditulis ini merupakan buku yang kesekian kalinya ditulis oleh Ibu Marissa. Hal ini menunjukkan betapa produktifnya Beliau.

Judul buku yang ditulis berkaitan dengan produk halal di Vietnam. Seperti diketahui, Vietnam bukanlah negara Islam, bahkan persentase penduduk yang beragama Islam hanya 0,1 persen. Dari buku tersebut, dapat disimpulkan bahwa alasan pemerintah Vietnam memproduksi produk halal adalah alasan bisnis, tidak ada kaitannya dengan akidah secara Islam. Hal ini tentu saja berbeda dengan negara kita, Indonesia. Indonesia dengan penduduk lebih dari 260 juta jiwa dan 80 persennya adalah umat Islam, pengembangan produk halal di Indonesia berkaitan erat dengan akidah Islam. Di tingkat negara, secara yuridis, Indonesia telah mengatur persoalan produk halal melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang No. 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-Undang itu selanjutnya diikuti dengan peraturan pemerintah yang lain.

Kebijakan dari umat Islam di Indonesia adalah Indonesia ber-sungguh-sungguh ingin memosisikan diri sebagai pusat halal dunia dan pelopor dalam sertifikasi halal. Kampanye halal juga telah dilakukan oleh LPPOM MUI sebagai Lembaga sertifikasi sekaligus mengemban tugas menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai produk sertifikasi halal. Dari kata *label halal*, kita dapat mengetahui informasi yang menjelaskan isi dari produk tersebut. Hal tersebut sangat berguna bagi konsumen. Informasi yang termuat pada label juga memberi dampak yang signifikan, efisien konsumen dalam memilih produk, serta tingkat loyalitas konsumen pada produk, yang pada akhirnya memberi keuntungan pada pelaku bisnis.

Negara Vietnam berupaya untuk memproduksi produk-produk yang halal semata-mata adalah karena pertimbangan bisnis. Pemerintah Vietnam juga tahu bahwa selain umat Islam yang memang mewajibkan konsumsi produk halal, para pengikut dari agama nonmuslim juga dapat mengonsumsi produk halal, berdasarkan kegunaan dari produk halal, yaitu lebih sehat dan dapat diterima oleh tubuh yang mengonsumsinya. Konsumen dari pengikut agama nonmuslim memperoleh manfaat dari mengonsumsi produk halal agar terhindar dari sakit dan hidup lebih nyaman. Dengan kata lain, produk halal merupakan *rahmatan lil alamin* yang diberikan oleh ajaran agama Islam pada penganut agama nonmuslim.

Sekali lagi, kami mengucapkan selamat kepada Ibu Marissa yang telah berhasil menerbitkan buku ini. Saya yakin Ibu Marissa sedang merancang untuk menulis buku-buku lain yang bermanfaat bagi kita. Amin.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 11 Maret 2019  
Subarjo Joyosumarto

# PRAKATA

## Marissa Grace Haque-Fawzi

*Penulis*

Meneliti muslimin Vietnam dan industri halalnya menjadi penting tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi masyarakat Indonesia agar hasilnya dapat dijadikan sebagai referensi awal bagi kemaslahatan umat. Pascareformasi Doi Moi, perekonomian Vietnam belakangan ini tumbuh hingga menjadi entitas “bayi ajaib” di Asia Tenggara. Salah satu indikatornya dapat dilihat pada Laporan Global Innovation Index 2018 yang dikeluarkan pada awal bulan November 2018 pada strata ASEAN. Disebutkan bahwa Vietnam kini berada pada posisi ke-45 (melompat jauh 12 tingkat hanya dalam hitungan setahun, mengejar Thailand yang berada pada posisi ke-44).

Spirit masyarakat Vietnam yang mirip dengan Tiongkok membuat mereka menjadi bangsa yang mampu cepat belajar serta tak mudah menyerah. Mereka terbayang dengan keberhasilan ekonomi dan produksi Tiongkok dalam penguasaan pasar dunia. Tak heran jika kini mereka “berlari” secara sprint, bahkan maraton yang membuat pertumbuhan ekonomi Vietnam seakan tak terbendung. Padahal, menurut informasi yang bersumber dari Detty H. Agustono (Indonesia Banking School [2018]) yang pernah menjabat sebagai Ketua Bank Indonesia (BI) cabang Tokyo, Jepang, mengatakan bahwa dahulu pada sekitar awal tahun 1990-an, pemerintah Vietnam mengirimkan orang-orang pilihannya

untuk belajar kepada BI sebagai bank sentral Indonesia dalam bidang kebanksentralan, keuangan, dan ekspor impor.

Vietnam belajar membangun *real estate* pada Ciputra, termasuk Ciputra Grup yang berinvestasi dalam pengembangan bisnis perumahan di beberapa lokasi di ibu kota Vietnam, Hanoi yang sempat menjadi fenomenal pada 2018 lalu. Selain itu, GO-JEK Indonesia mengembangkan bisnisnya ke Vietnam dengan memakai *brand* GO-VIET. Jika di Indonesia ojek *online* ini berseragam warna hijau, di Vietnam berwarna merah sesuai dengan identitas negara komunis.

Dengan populasi minoritas muslim yang kurang dari 0,1 persen dari total 87 juta penduduknya, hal yang perlu diketahui adalah sejauh mana keikutsertaan minoritas muslim dalam meningkatkan industri halal di Vietnam. Lebih lanjut, hal yang paling penting untuk dibidik adalah apa yang dapat dikolaborasikan dan dialiansikan bersama oleh kedua negara antara Indonesia dan Vietnam sehingga *mutual benefit* atau *win-win solution* dapat terwujud.

Di dalam urusan ilmu sertifikasi halal, Vietnam terbukti sudah mengirimkan ketua dan beberapa karyawan dari Halal Certification Agency (HCA) Vietnam yang berkedudukan di Kota Hanoi. Selain itu, Vietnam secara bergantian mengirimkan beberapa kelompok untuk belajar di LPPOM MUI di Bogor, termasuk yang mengejutkan dari Ketua Halal Authority Vietnam yang berkedudukan di kota lainnya di Ho Chi Minh City, adalah Dr. Bashirun. Sekalipun yang bersangkutan sejak kuliah hingga memperoleh gelar Ph.D. dari IIUM belajar dari JAKIM Malaysia, Dr. Bashirun ternyata juga adalah Ketua Muhammadiyah cabang Vietnam (yang berpusat di Yogyakarta, Indonesia).

Di dalam ber-*fastabiqul khoiroh*, yang diinginkan Indonesia adalah harapan dan doa yang kuat untuk merajut silaturahmi sebagai sesama anggota negara ASEAN di dalam edukasi pasar dan perlindungan umat. Tujuannya agar para muslim di seluruh dunia di dalam kehidupannya mudah memperoleh dan mengonsumsi produk yang halal, termasuk menjadi lebih peduli pada proses sertifikasi halal yang dapat dipertanggungjawabkan secara dunia dan akhirat.

Terima kasih penulis sampaikan atas dukungan dari Ibu Ir. Nurhayati Subakat dengan Wardah Kosmetika Halal Indonesia-nya; Direktur



LPPOM MUI Pusat, Dr. Ir. Lukmanul Hakim, Ph.D.; Wakil Direktur LP-POM MUI Pusat dan LPPOM MUI DKI Jakarta, Ir. Oesmena Gunawan; Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (PP DMI); Wasekjen Dewan Masjid Indonesia, Jaorana Amiruddin, S.P., M.Si. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Duta Besar Indonesia untuk Vietnam yang berkedudukan di Hanoi dan Konsul Jenderal Indonesia untuk Vietnam yang berkedudukan di Ho Chi Minh City, serta para sponsor pendukung lainnya, yaitu suami tercinta Drs. H. Azmad Z. Ikgang Fawzi, M.B.A. dari Perumahan Sepang Mountain Residence (SMR) Serang, Banten, dan Novianti Tanjung dari Tanjung Tour & Travel.

Dengan menggunakan metode Snowball Sampling, peneliti mengambil sampel awal dengan *probability sampling*, sedangkan tambahan sampel diperoleh dari referensi sampel yang telah terpilih sejak awal. Alasan pemilihan metode ini adalah karena biaya yang diperlukan pada saat pelaksanaan penelitian tidak perlu besar serta dapat dipakai untuk penelitian dengan tujuan dan situasi tertentu.

Keunggulan metode Snowball Sampling menurut Cooper dan Schlinger (2008) dalam Tanjung dan Devi (2013) adalah mampu menempatkan anggota-anggota populasi yang unik. Namun demikian, metode ini juga memiliki kelemahan, yaitu kemungkinan terjadinya bias tinggi karena unit sampel yang tidak bebas.

Dengan segala kekurangan dan kelebihan, buku ini ditujukan untuk *balighu 'ani walau ayah*, sebagai "panggung" untuk menyampaikan satu ayat-Nya yang terdapat dalam Alquran Surah al-Baqarah ayat 168. Namun, tentunya juga diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi para pelaku industri halal, baik di dalam maupun luar negeri, akademisi, serta masyarakat umum lainnya di tengah langkanya buku-buku terkait dinamika industri serta kehidupan halal. Tak lupa permohonan maaf penulis sampaikan apabila terdapat kekurangan dalam buku ini karena kebenaran datangnya hanya dari Allah Azza wa Jalla.

*Wassalamualaikum warohmatullahi wa barokatuh.*

Madinah, 2 Januari 2019

# DAFTAR ISI



PRAKATA .....	iii
K.H.M. Cholil Nafis, Lc., Ph.D.	
Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) .....	iv
Dr. H. Ikhsan Abdullah, S.H., M.A.	
Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) .....	viii
Dr. Subarjo Joyosumarto	
Ketua IBS (STIE Indonesia Banking School) .....	x
Marissa Grace Haque–Fawzi	
Penulis .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
DAFTAR TABEL .....	xxi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Gambaran Umum Vietnam .....	1
1.2 Letak Geografis Vietnam .....	7
1.3 Perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Vietnam .....	11
1.3.1 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Hanoi .....	11
1.3.2 Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Ho Chi Minh City .....	12
1.4 Ringkasan Sejarah Vietnam .....	14
1.4.1 <i>Sino-Vietnamese</i> 3000 Tahun Lalu .....	21
1.4.2 Kolonialisme Prancis di Indocina .....	24
1.4.2.1 Orang Prancis Pertama di Vietnam .....	25
1.4.2.2 Orang-Orang Prancis Berikutnya di Vietnam .....	26

1.4.2.3	Aturan Konstitusi Prancis 1887 untuk Vietnam .....	26
1.4.2.4	Perlawanan kepada Prancis .....	28
1.4.2.5	Nasionalisme di Vietnam .....	29
1.4.2.6	Vietnam Merdeka Lalu Perang Lagi .....	31
1.4.2.7	Vietnam Terbagi Dua pada Maret 1955 .....	31
1.4.2.8	Komunisme Meluas di Vietnam .....	32
1.4.3	Vietnam dan Amerika Serikat .....	34
1.4.3.1	Amerika Serikat Bertahan di Vietnam (Maret 1959–Desember 1964) .....	35
1.4.3.2	Amerika Serikat Versus Vietnam (Januari 1965–September 1967) .....	36
1.4.3.3	Titik Balik Vietnam (September 1967–Desember 1968) .....	36
1.4.3.4	“Vietnamisasi” Perang Nixon (Desember 1969–Desember 1971) .....	38
1.4.3.5	Amerika Serikat Pulang (Januari 1972–Januari 1973) .....	39
1.4.3.6	Amerika Serikat Balik Lagi (Januari 1973–1975) .....	39
1.4.3.7	Unifikasi Dua Vietnam dan Amerika Serikat Pulang untuk Selamanya (1976) .....	40
<b>BAB II</b>	<b>BERAGAMA DI VIETNAM .....</b>	<b>41</b>
2.1	Ban Tôn Giáo Chính Phủ (Lembaga Urusan Agama di Vietnam) .....	42
2.2	Ragam Agama di Vietnam .....	47
2.3	Etnis Champa dan Islam di Vietnam .....	52
2.3.1	Masjid dan Surau di Vietnam .....	59
2.3.2	Lima Masjid Besar di Ho Chi Minh City .....	68
2.3.3	Satu-Satunya Masjid di Hanoi .....	84
2.3.4	Ragam Etnis Muslimin Vietnam .....	89
2.3.4.1	Kelompok Klasik Muslim Vietnam .....	90
2.3.4.2	Muslimin Vietnam Kini .....	91
2.3.4.3	Empat Komite Islam di Vietnam .....	93
<b>BAB III</b>	<b>HALAL VIETNAM BELAJAR JUGA KE LPPOM MUI .....</b>	<b>95</b>
3.1	Metode Penetapan Fatwa MUI .....	96
3.2	Prosedur Fatwa Halal MUI .....	97
3.3	LPPOM MUI .....	99
3.4	Negara dan Lembaga Halal Asing Mitra LPPOM MUI .....	101

3.5	Kriteria dan Persyaratan untuk Badan Sertifikasi Halal dari Negara Asing .....	106
3.6	Tujuh Lembaga Sertifikasi Halal di Vietnam .....	109
3.6.1	Halal di Vietnam Tanpa Fatwa Majelis Ulama? .....	120
3.6.2	Tawaran Advisory Body dari Komisi Dakwah MUI (Majelis Ulama Indonesia) .....	121
3.7	Manajemen Halal dari LPPOM MUI di Indonesia dan JAKIM di Malaysia untuk Vietnam .....	121
BAB IV	VIETNAM DAN INDONESIA .....	130
4.1	Pariwisata Halal di Vietnam .....	130
4.1.1	Restoran Halal Vietnam .....	135
4.2	Vietnam, Indonesia, dan Industri .....	149
4.3	Industri Indonesia di Vietnam .....	155
4.3.1	Ciputra dan <i>Real Estate</i> Hanoi.....	158
4.3.2	Gojek dan Goviet .....	159
	Daftar Pustaka .....	161
	Riwayat Penulis .....	167





# DAFTAR GAMBAR



Gambar 1.1	Peta negara Vietnam beserta pembagian provinsinya .....	2
Gambar 1.2	Vietnam berada paling timur di Semenanjung Indocina .....	8
Gambar 1.3	Ha Long Bay menjadi destinasi favorit para turis .....	9
Gambar 1.4	Penulis bersama H.E. Ibnu Hadi di Kedutaan Besar Republik Indonesia Hanoi–Vietnam .....	11
Gambar 1.5	Penulis bersama Hanif Salim, Konsulat Jenderal RI untuk Ho Ci Minh City, Vietnam .....	13
Gambar 1.6	Sebagian sosiolog menyatakan bahwa wilayah Indocina meliputi Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam plus Thailand.....	15
Gambar 1.7	Trung Sisters memimpin langsung komando pemberontakan melawan Tiongkok dari atas kendaraan gajah mereka.....	23
Gambar 1.8	Dalam pengertian sempit, wilayah Indocina mencakup Vietnam, Kamboja, dan Laos.....	25
Gambar 2.1	Penulis dan Rana Amiruddin didampingi H.E. Ibnu Hadi berkunjung ke Ban Tôn Giáo Chính Phủ .....	43
Gambar 2.2	Penulis bersama perwakilan dari Ban Tôn Giáo Chính Phủ .....	44
Gambar 2.3	Interviu mendalam dengan perwakilan Ban Tôn Giáo Chính Phủ .....	45
Gambar 2.4	Pemerintah Vietnam mengirim perwakilan halal Vietnam ke LPPOM MUI di Bogor .....	46

Gambar 2.5	Hajj. Mohammed Omar Tran Xuan Giap dan Hajj. Abdulkadir Osman Bao Van Trung adalah dua orang wakil yang dikirim untuk mengikuti International Training di LPPOM MUI .....	47
Gambar 2.6	Kerajaan Islam Champa pernah menguasai wilayah Vietnam dan sekitarnya.....	53
Gambar 2.7	Distribusi wilayah Champa .....	54
Gambar 2.8	Teritorial Kerajaan Champa .....	56
Gambar 2.9	Musulmane Mosque yang berada di Ho Chi Minh City .....	70
Gambar 2.10	Berada di pelataran Musulmane Mosque .....	71
Gambar 2.11	Pengunjung masjid diizinkan untuk beristirahat di dalam masjid .....	72
Gambar 2.12	Kuliner lokal yang dihidangkan pihak manajemen masjid ...	73
Gambar 2.13	Restoran halal yang terdapat di samping gang menuju masjid.....	75
Gambar 2.14	Penulis bertemu imam masjid Ustaz Haji Zacriya beserta pengurus masjid .....	75
Gambar 2.15	Penulis bersama Agatha Mursanto dan Indra Wahab .....	76
Gambar 2.16	Masjid Al Rahim yang berkaitan erat dengan kelompok masyarakat Indonesia dan Malaysia.....	77
Gambar 2.17	Simbol bintang dan bulan sabit yang terdapat di depan bangunan masjid .....	78
Gambar 2.18	Kuliner halal yang dijajakan di pinggir jalan dekat masjid....	78
Gambar 2.19	Bersama pengurus masjid Ustaz Haji Abdoul Tarif.....	79
Gambar 2.20	Ustaz Haji Abdoul Tarif yang merupakan seorang keturunan Madura .....	79
Gambar 2.21	Jamiyah Islamic Mosque dengan arsitektur bernuansa Timur Tengah.....	80
Gambar 2.22	Penulis disambut oleh sahibul bait .....	81
Gambar 2.23	Bayi Khaeruddin tertidur nyenyak dalam gendongan .....	82
Gambar 2.24	Menu lezat yang dihidangkan pasa saat acara akikah.....	83
Gambar 2.25	Jamiul Islamiyah Mosque yang juga dikenal dengan Masjid Nancy.....	83
Gambar 2.26	Al Noor satu-satunya masjid yang berada di Kota Hanoi, Vietnam.....	84
Gambar 2.27	Mieu Abbas sebagai Imam Masjid Al Noor sekaligus general manager .....	85
Gambar 2.28	Restoran halal yang dapat ditemui dekat masjid .....	88
Gambar 2.29	Bersama perwakilan dari Ban Tôn Giáo Chính Phủ .....	93
Gambar 3.1	Skema proses fatwa MUI.....	99

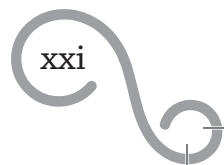
Gambar 3.2 LPPOM MUI <i>Milestone</i> .....	100
Gambar 3.3 Logo Halal Certification Agency (HGA).....	110
Gambar 3.4 Kunjungan ke HCA .....	111
Gambar 3.5 Struktur Organisasi HCA .....	112
Gambar 3.6 Makan malam bersama Imam Abdul Salam .....	113
Gambar 3.7 Alur Penyertifikasian di HCA .....	114
Gambar 3.8 Ha Noi Muslim Community .....	115
Gambar 3.9 Logo Halal Authority .....	115
Gambar 3.10 Bersama Pimpinan HAV Haji Basiroh Abdullah, Ph.D. ....	116
Gambar 3.11 Halal Authority yang beralamat di di Jalan Lau 3, 53 Ho Hao Hon, P.Co Giang, Q.1, Ho Chi Minh City, Vietnam.....	117
Gambar 3.12 <i>Flow Process of Halal Certification</i> at Halal Authority Vietnam (HVA).....	119
Gambar 3.13 Kho Di Dza, muslimah etnis Champa asal Vietnam yang menyelesaikan studi S-1-nya di Institut Pertanian Bogor (IPB).....	122
Gambar 3.14 Alur Sistem LPPOM MUI, Indonesia .....	125
Gambar 3.15 Alur Sistem JAKIM, Malaysia .....	126
Gambar 3.16 Alur Sistem CBI HCM, Vietnam.....	127
Gambar 4.1 Penulis bersama Ibu Hera yang merupakan pemilik Batavia Restaurant & Café.....	139
Gambar 4.2 Salah satu menu yang tersaji di Batavia Restaurant & Café.....	140
Gambar 4.3 Juni's Kitchen, salah satu restoran di Hanoi, Vietnam yang sudah tidak beroperasi .....	141
Gambar 4.4 Restoran Juni's Kitchen telah mengantongi sertifikat halal.....	141
Gambar 4.5 Perdagangan Indonesia dan Vietnam.....	157
Gambar 4.6 Perdagangan Bilateral 2016–2018.....	158
Gambar 4.7 Logo Ciputra Grup .....	158
Gambar 4.8 Ciputra Grup hadir menjadi etalase modernitas hunian Kota Hanoi.....	159
Gambar 4.9 Logo GO-JEK dan Go-Viet .....	160



# DAFTAR TABEL



Tabel 3.1	Negara dan Lembaga Halal Asing Mitra LPPOM MUI.....	102
Tabel 3.2	Tujuh lembaga sertifikasi halal di Vietnam.....	109
Tabel 4.1	Perbandingan dua negara Indonesia dan Vietnam .....	152





# BAB I PENDAHULUAN



## 1.1 Selintas Vietnam

Muslimin dan Vietnam adalah dua hal yang sepiantas tidak berhubungan sama sekali. Hal ini karena negeri yang terkenal dengan perang Vietnamnya itu identik dengan ideologi komunis yang berpaham ateisme. Sementara itu, muslimin adalah para penganut agama Islam yang menyembah satu tuhan, yaitu Allah Swt.

Menurut CIA World Factbook 2016, meskipun jumlah muslimin di Vietnam sangat sedikit, yaitu kurang dari 0,1 persen dari total 95.261.021 juta jiwa penduduknya, Vietnam mulai menunjukkan eksistensinya sejalan dengan pertumbuhan ekonominya yang pesat setelah reformasi ekonomi Doi Moi pada 1986. Tujuannya untuk menciptakan sebuah ekonomi pasar baru dengan orientasi sosialis.

Doi Moi atau *Đổi Mới* dilafalkan dalam bahasa Vietnam sebagai [d<sup>h</sup>oi m<sup>h</sup>:i] yang berarti pembaharuan. Sebenarnya, kata *đổi mới* adalah istilah yang umum dipakai secara luas dalam masyarakat Vietnam. Namun, istilah kebijakan Doi Moi di Vietnam atau *Chính sách Đổi Mới* berbeda. Istilah tersebut secara khusus mengacu pada reformasi istimewa di Vietnam, salah satunya dalam bidang ekonomi.

Beresford, M. (2006) mengatakan bahwa Pemerintah Komunis di utara, Republik Demokratik Vietnam (RDV), mengadopsi strategi “ekonomi berencana terpusat” sejak awal berdirinya. Di bawah ekonomi



Gambar 1.1  
Peta negara Vietnam  
beserta pembagian provinsinya.

Sumber: <https://en.wikipedia.org>



komando dengan kekhasan ideologi komunisnya, pemerintah pusat memutuskan target produksi dan harga, pasokan input, grosir dan perdagangan ritel dalam negeri, serta perdagangan internasional. Vietnam memang bermaksud menciptakan ekonomi yang terintegrasi secara vertikal. Dalam arti, tidak ada kontak komersial antara unit produksi individu secara horizontal. Di sektor pertanian, pemerintah membentuk koperasi dalam tiga tahap, yaitu kelompok solidaritas produksi, koperasi tingkat yang lebih rendah dengan membagi lahan dan peralatan, serta koperasi tingkat yang lebih tinggi yang mana sistem titik kerja menentukan distribusi untuk semua penghasilan. Namun, Beresford M. (1988) serta Arkadie dan Mallon (2004) mencatat bahwa sesungguhnya ekonomi komando telah dihapus pada akhir tahun 1980-an setelah Kongres Nasional Partai Komunis Vietnam ke-6 (dalam bahasa Vietnam disebut *Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam VI*) yang diadakan setiap lima tahun sekali bertempat di Balai Ba Đình, Hanoi pada tanggal 15–18 Desember 1986. Kongres diadakan guna persiapan organisasi tingkat provinsi dan lokal untuk memilih delegasi kongres serta merapikan dokumen perihal urusan kepartaian mendatang. Saat kongres diadakan, hadir 1.129 delegasi yang mewakili sekitar 1.900.000-an anggota dari seluruh partai komunis di Vietnam.

Di Asia Tenggara, dengan jumlah penduduk sebesar 95.261.021 juta jiwa, Vietnam merupakan negara berpenduduk paling besar ketiga setelah Indonesia dan Filipina. Sementara itu, dalam ukuran jumlah penduduk dunia, Vietnam merupakan negara terpadat dengan urutan ke-13. Lebih lanjut, secara administratif, menurut CIA World Factbook (2016), Republik Sosialis Vietnam dibagi atas 58 provinsi dengan 5 kotamadya sebagai berikut.

No.	Provinsi	Ibu kota
1	An Giang	Long Xuyên
2	Bà Rịa–Vũng Tàu	Bà Rịa
3	Bắc Giang	Bắc Giang
4	Bắc Kạn	Bắc Kạn
5	Bạc Liêu	Bạc Liêu
6	Bắc Ninh	Bắc Ninh

No.	Provinsi	Ibu kota
7	Bến Tre	Bến Tre
8	Bình Định	Quy Nhơn
9	Bình Dương	Thủ Dầu Một
10	Bình Phước	Đồng Xoài
11	Bình Thuận	Phan Thiết
12	Cà Mau	Cà Mau
13	Cao Bằng	Cao Bằng
14	Đắk Lắk	Buôn Ma Thuột
15	Đắk Nông	Gia Nghĩa
16	Điện Biên	Điện Biên Phủ
17	Đồng Nai	Biên Hòa
18	Đồng Tháp	Cao Lãnh
19	Gia Lai	Pleiku
20	Hà Giang	Hà Giang
21	Hà Nam	Phủ Lý
22	Hà Tĩnh	Hà Tĩnh
23	Hải Dương	Hải Dương
24	Hậu Giang	Vị Thanh
25	Hòa Bình	Hòa Bình
26	Hưng Yên	Hưng Yên
27	Khánh Hòa	Nha Trang
28	Kiên Giang	Rạch Giá
29	Kon Tum	Kon Tum
30	Lai Châu	Lai Châu
31	Lâm Đồng	Đà Lạt
32	Lạng Sơn	Lạng Sơn
33	Lào Cai	Lào Cai
34	Long An	Tân An

No.	Provinsi	Ibu kota
35	Nam Định	Nam Định
36	Nghệ An	Vinh
37	Ninh Bình	Ninh Bình
38	Ninh Thuận	Phan Rang–Tháp Chàm
39	Phú Thọ	Việt Trì
40	Phú Yên	Tuy Hòa
41	Quảng Bình	Đồng Hới
42	Quảng Nam	Tam Kỳ
43	Quảng Ngãi	Quảng Ngãi
44	Quảng Ninh	Hạ Long
45	Quảng Trị	Đông Hà
46	Sóc Trăng	Sóc Trăng
47	Son La	Son La
48	Tây Ninh	Tây Ninh
49	Thái Bình	Thái Bình
50	Thái Nguyên	Thái Nguyên
51	Thanh Hóa	Thanh Hóa
52	Thừa Thiên–Huế	Huế
53	Tiền Giang	Mỹ Tho
54	Trà Vinh	Trà Vinh
55	Tuyên Quang	Tuyên Quang
56	Vĩnh Long	Vĩnh Long
57	Vĩnh Phúc	Vĩnh Yên
58	Yên Bái	Yên Bái

No.	Kotamadya	Pusat Kota
1	Cần Thơ	Ninh Kiều District
2	Đà Nẵng	Hải Châu District
3	Hà Nội	Hoàn Kiếm District
4	Hải Phòng	Hồng Bàng District
5	Hồ Chí Minh	District 1

Sejak 12 Desember 2005, Vietnam masuk ke dalam grup ekonomi The Next Eleven atau N-11. Grup ekonomi tersebut dibentuk oleh Bank Investasi Goldman Sachs milik Marcus Goldman yang didirikan sejak tahun 1869 di New York City, Amerika Serikat. Negara-negara yang termasuk N-11 adalah Bangladesh, Filipina, Indonesia, Iran, Korea Selatan, Meksiko, Mesir, Nigeria, Pakistan, Turki, dan Vietnam. Lebih lanjut, grup ekonomi 11 ini oleh Goldman Sachs (2001) dianggap memiliki masa depan yang menjanjikan bagi pertumbuhan dan investasi pada tahun 2050, mengalahkan negara-negara terkaya di dunia saat ini, setelah sebelumnya dipimpin oleh negara-negara anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, China [sekarang Tiongkok], dan South Africa).

Seperti yang dipublikasikan dalam *Bloomberg* bahwa “*Vietnam Economy Remains Outperformer as Growth Tops 7% Mark*”, yang berarti bahwa pertumbuhan ekonomi Vietnam sangat baik dan berhasil menembus puncak di atas 7 persen pada tahun 2018 lalu. *Output* manufaktur melonjak didukung ekspor elektronik, ekspor melonjak 13,8 persen *year per year* pada 2018 meskipun impor mengalami kenaikan sebesar 11,5 persen. Pertumbuhan ekonomi Vietnam melaju pada kuartal keempatnya karena *output* manufaktur yang semakin kuat. Dengan demikian, Vietnam berhasil menjadi salah satu negara dengan kinerja ekonomi terbaik di dunia pada tahun 2018 kemarin.

Produk Domestik Bruto (*Gross National Product/GNP*) Vietnam berhasil tumbuh hingga 7,3 persen dalam tiga bulan terakhir hingga Desember 2018 meskipun di internal Kantor Statistik Umum milik Vietnam di Hanoi mengatakan pertumbuhan ekonomi untuk setahun penuh pada 2018 lalu hanya berkisar pada angka 7,1 persen. Namun demikian,

Vietnam tetap dianggap sebagai negara dengan pertumbuhan tercepat pertama di Asia Tenggara dan tercepat kedua di Asia Timur.

Lalu, bagaimana mungkin sebuah negara sosialis komunis yang pertumbuhan ekonominya telah bermetamorfosis menjadi kupu-kupu indah, kemudian berkenan mengadopsi dinamika transaksi ekonomi berdasarkan ajaran agama Islam? Untuk memahami lebih jauh, akan dijelaskan dalam bahasan berikutnya. Namun demikian, perlu kiranya mengenal Vietnam lebih dekat dari segi geografis dan sejarahnya.

## 1.2 Letak Geografis Vietnam

Vietnam adalah salah satu negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara. Nama resminya adalah *Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam* atau Republik Sosialis Vietnam. Di Vietnam, sebagian masyarakat yang terdidik sangat fasih berbahasa Prancis dan Inggris. Namun, masyarakat Vietnam secara umum lebih banyak menggunakan bahasa nasionalnya, yaitu Việt Nam. Moto negaranya adalah “*kemerdekaan, kebebasan, kebahagiaan*” atau *Độc lập, tự do, hạnh phúc*.

Sebagaimana dengan masyarakat Indonesia yang sangat lama dijajah oleh Belanda, namun tidak fasih berbahasa Belanda, Vietnam juga mengalami hal serupa. Vietnam yang lama dijajah Prancis, tidak serta merta membuat rakyatnya secara luas mampu berbahasa Prancis.

Pada masa lalu, sebelum bergabung menjadi satu, wilayah Vietnam terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebelah utara dan selatan. Wilayah bagian utara dikuasai Viet Cong atau Viet Minh dengan komunismenya, sedangkan wilayah Selatan dikuasai Amerika Serikat dengan liberalismenya dalam jangka waktu cukup lama.

Pertarungan besar the Cold War pada masa lalu, berujung pada kekalahan Amerika Serikat pada tahun 1975. Hal ini berdampak pada kepergiannya pada 1976 yang meninggalkan wilayah Vietnam beserta negara tetangganya, yaitu Kamboja dan Laos. Kerusakan berat pun terjadi di ketiga negara tersebut akibat perang.

Lokasi Vietnam berada paling timur di Semenanjung Indocina. Di sebelah utara, negara ini berbatasan langsung dengan Tiongkok, di



Sumber: <https://commons.wikimedia.org>

Gambar 1.2: Vietnam berada paling timur di Semenanjung Indocina.



sebelah barat laut dengan Laos, di sebelah barat daya dengan Kamboja, dan di sebelah timur berbatasan dengan Laut Tiongkok Selatan.

Vietnam memiliki luas kurang lebih 332.698 km<sup>2</sup>. Seluas 4.639 km<sup>2</sup> bagian Vietnam berbatasan dengan batas internasionalnya dengan panjang pantai 3.444 km. Dari total luas wilayahnya, hanya 20 persen berupa dataran rendah dan 40 persennya berupa pegunungan yang berbukit-bukit kecil. Sementara itu, luas hutan tropis Vietnam sekitar 42 persen dari total luas wilayah.

Topografi Vietnam terdiri atas sekumpulan bukit dan gunung yang berhutan lebat. Bagian utara wilayah Vietnam didominasi oleh pegunungan dan delta Sungai Merah serta terdapat sebuah gunung tertinggi di Vietnam setinggi 3.143 m. Sebanyak 16 persen wilayah utara Vietnam terdiri atas pegunungan dengan kondisi tanah yang cocok untuk pertanian, seperti jagung dan gandum. Di wilayah selatan, terdapat dataran rendah tepi pantai yang dipenuhi hutan luas. Sebesar 22 persen luas wilayah selatan merupakan lahan berhutan di Vietnam. Teluk ini memiliki ribuan batu kapur karst dan pulau dalam berbagai bentuk dan ukuran. Batu kapur di teluk ini telah melewati 500 juta tahun pembentukan dalam berbagai kondisi dan lingkungan. Evolusi



Sumber: <https://commons.wikimedia.org>

Gambar 1.3: Ha Long Bay menjadi destinasi favorit para turis.



karst di teluk ini diperkirakan telah memakan waktu 20 juta tahun di bawah pengaruh iklim basah tropis.

Salah satu destinasi favorit turis saat berkunjung ke Vietnam adalah Teluk Ha Long atau yang dikenal dengan nama Ha Long Bay yang berada di Provinsi Quang Ninh, Vietnam. Ha Long Bay adalah salah satu situs warisan dunia versi UNESCO World Heritage Site. Ha Long Bay dalam bahasa lokal diucap *Vịnh Hạ Long*, yang artinya “keturunan naga.” Teluk ini dimiliki oleh kota Ha Long dan kota Cam Pha, yang juga merupakan bagian dari distrik Van Don. Ha Long Bay adalah rumah bagi 14 spesies bunga endemik dan 60 spesies fauna endemik. Keanekaragaman ekosistem di daerah tersebut telah menciptakan keanekaragaman hayati, termasuk ekosistem hutan hujan tropis dan laut. Terdapat sekitar dua ribu pulau dengan luas sekitar 1.553 km<sup>2</sup> di teluk ini, namun yang berpenghuni hanya 775 pulau. Sisanya adalah gundukan batu kapur karst.

Delta Mekong seluas 40.000 km<sup>2</sup> adalah dataran rendah yang tidak lebih dari tiga meter di atas permukaan laut. Delta ini saling menyilang oleh sebuah jaringan kanal dan sungai. Sangat banyak sedimen yang dibawa oleh cabang-cabang dan aliran-aliran sungai Mekong yang memanjang sekitar 60 hingga 80 meter ke arah laut dari arah delta setiap tahunnya.

Delta Sungai Merah yang juga dikenal sebagai Song Hong adalah sebuah wilayah berbentuk segitiga dengan luas 15.000 km<sup>2</sup>. Meskipun luas wilayahnya lebih kecil, delta ini lebih berkembang dan padat penduduknya dibandingkan dengan Delta Sungai Mekong. Dahulu, Delta Sungai Merah adalah sebuah teluk kecil di kawasan Teluk Tonkin yang diisi oleh deposit besar endapan sungai selama periode milenium dan memanjang 100 meter ke Teluk Tonkin setiap tahunnya.

Ho Chi Minh City yang dahulu bernama Saigon adalah kota terbesar di Vietnam. Kota ini terletak di wilayah selatan Vietnam dekat Delta Sungai Mekong. Pada zaman dahulu, kota ini merupakan pelabuhan utama Kamboja yang kemudian ditaklukkan oleh bangsa Vietnam pada abad ke-16. Ho Chi Minh City memiliki luas sebesar 2.061 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk per 1 Juli 2017 sebanyak 8,445 juta. Cuaca di

kota ini sejuk berangin dengan suhu maksimal 27 derajat celcius, lebih sejuk dari ibu kota Jakarta.

Vietnam beriklim hujan tropis lebat atau monsun, namun sangat bervariasi dari satu tempat terhadap tempat yang lainnya. Pada bulan November hingga April adalah saat musim dingin atau musim kering yang terbentuk dari angin monsun yang bertiup dari timur laut sepanjang Pantai Cina dan mengarah ke Teluk Tonkin.

### **1.3 Perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Vietnam**

Di Vietnam, kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia diwakili oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) yang berkedudukan di Kota Hanoi. Selain KBRI, ada pula Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) yang berkedudukan di Ho Chi Minh City.

#### **1.3.1 Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Hanoi**

Berada di ibu kota Vietnam, Hanoi, Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Vietnam dibangun di jalan 50, Ngo Quyen Street, Hanoi, Vietnam. Dibandingkan dengan bangunan di sekelilingnya, bangunan KBRI (yang juga sekomples dan menempel dengan bangunan wisma duta tempat menginap tamu-tamu kedutaan) terasa agak unik. Bangunan ini dikelilingi oleh tembok tinggi dengan dominasi warna hitam



Gambar 1.4  
Penulis bersama H.E. Ibnu Hadi  
di Kedutaan Besar Republik  
Indonesia, Hanoi–Vietnam.

Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)

pekat. KBRI di Kota Hanoi dapat dihubungi melalui nomor telepon (+84-24) 3825-3353, 3825-3324, 3925-796, 3825-6316 ataupun melalui surat elektronik [hanoi.kbri@kemlu.go.id](mailto:hanoi.kbri@kemlu.go.id).

H.E. Ibnu Hadi menjadi Duta Besar RI pada 2018 lalu. Sebelumnya, beliau menjadi konsul jenderal di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Osaka, Jepang. Sebagai seorang diplomat, Ibnu Hadi berpendapat bahwa kondisi pos Vietnam sangat berbeda dibandingkan dengan saat dirinya memperoleh pos kerja di Jepang. Target khusus yang dibebankan kepadanya dan seluruh duta besar di seluruh dunia, termasuk Vietnam, oleh Presiden Republik Indonesia dikhususkan pada keberhasilan ekspor Indonesia. Hal tersebut menjadi tantangan tersendiri baginya. Dia mengistilahkan di Jepang kita berada pada posisi tangan “di bawah” karena sering memperoleh banyak bantuan dan kemudahan di dalam transaksi perniagaan. Sebaliknya, di Vietnam, Indonesia berada pada posisi tangan “di atas” alias lebih banyak memberi daripada menerima.

Peningkatan angka perdagangan dan investasi Indonesia–Vietnam akan terus digalakkan demi pencapaian nilai target perdagangan bilateral sebesar USD 10 miliar pada 2020. Oleh karena itu, untuk mengejar target tersebut, di kompleks kedutaan KBRI Hanoi yang berdampingan dengan wisma duta, tempat di mana para tamu negara dan pendukung acara kenegaraan dapat bermalam di sini, didirikan pula “Umah Indo”. Tujuan didirikannya Umah Indo adalah untuk memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada publik di Vietnam. Informasi yang diperoleh mencakup jejaring bisnis, beragam produk, aktivitas, budaya, dan gaya hidup di Indonesia, termasuk mendorong lebih luasnya kontak di antara kedua negara pada bisnis dan perdagangan, pariwisata, serta kehidupan sosial.

Umah Indo dibangun sebagai sebuah proyek nonprofit untuk *permanent exhibition house to promote Indonesia from the perspective of its trade, tourism, and investment*. Pengunjung dipersilakan datang untuk melihat lebih dekat beragam produk Indonesia, termasuk boleh mencicipi kuliner Indonesia. Selain itu, pengunjung dapat mengenal lebih jauh tentang kebudayaan Indonesia.

### 1.3.2 Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Ho Chi Minh City

KJRI untuk Republik Sosialis Vietnam berada di Ho Chi Minh City. KJRI diharapkan dapat menjadi ujung tombak peningkatan angka perdagangan dan investasi Indonesia–Vietnam. Wilayah kerja KJRI Ho Chi Minh City sangat luas, mencakup 23 provinsi di seluruh wilayah Vietnam Selatan. Sebanyak hampir seribu orang warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Vietnam, dua pertiganya atau sekitar 667 orang tinggal dan/atau bekerja di wilayah yurisdiksi KJRI di Ho Chi Minh City.

Berlokasi di 18, Phung Khac Khoan Street, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam, Hanif Salim adalah Konsulat Jenderal RI sejak 9 Maret 2018 untuk Ho Chi Minh City. Beliau adalah seorang diplomat sejak tahun 1992 di Kementerian Luar Negeri RI (dahulu Departemen Luar Negeri). Hanif Salim, kemudian menjabat sebagai Direktur Analisis Politik di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas). Pada 12 Januari 2018, beliau, kemudian dilantik oleh Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi sebagai Konsulat Jenderal RI untuk Ho Chi Minh City, Vietnam.



Gambar 1.5  
Penulis bersama  
Hanif Salim,  
Konsulat Jenderal  
RI untuk Ho Ci Minh  
City, Vietnam.

Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)

Pentingnya dukungan KJRI Ho Chi Minh City dalam membantu pencapaian nilai target perdagangan bilateral sebesar USD 10 miliar pada 2020 sejalan dengan ungkapan Duta Besar RI H.E. Ibnu Hadi di Hanoi. Kerja sama yang harmonis antara dua institusi resmi negara yang mewakili NKRI diharapkan akan terus memberikan kabar gembira bagi peningkatan ekspor ke Indonesia, termasuk investasi di dalamnya. Ter-

lebih, ketika memahami bahwa populasi padat sekitar 8 juta jiwa di Ho Chi Minh City merupakan pusat dari denyut perekonomian Vietnam.

#### 1.4 Ringkasan Sejarah Vietnam

Ada filosofi di Vietnam (dan juga negara-negara Indocina lainnya) yang tak banyak diketahui oleh masyarakat lain di luar Indocina. Filosofi itu berbunyi hidup–kehidupan–penghidupan itu ibarat seekor bebek yang sedang berenang di danau. Sekilas terlihat tenang, namun sesungguhnya kedua kaki sang bebek yang pendek di dalam air (serta tidak tampak di permukaan itu), selalu sedang mengayuh cepat bekerja keras agar laju renangnya kencang.

Siapa saja orang-orang Indocina dan negara mana yang termasuk ke dalam wilayah Indocina yang dimaksud itu? Indocina atau Semenanjung Indocina adalah wilayah di Asia Tenggara. Karena berada di timur India dan selatan Tiongkok, budaya Indocina sangat erat terakulturasi dengan budaya Tiongkok dan India seperti nama Vietnam yang menunjukkan pengaruh Tiongkok. Sementara itu, nama-nama negara tetangga lain, seperti Kamboja, Laos, Thailand, dan Myanmar memperoleh pengaruh kuat dari India.

Ada sebagian sosiolog dan ahli sejarah yang menyatakan bahwa wilayah Indocina yang dimaksud meliputi CMLV+T (Cambodja, Myanmar, Laos, Vietnam plus Thailand). Lebih jauh ada yang menjelaskan dengan sangat yakin bahwa Indocina termasuk “*main land Southeast Asia*” yang meliputi Burma, Thailand, Peninsula Malaysia, dan Singapura. Bahkan, sangat mengagetkan ketika di dalam sebuah sarsehan nasional, pernah ada yang melontarkan ide bahwa sesungguhnya Indonesia juga termasuk ke dalam wilayah Indocina, yang setelah bergabung dengan sebagian Polinesia di bawah panji bekas kolonialisme Belanda, berujung pada lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ide ini dilontarkan karena ras murni di dunia yang disepakati hanya ada tiga, yaitu Kaukasoid–Negroid–Mongoloid dan Indocina–Polinesia yang “melahirkan” Indonesia adalah sekumpulan dari bangsa ber-ras Mongoloid–Negroid. Namun, para ahli sejarah dan politik Asia Tenggara dengan tegas menyatakan bahwa istilah Indocina memang diciptakan oleh Prancis



Sumber: <https://commons.wikimedia.org>

Gambar 1.6

Sebagian sosiolog menyatakan bahwa wilayah Indocina meliputi Kamboja, Myanmar, Laos, Vietnam plus Thailand.

untuk identifikasi wilayah jajahannya di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, Laos, dan Kamboja saja (*French colony*).

Apa pun argumen sejarah yang melatarbelakanginya, Vietnam menjadi salah satu wilayah di Indocina yang sedang berlari cepat dalam mengejar ketertinggalannya. Hal ini sebagaimana terlihat dalam Global Innovation Index 2018. Tampak jelas jika Thailand yang lebih dahulu maju pada urutan ke-44, hampir terkejar oleh Vietnam yang kini

berada persis di bawahnya pada urutan ke-45. Dalam tempo hanya setahun, sejak tahun 2017 hingga 2018, Vietnam melampaui dengan cepat 12 urutan. Sementara itu, Indonesia harus puas hanya berada di urutan ke-85, mengalahkan Kamboja yang berada di urutan ke-96. Global Innovation Index diukur setiap tahunnya. Dengan demikian, terlihat jelas negara mana saja yang inovatif dan mampu berlari mengejar ketertinggalannya, serta yang hanya berjalan di tempat.

Apa yang terjadi di Vietnam usai Perang Dunia II akan melatarbelakangi penelitian yang dilakukan. Lebih lanjut, menitikberatkannya pada keberadaan masyarakat muslim dengan berbagai macam latar belakang etnisnya yang turut melahirkan industri halal di Vietnam. Sebelum membahas tentang masyarakat muslim dan industri halal di Vietnam, berikut ringkasan ragam kejadian yang terjadi di Vietnam mulai tahun 1800-an hingga 1959 yang disusun oleh Zyl, M.V. *et. al (ed.)* (2017).

- **Tahun 1802**  
Kaisar Gia Long membentuk Dinasti Nguyen dan mempersatukan Vietnam di bawah kepemimpinan tunggal.
- **Tahun 1835**  
Kejadian persekusi terhadap penganut agama Katolik asli Vietnam serta misionaris Katolik dari Prancis atas partisipasi mereka pada gerakan revolusi melawan Kekaisaran Minh Mang.
- **Tahun 1847**  
Kaisar Tu Duc naik takhta, sangat anti terhadap pengaruh asing yang hadir di Vietnam dan melakukan persekusi kepada seluruh warga asli Vietnam penganut agama Katolik.
- **Tahun 1858**  
Merespons kejadian persekusi terhadap penganut agama Katolik. Prancis dan Spanyol menyerbu Vietnam Selatan. Prancis, kemudian bertahan di Vietnam Selatan setelah penyerbuan untuk target berikutnya membentuk sebuah koloni di Cochin, Tiongkok pada 1864.
- **Tahun 1883**  
Pada bulan Desember 1883, ekspedisi Prancis menyerbu Tonkin



di Vietnam Utara dan mengalahkan “Black Flag” Tiongkok pada pertempuran Son Tay.

- **Tahun 1885**

Setelah mengalahkan masyarakat asli Vietnam dan kekuatan Tiongkok, Prancis, kemudian membentuk protektorat di Tonkin dan Annam (Vietnam Tengah) lalu diratifikasi dengan perjanjian Tientsin atau Tientsin Treaty.

- **Tahun 1887**

Indocina Prancis secara kesatuan administratif untuk wilayah Tonkin, Annam, Cochinchina Tiongkok, yang kemudian belakangan ditambah dengan Kamboja, Laos pada Indocina Prancis pada tahun 1893.

- **Tahun 1905**

Seorang nasionalis Vietnam bernama Phan Boi Choi menulis sebuah buku sejarah tentang kekalahan Vietnam dan mengadvokasi kemerdekaan dari pemerintah kolonial Prancis.

- **Tahun 1916**

Pada bulan Mei 1916, Kaisar Duy Tan digulingkan dan diasingkan akibat dari usahanya memimpin revolusi antikolonialisme di Vietnam.

- **Tahun 1919**

Tokoh nasionalis Vietnam yang tinggal di Paris, Prancis, termasuk Ho Chi Minh membuat petisi untuk menentukan nasib sendiri di Konferensi Versailles atau Versailles Conference, namun tidak dihiraukan.

- **Tahun 1930**

Tentara Vietnam yang melawan pemerintahan Prancis melakukan pemberontakan di Yen Bai, namun pemberontakan itu diredam dengan cepat oleh Prancis.

- **Tahun 1930**

Ho Chi Minh bersama Partai Komunis Indocina menggelar sebuah rapat yang diadakan di sebuah koloni Inggris di Hong Kong.

- **Tahun 1933**

Seorang nasionalis Vietnam beragama Katolik bernama Ngo Dinh Diem menjadi Menteri Dalam Negeri di Annam di bawah

kekuasaan Kaisar Bao Dai. Sayangnya, dia kemudian mengundurkan diri karena proposal yang diusulkannya ditolak.

- **Tahun 1940**

Kondisi Prancis yang dikalahkan oleh Nazi Jerman di Eropa membuat Prancis mempersilakan tentara Jepang untuk membangun basisnya di Vietnam Utara guna menghadapi serangan Tiongkok.

- **Tahun 1941**

Pada tanggal 19 Mei 1941, Ho Chi Minh dan teman-temannya membuat gerakan Viet Minh untuk melawan kolonialisme Prancis serta pendudukan Jepang di Vietnam.

- **Tahun 1945**

Pada tanggal 9 Maret 1945, tentara Jepang mengambil alih pendudukan Prancis di Vietnam serta menyatakan kemerdekaan untuk Kamboja, Laos, dan Vietnam. Setelah itu, Kaisar Bao Dai secara resmi memerintah Vietnam.

- **Tahun 1945**

Pada tanggal 2 September 1945, Ho Chi Minh mendeklarasikan kemerdekaan Vietnam Utara. Pidatonya dikenal di Ba Ninh Square, Hanoi sebagai: *“Our people have broken the chains that have fettered them for nearly a century and have won independence for Vietnam”*.

- **Tahun 1946**

Pada tanggal 19–23 Desember 1946, setelah pertarungan antara Prancis dan Viet Minh di Haiphong, Viet Minh menyerang Hanoi. Inilah awal dari perang Indocina pertama.

- **Tahun 1950**

Dipersenjatai oleh pemerintah Komunis Tiongkok, Viet Minh, kemudian secara ofensif menyerang tentara Prancis di perbatasan Vietnam Utara.

- **Tahun 1951**

Pada bulan Januari hingga Juni 1951, Viet Minh meluncurkan pernyataan perlawanan secara ofensif kepada pertahanan Prancis di Delta Sungai Merah dan mengakibatkan kekalahan telak Prancis.

- **Tahun 1952**

Prancis melakukan pembumihangusan dalam sebuah operasi

yang disebut Operation Lorraine di wilayah kekuasaan Viet Minh di Vietnam Utara.

- **Tahun 1953**

Pada bulan Oktober, Kamboja dan Laos secara serentak menyatakan bebas dan merdeka secara penuh dari seluruh aturan pemerintah Prancis.

- **Tahun 1953**

Pada tanggal 20 November 1953, pasukan angkatan udara Prancis atau French Airborne Troops mendirikan basis mereka di Dien Bien Phu, dekat dengan perbatasan antara Vietnam dan Laos.

- **Tahun 1954**

Pada tanggal 13 Maret 1954, garnisun dari Dien Bien Phu akhirnya diserang dan dikepung oleh infanteri dan artileri dari Viet Minh.

- **Tahun 1954**

The Geneva Conference pada tanggal 24 April 1954 dibuka dengan tujuan menciptakan perdamaian di Korea dan Indocina.

- **Tahun 1954**

Setelah pertempuran selama delapan minggu, pada tanggal 7 Mei 1954, wilayah Dien Bien Phu jatuh ke tangan Viet Minh, pukulan telak yang menjatuhkan psikologis pihak Prancis.

- **Tahun 1954**

Pada tanggal 7 Mei 1954, untuk pertama kalinya Ngo Dinh Diem menjadi perdana menteri di bawah pemerintahan presiden kaisar sebelumnya yang bernama Bao Dai.

- **Tahun 1954**

Tanggal 21 Juli 1954, the Geneva Accord (Persetujuan Geneva) membagi Vietnam pada pararel ke-17, dengan Viet Minh mengendalikan Vietnam Utara dan Amerika Serikat mengendalikan Vietnam Selatan.

- **Tahun 1955**

Di wilayah tetangga Vietnam, terdapat kejadian Kamboja. Raja Norodom Sihanouk melepaskan takhtanya dan berpihak pada pemilihan umum untuk menjadi perdana menteri.

- **Tahun 1955**  
Antara bulan April hingga Mei 1955, PM Diem menghancurkan kekuatan organisasi kejahatan Binh Xuyen di Saigon (sekarang bernama Ho Chi Minh).
- **Tahun 1955**  
Pada tanggal 18 Mei 1955, sekitar satu juta pengungsi dari Vietnam Utara yang sebagian besar beragama Katolik selesai dipindahkan ke Vietnam Selatan.
- **Tahun 1955**  
Pada tanggal 27 Oktober 1955, setelah mengalahkan Bao Tai di dalam sebuah referendum, Diems memproklamasikan Vietnam Selatan dan menyatakan dirinya sebagai presiden dari Republik of Vietnam.
- **Tahun 1956**  
Tanggal 28 April 1956 merupakan hari terakhir dari laskar Prancis berada di Vietnam, seluruh pasukan bersih ditarik kembali ke Prancis.
- **Tahun 1956**  
Bulan Juli tahun 1956 menjadi tenggat bagi seluruh rakyat pemilih di Vietnam untuk mempersatukan Vietnam. Salah satu ketentuan dari Perjanjian Geneva lewat begitu saja tanpa aksi apa pun terkait dengan reunifikasi Vietnam.
- **Tahun 1956**  
Satu bulan kemudian, pada bulan Agustus 1956, sosok tokoh Ho Chi Minh di tengah-tengah kekacauan yang serius di Vietnam meluncurkan program reformasi tanah komunis yang memprovokasi pemberontakan yang menentangnya di seluruh pedesaan.
- **Tahun 1957**  
Pada sebuah kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat, Presiden Diem yang sedang berada di US Congress meminta dukungan kepada Amerika Serikat.
- **Tahun 1958**  
Bulan Januari 1958, secara resmi Amerika Serikat menyatakan keprihatinan tinggi atas karakter represif rezim Presiden Diem

dan menyatakan sikap oposisi atas pemerintahan yang ada di wilayah Vietnam Selatan.

- **Tahun 1959**

Setelah sikap oposisi Amerika Serikat terhadap pemerintahan di wilayah Vietnam Selatan, para anggota politbiro Vietnam Utara melihat “peluang”. Selanjutnya, memutuskan untuk mendukung “saudara” Vietnam mereka di Selatan secara terbuka dan bergerilya untuk pemberontakan masyarakat dan pemerintah lokal Vietnam Selatan terhadap Amerika Serikat.

#### **1.4.1 Sino-Vietnamese 3000 Tahun Lalu**

Jejak masyarakat suku bangsa Vietnam diketahui berkat penemuan kerajaan pertamanya yang berlokasi di sekitar Lembah Sungai Merah atau yang biasa disebut the Red River Valley. Penemuan kerajaan ini juga dapat mengungkap sejarah Vietnam yang mencatat bahwa takdir mereka selalu berada di bawah bayang-bayang Kerajaan Tiongkok. Vietnam, bahkan pernah turut diatur oleh pemerintahan dari Tiongkok pada 111 SM. Interaksi selama 3.000 tahun, membuat keduanya melalui serangkaian hubungan yang fluktuatif. Tiongkok selalu memiliki kekuatan yang lebih besar dibandingkan dengan Vietnam. Selain itu, dalam hubungan dengan Vietnam, Tiongkok sering melakukan intervensi dengan alasan menjaga keseimbangan kawasan. Namun demikian, Tiongkok jarang benar-benar dapat mampu mendominasi Vietnam secara total. Hal ini dapat dilihat dari perlawanan yang dilakukan Vietnam terhadap Tiongkok yang terjadi pada masa Dinasti Han sampai Dinasti Qing yang terakhir.

Yang dimaksud dengan penyebutan Vietnam di sini adalah daerah sekitar Vietnam Utara yang memiliki kultur Sa Huyn. Daerah ini berbeda dengan daerah selatan Vietnam yang terpatri kuat dengan kultur Dong Son.

Sesungguhnya, hubungan sejarah *Sino-Vietnamese* yang sebenarnya sangat panjang. Walker, H. D. (2012) menyatakan bahwa pengamatan dapat dimulai dari catatan sejarah seorang Kaisar Pertama Vietnam bernama Zhao Tuo. Dalam berbagai hal, Zhao Tuo masih tetap mempertahankan identitas ke-tiongkok-annya yang murni dan tidak

terasimilasi oleh kultur rakyat yang berada di bawah kekuasaannya. Lebih jauh, menurut von Fakenhausen (2002) yang melakukan penelitian pada makam Zhao Mo, salah seorang cucu Zhao Tuo, menunjukkan hubungan yang kuat dengan gaya makam suku bangsa dari Dinasti Han dengan ciri khasnya berupa makam yang dilengkapi dengan ornamen yang sangat mirip dengan istana suku bangsa Han di wilayah Xi'an, Tiongkok.

Lebih jauh, Taylor, K. W. (2013) seorang Profesor dari Cambridge, Inggris, dengan spesialisasi studi mengenai Vietnam, menuliskan penamaan *Jiaozhi* dalam bingkai sejarah yang terpengaruh kuat oleh Tiongkok, yakni *Jiaozhi* (dalam bahasa Tiongkok: 交趾, 交阯; dalam bahasa Pinyin: *Jiāozhǐ*; dalam bahasa Vietnam: *Giao-chí*, dalam bahasa Thai: *กฺ็ู*, dalam bahasa Wade-Giles: *Chiāo-chǐh*), adalah nama yang diberikan untuk berbagai provinsi, komandan, prefektur, dan kabupaten di Vietnam Utara sejak era raja-raja Hùng hingga pertengahan dominasi Tiongkok ketiga di Vietnam hingga abad ke-7–10. Selanjutnya, disambung selama dominasi Tiongkok keempat pada 1407 hingga tahun 1427. Suku bangsa dari Dinasti Han secara berkelanjutan menanamkan pengaruh dan memperadabkan Vietnam secara serius. Secara bertahap, mereka menyentralisasikan struktur administrasi di Vietnam dan menekankan faktor ekonomi serta kultural.

*Giao* atau *Jiaozhi* memiliki satu momentum politik, yaitu berupa kerajaan yang berdaulat. Pemberontakan dan ketidakstabilan politik yang terjadi di Vietnam ketika kekaisaran Tiongkok cukup kuat mendominasi kawasan. Namun, ketika kekaisaran Tiongkok melemah, kekuatan lokal Vietnam mampu bangkit kembali yang kemudian disusul oleh kestabilan politik.

Womack (2006) menambahkan, selain memperkenalkan beberapa teknologi Tiongkok ke Vietnam, sistem monogami pada hubungan pria dan wanita dalam perkawinan (yang tidak umum pada masa itu) diperkenalkan oleh Ren Yan. Ren Yan adalah salah satu pejabat Han yang mengatur prefektur Jiuzhen pada tahun 25 M. Kebijakan Ren Yan ini mengilustrasikan ketertarikan suku bangsa Dinasti Han untuk melekatkan nilai-nilai agrikultur dan sistem keluarga patrilineal Tiongkok ke-

pada masyarakat Vietnam pada masa itu. Keberadaan Ren Yan dalam prefektur Jiuzhen diterima dengan cukup positif.

Dalam catatan sejarah Vietnam, semangat perlawanan yang gigih di Vietnam lahir dari Trung Sisters atau Trung bersaudara yang terdiri atas Trung Trac dan saudaranya Trung Nhi sekitar tahun 40-an M. Tokoh kakak beradik perempuan asli Vietnam ini memimpin langsung komando pemberontakan melawan Tiongkok dari atas kendaraan gajah mereka. Pemberontakan ini terjadi sebagai respons atas kondisi yang tidak sama dengan kondisi yang terjadi di Prefektur Jiaozhi pada tahun 29 M. Keberadaan salah satu pejabat suku bangsa Dinasti Han yang bernama Su Ting kala itu memiliki karakter yang sangat kontra produktif dan sangat tamak. Kekacauan di dalam pemerintahan Su Ting inilah yang kemudian menjadi cikal bakal terjadinya pemberontakan rakyat Vietnam yang dipimpin oleh kakak beradik perempuan fenomenal yang kemudian dikenang dengan nama Trung Sisters.



Gambar 1.7  
Trung Sisters  
memimpin langsung  
komando pem-  
berontakan melawan  
Tiongkok dari atas  
kendaraan gajah  
mereka.

Sumber: <https://en.wikipedia.org> (2018)

Meskipun pemberontakan rakyat Vietnam yang mereka pimpin itu berlangsung singkat, pemberontakan tersebut mampu menginterupsi pengaruh Tiongkok di Vietnam. Pengaruh dari pemberontakan tersebut, bahkan meluas sampai ke Prefektur Yue di Guangzi.



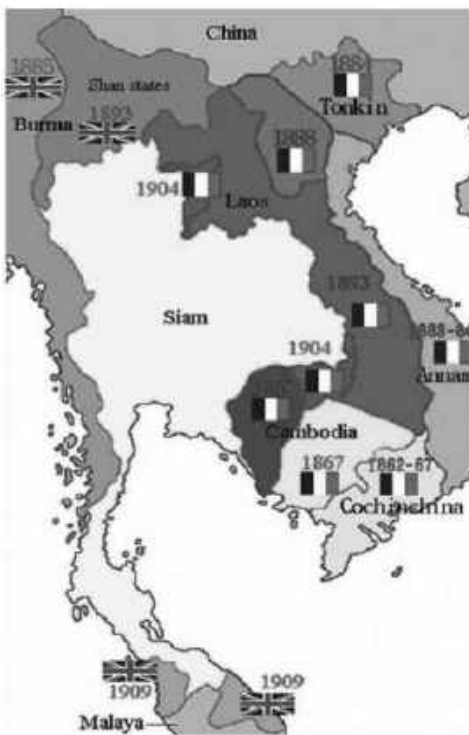
Lebih jauh lagi, Womach, S. (1995) menjelaskan jika aksi Trung Sisters (ini bermula ketika Su Ting membunuh Thi Sach, suami dari Trung Trac, sedangkan Trung Nhi, saudaranya, sangat paham seni berperang. Mereka bersama para wanita lain pendukungnya, kemudian mulai membentuk pasukan untuk mengusir kekuatan suku bangsa dari Dinasti Han di wilayah Vietnam. Singkat kata, pada tahun 39 M, Trung Sisters berhasil mengusir Tiongkok dari Vietnam lalu mengangkat diri sendiri sebagai ratu di wilayah Vietnam.

Kekuasaan kedua wanita Vietnam tersebut hanya berlangsung singkat. Pada 42 M, pasukan dari Dinasti Han di bawah pimpinan Jenderal Ma Yuan (145M–49M) kembali menduduki Vietnam. Trung Sisters yang akhirnya kalah perang memutuskan untuk bunuh diri dengan meloncat ke sungai diikuti oleh para pengikutnya. Kenangan kolektif jejak perjuangan Trung sisters inilah yang konon dianggap menjadi cikal bakal semangat atau daya tahan yang “tidak ada matinya” bagi bangsa Vietnam yang terkenal gigih dalam berjuang. Selain itu, bangsa Vietnam juga “licin” dalam bersiasat ketika harus berhadapan langsung dengan banyak kekuatan dari luar Vietnam yang meraksasa, seperti Tiongkok, Mongol, Prancis, dan Amerika Serikat pada pertengahan 1970-an. Takdir menghadapi beragam perang yang terjadi di wilayah Vietnam (utara) kemudian hari membuat masyarakat Vietnam saat itu yang berada di utara bermigrasi dan merambah ke wilayah selatan Vietnam (yang secara kewilayahan sesuai kewenangan wilayah yurisdiksi Vietnam sekarang, ternyata persis sama dengan peta resmi wilayah pemerintah Vietnam kini).

#### **1.4.2 Kolonialisme Prancis di Indocina**

Wilayah Indocina dalam pengertian sempit hanyalah penamaan pada ranah jajahan kolonialisme Prancis di Asia Tenggara yang terdiri atas Vietnam, Kamboja, dan Laos. Namun, dalam arti luas di daratan Asia Tenggara, wilayah Indocina mencakup Myanmar dan Thailand. Dalam arti yang lebih luas lagi mengacu pada wilayah maritim (laut) di Asia Tenggara yang juga mencakup Semenanjung Malaysia. Ranah Indocina atau Semenanjung Indocina adalah sebuah wilayah di Asia Tenggara yang berada di timur India dan selatan Tiongkok. Oleh

karena itu, hampir seluruh aspek budaya dan kehidupan di wilayah Indocina berkaitan erat dengan budaya Tiongkok dan India. Dari segi bahasa, nama Vietnam menunjukkan pengaruh kuat Tiongkok, sedangkan nama Kamboja, Laos, Siam (sekarang bernama Thailand), dan Myanmar mendapat pengaruh kuat India. Sejak dahulu, agama utama yang secara umum banyak dipeluk oleh masyarakat yang bermukim di Indocina adalah Buddha Theravada dan Hinayana, sedangkan di Vietnam didominasi oleh Buddha Mahayana. Di Kamboja dan Myanmar didominasi oleh Buddha Theravada, begitu juga di Laos dan Thailand.



Gambar 1.8  
 Dalam pengertian sempit,  
 wilayah Indocina mencakup Vietnam,  
 Kamboja, dan Laos.

Sumber: <https://en.wikipedia.org> (2018)

#### 1.4.2.1 Orang Prancis Pertama di Vietnam

Pengaruh Prancis di Vietnam dimulai pada tahun 1802 berkat pengenalan agama Katolik oleh para misionarisnya. Kehadiran Bishop Prancis Pigneau de Behaine yang menolong Kaisar Gia Long untuk mengalahkan pemberontakan Son Tay membuatnya naik takhta menjadi kaisar. Namun kemudian, para penerus kekaisaran malah berbalik

melawan the *catholics* dan menginginkan limitasi terhadap keikut-campuran Prancis di dalam kekaisaran Gia Long. Setelah itu, terjadilah persekusi terhadap masyarakat Katolik di Vietnam. Kejadian persekusi tersebut membuka pintu bagi Prancis untuk melakukan pembalasan melalui serangan di Cochin, Tiongkok pada 1858, termasuk wilayah Vietnam, yang termasuk di dalamnya Saigon (sekarang Ho Chi Minh City), dan Delta Sungai Mekong. Seiring dengan imperialisme serta kolonialisme pada abad ke-19 yang tak terbendung, kekuatan bangsa Eropa, kemajuan teknologi, serta kekuatan militer, termasuk di dalamnya supremasi di bidang budaya, memisahkan dunia di antara bangsa penjajah dengan yang dijajah.

#### **1.4.2.2 Orang-Orang Prancis Berikutnya di Vietnam**

Koloni Prancis pertama kali dideklarasikan pada tahun 1864 di Cochin, Tiongkok dan tak lama setelah itu Prancis meluaskan wilayah kolonial ke seantero wilayah. Dimulai dari wilayah terdekat, yaitu Kerajaan Kamboja, yang saat itu sangat lemah dan memiliki kekhawatiran terhadap serangan dari kerajaan tetangganya semisal Siam (sekarang Thailand) dan Laos. Kamboja lalu menerima Prancis sebagai pengendali wilayah dan untuk pertahanan dari ancaman kerajaan tetangga. Meski kemudian, Kamboja ternyata juga menentang tekanan Prancis untuk konsesi berikutnya, bahkan meminta bantuan kepada Tiongkok.

Serangan dari Prancis di jantung wilayah Vietnam Utara terjadi di Tonkin pada 1883. Serangan dilakukan untuk menekan pemerintahan Kekaisaran Vietnam guna menerima a *French protectorate* (protektorat Prancis). Akibat yang ditimbulkan dari serangan Prancis itu adalah kekalahan luar biasa pada pihak Vietnam, sekalipun saat itu Vietnam sudah memperoleh bantuan dari “Black Flags” (sebagai pasukan tidak resmi atau *irregular troops*) dan *Chinese regular troops* (pasukan resmi). Sebab kekalahannya bersama Vietnam, Tiongkok akhirnya berdamai dengan Prancis pada 1885 di Tientsin. Dengan demikian, mau tak mau pemerintah Vietnam harus mengakui kendali Prancis atas wilayah Vietnam, sekalipun di beberapa wilayah di Tonkin perlawanan pasukan bersenjata Vietnam masih terus terjadi secara gerilya.

### 1.4.2.3 Aturan Konstitusi Prancis 1887 untuk Vietnam

Selayaknya pemerintahan kolonialisme di mana pun juga, di Vietnam, pemerintah Prancis tidak mengakui eksistensi Vietnam sebagai sebuah entitas. Prancis menamakan wilayah Vietnam sebagai French Indocina berlaku dari tahun 1887. Hingga tahun 1893, wilayah French Indocina ditambah dengan wilayah Cochin Tiongkok, Kamboja, dan Laos. Untuk memudahkan pengawasan pihak pemerintah kolonial Prancis, wilayah Vietnam dibagi menjadi tiga wilayah besar. Pemerintah kolonial Prancis saat itu dipimpin oleh seorang gubernur jenderal dan berkedudukan di Paris, Prancis.

Kerajaan-kerajaan di Vietnam yang mengecil ruang geraknya semakin mengecil kekuasaannya. Mereka tetap diperbolehkan mempertahankan takhtanya. Namun, ketika pihak pemerintah kolonial Prancis menemukan adanya upaya subversi, mereka akan dieksekusi. Masyarakat kolonial Prancis tidak berbaur dengan masyarakat lokal Vietnam yang sangat kuat identitas nasionalnya. Orang-orang Prancis tetap membawa dan memberlakukan bahasa, busana, dan kebudayaan Prancis di Vietnam. Lebih jauh, bersama dengan peradaban mereka (*their civilizing mission*), pemerintah kolonial Prancis membuka sekolah-sekolah Prancis dan mendidik anak-anak dari keluarga elite Vietnam berlandaskan budaya Prancis. Anak-anak dari keluarga elite asli Vietnam ini diajari *medical treatments*, membangun jalan, jalan rel kereta api, mengembangkan sistem irigasi, dan memperkenalkan jenis tanaman baru. Namun sebenarnya, di balik “kebaikan hati” pemerintah kolonial Prancis tersembunyi keinginan agar orang-orang Vietnam yang dididik dengan cara Prancis tersebut dapat mampu bekerja di perkebunan karet milik Prancis di Vietnam, termasuk bekerja di pertambangan.

Sistem kolonial Prancis saat itu mematok pajak tinggi atas garam, alkohol, dan opium. Lebih jauh, masyarakat Vietnam didorong menggunakan opium dalam kehidupan sehari-harinya secara legal. Karena konsumsi yang tinggi terhadap ketiga barang tersebut, penghasilan pajak pemerintah kolonial Prancis menjadi tinggi. Hal tersebut merupakan elemen kunci atas keberhasilan pendapatan (*revenue*) pajak di Indocina koloni Prancis saat itu.

Indocina sendiri bukanlah wilayah koloni untuk pemukim. Hal ini sebab setelah 50 tahun setelah pemerintahan, jumlah penduduk dari pemerintah kolonial Prancis hanya sebesar 40.000 orang, 80 persennya terdiri atas para tentara dan pejabat. Mereka yang sedikit itu ternyata mampu menguasai populasi di area dengan jumlah penduduk sebesar 23 juta orang yang sebagian besar pekerjaannya saat itu adalah buruh petani. Mereka yang memiliki latar pendidikan sekolah-sekolah Prancis di Vietnam, ternyata selamanya tetap menjadi warga negara kelas dua di wilayah pemerintah kolonial Prancis Indocina yang sangat menindas dan memeras tersebut.

#### **1.4.2.4 Perlawanan kepada Prancis**

Pemerintah kolonial Prancis tidak pernah mengakui eksistensi masyarakat di wilayah kolonialnya. Penyiksaan yang kejam dijatuhkan kepada para pihak yang menentang keberadaan pemerintah kolonial Prancis. Gaung aspirasi untuk kemerdekaan hanya dapat dilakukan oleh mereka yang bermukim di luar Vietnam, semisal Ngo Dinh Diem (yang kemudian menjadi Presiden di Vietnam Selatan).

Pada 1920, Nguyen Thai Hoc mendirikan Vietnam Nasionalist Party Vietnam Quoc Dan Dang atau VNQDD di Tiongkok. VNQDD itu sendiri merupakan sebuah model gerakan nasionalis di Tiongkok yang bernama Kuomintang. VNQDD mencoba melakukan perlawanan kepada pemerintah kolonial Prancis di Yen Bai, Vietnam Utara. Perlawanan tersebut sayangnya mengalami kegagalan. Nguyen Thai Hoc, kemudian dieksekusi bersama seluruh pengikutnya oleh pemerintah kolonial Prancis.

Pergerakan komunis Vietnam atau *Vietnam Communist Movement* yang dipimpin oleh Nguyen Ai Quoc (nama lain dari Ho Chi Minh) juga berbasis di Tiongkok, hingga pemerintah Kuomintang Tiongkok melawan kelompok komunis pada 1927. Tiga tahun kemudian, Ho Chi Minh menjumpai partai komunis Indocina (Indocina Communist Party) di Hong Kong (sebagai wilayah koloni Inggris). Partai komunis Indocina di Hong Kong tersebut secara perlahan memperluas pengaruh *clandestine*-nya ke seluruh petani dan buruh tani di Vietnam. Namun demikian, gerakan yang dihasilkan dianggap sangat minor dan tak cukup besar untuk menggoyahkan pemerintah kolonial Prancis di Indocina.

Tak lama situasi berubah karena Perang Dunia II (PD II). PD II turut memengaruhi situasi dan kondisi pemerintah kolonial Prancis di Vietnam, khususnya ketika tahun 1940 Jerman menduduki Prancis lalu Jepang yang sedang bertempur di Tiongkok sejak tahun 1937 masuk dan menyerang Indocina Prancis. Jepang memengaruhi Vietnam dengan memberikan pekerjaan kepada masyarakat Vietnam dalam bidang militer, yang sebelumnya saat pemerintah kolonial Prancis, hal ini tidak mungkin dilakukan.

#### **1.4.2.5 Nasionalisme di Vietnam**

Dehumanisasi dan penghinaan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Prancis (yang juga dilakukan dengan cara sama oleh negara Eropa lain di wilayah kolonial Asia lainnya) selama itu menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi pada diri masyarakat Vietnam. Kelompok masyarakat nasionalis Vietnam mencoba peruntungan strategi dengan bersekutu dengan Jepang, kemudian disusul dengan Kuomintang di Tiongkok dan Amerika Serikat.

Pada 1941, di sebuah daerah terpencil di perbatasan selatan Tiongkok, Ho Chi Minh bersama beberapa rekan komunisnya menjumpai bahwa Viet Minh Doc Lap Dong Minh atau League for the Independence of Vietnam yang kemudian disingkat menjadi Viet Minh, menyusun basis gerakan nasionalis di luar negeri untuk mengambil simpati dari seluruh golongan masyarakat Vietnam. Mereka mendeklarasikan tujuan sebagai bentuk perlawanan untuk mengalahkan fasis Jepang dan kolonial Prancis. Yang terpenting adalah untuk kemerdekaan Vietnam yang demokratis dan progresif. Viet Minh berhasil membangun sistem sel *clandestine* di seluruh Vietnam. Hingga pada 1944, rekan dari Ho Chi Minh yang bernama Vo Nguyen Giap mulai membentuk Vietnam Armed Propaganda and Liberation Brigade, sebuah brigade tentara gerilya pemula yang bersenjatakan seadanya dan ditempatkan di daerah-daerah terpencil di seluruh Vietnam.

Pada tanggal 9 Maret 1945, khawatir akan datangnya invasi dari sekutu di Indocina, Jepang melakukan kudeta terhadap otoritas Prancis. Jepang dengan mudah mengatasi tentara Prancis, setelah menang atas Perancis, Jepang menyatakan kolonialisme Prancis di

Indocina usai. Kamboja dan Laos pun, kemudian memungkinkan untuk mendeklarasikan kemerdekaannya di bawah monarki mereka masing-masing. Sementara itu, wilayah Annam dan Tonkin berada di bawah kekaisaran Bao Tai, Vietnam. Karena ketiadaan tentara Prancis, gerilya Viet Minh yang dipimpin oleh Vo Nguyen Giap masih tetap beroperasi di wilayah Viet Bac di Vietnam Utara Kota Hanoi. Karena khawatir akan serangan balasan Jepang, Viet Minh hanya melakukan beberapa serangan kecil pada pasukan pendudukan Jepang. Mereka mengantisipasi kemungkinan dapat mengalahkan Jepang demi mencapai kemerdekaan Vietnam yang sesungguhnya.

Pada akhir tahun 1940-an, komunisme bercokol kuat di Eropa Timur. Pada 1949, kekuatan komunis berlangsung di Tiongkok, sedangkan di Uni Soviet bom atom pertamanya diledakkan yang berakhir dengan monopoli nuklir oleh Amerika Serikat. Luluh lantak akibat bom nuklir menghasilkan ketakutan secara masif dan membuat kegelisahan dunia hingga muncullah perang dingin atau the Cold War, namun bukan berarti mengakhiri konflik.

Antipati kepada pemerintahan Prancis tumbuh di Indocina pada awal abad ke-20, sejalan dengan keberanian para pemikir komunis mengkritik kolonialisme atau penjajahan. Prancis mengatur koloninya di Asia dengan tangan besi dan dengan cepat selalu mampu menghancurkan pemberontakan melalui isu nasionalisme di Vietnam. Karena pemberontakan masyarakat lokal bersifat sporadis, dengan mudah pemerintah kolonial Prancis memadamkan api pemberontakan dan menangkap para tokoh yang terkait pemberontakan, kemudian mengasingkannya. Salah seorang di dalamnya adalah tokoh muda pemberontak bernama Ho Chi Minh.

Kevakuman sempat terjadi ketika di Eropa, Prancis dikalahkan oleh Nazi Jerman. Pemerintah Nazi Jerman lalu mengambil kendali pemerintah Prancis pada bulan Juni 1940 hingga seterusnya. Situasi yang terjadi di Eropa turut memengaruhi wilayah kolonialisme Prancis di Indocina. Seluruh hal yang terkait dengan masalah administratif, yang biasanya dilakukan oleh pemerintah Prancis lama, kemudian dipotong oleh Paris yang telah dikuasai Nazi Jerman. Pada tahun yang sama, pasukan Jepang yang sedang berperang di wilayah perbatasan Tiongkok

melihat kesempatan yang terbuka dari kevakuman yang terjadi. Mereka langsung mengambil kesempatan dengan segera mengirimkan pasukan tentaranya ke wilayah kolonialisme Prancis di Indocina.

#### **1.4.2.6 Vietnam Merdeka Lalu Perang Lagi**

Sebagai pemimpin dari Vietnam Utara, pada tahun 1955, Ho Chi Minh memimpin pemerintahan negara dengan memberlakukan teknik penghapusan kebebasan individu. Dia juga secara kejam memaksakan sistemnya untuk diberlakukan kepada kelompok petani yang tak setuju dengannya. Kepemimpinan Ho Chi Minh berlangsung hingga tahun 1959, kemudian digantikan oleh Le Duan pada 1960. Ketika itu, politbiro Vietnam Utara menyimpulkan untuk berperang demi mencapai persatuan dengan para komunis Vietnam.

Sekalipun posisinya telah digantikan, Ho Chi Minh tetap memberikan pengaruh pada beberapa perang yang berlangsung kemudian. Hingga pada akhirnya, pada satu masa berikutnya di saat kondisi fisiknya melemah karena faktor usia dan penyakit yang dideritanya, dirinya kemudian hanya menjadi boneka atau wayang belaka (*figure-head*) bagi penguasa di wilayahnya. Khususnya, ketika Ho Chi Minh memainkan peran sebagai penasihat dalam negosiasi damai Vietnam Utara.

Ho Chi Minh dikenal oleh pengikutnya sebagai pribadi yang sederhana, rendah hati, dan tidak korup. Hal tersebut menjadikan dirinya dicintai secara luas. Kepergiannya juga ditangisi ketika ia meninggal dunia pada tahun 1969 dalam suasana duka yang cukup panjang.

#### **1.4.2.7 Vietnam Terbagi Dua pada Maret 1955**

Perang Indocina pertama dimenangi oleh pihak Vietnam atas kebebasannya dari penindasan kolonialisme Prancis. Namun sesungguhnya, hal ini membahayakan Vietnam karena setelah itu pada 1955, Vietnam terbagi menjadi dua, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Sekitar 300 hari pascapenandatanganan the Geneva Accords, pembatas wilayah antara Vietnam Utara dan Vietnam Selatan dibuka. Akibatnya, sekitar satu jutaan orang yang bermukim di Vietnam Utara pindah ke Vietnam Selatan. Mereka yang sudah menganut agama Katolik pun



menjadi beragama ketika mereka masih akan tetap tinggal di wilayah Vietnam Utara di bawah rezim komunis. Rasa cemas yang luar biasa juga diakibatkan propaganda yang dilakukan oleh pihak CIA, tetapi dibuktikan secara kasat mata oleh pihak otoritas berwenang komunis Vietnam Utara. Hanya sekitar 90.000 orang dari wilayah Vietnam Selatan yang pindah ke wilayah Vietnam Utara, yang dahulunya adalah para gerilyawan Viet Minh yang berperang melawan pemerintah kolonial Prancis. Namun demikian, banyak pula gerilyawan Viet Minh yang secara sembunyi-sembunyi tetap bertahan berada di Vietnam Selatan. Mereka tak ingin kembali ke Vietnam Utara.

#### **1.4.2.8 Komunisme Meluas di Vietnam**

Ho Chi Minh adalah seorang nasionalis Vietnam yang berhaluan komunis. Dia menghibahkan seluruh kehidupannya untuk perjuangan politik di tanah airnya. Catatan perinci mengenai kehidupannya sangat kabur. Menurut Sainteny, J. (1972), hal ini kemungkinan karena kehidupannya sebagai seorang aktivis revolusi politik selama ini dilakukan secara *clandestine* atau karena dirinya sengaja dimitoskan (dengan tujuan propaganda yang khas cara komunis). Oleh karena itu, kini dirinya dianggap layak untuk dikenang sebagai Bapak Vietnam Modern.

Ho Chi Minh terlahir dengan nama Nguyen Sinh Cung. Ketika berusia sepuluh tahun, dirinya dikenal dengan nama Nguyen Tat Thanh. Ketika remaja dikenal sebagai Nguyen Ai Quoc atau Nguyen si Patriot. Keluarganya tinggal di Annam, wilayah Vietnam Tengah, yang saat itu dipimpin oleh kekaisaran yang masih menjalankan sejumlah otoritas di bawah proteksi pemerintah kolonial Prancis. Senada dengan seluruh anggota dari elite *Confucian scholar-mandarin*, ayah dari Ho Chi Minh sangat membenci dominasi asing di negerinya.

Ho Chi Minh muda bersekolah di sebuah lembaga pendidikan untuk anak-anak khusus di Vietnam bernama Quoc Hoc Lucee di Kota Hue yang menerapkan sistem adab dan budaya Prancis. Setelah lulus, dirinya diharapkan dapat bergabung untuk bekerja pada lembaga administratif pemerintah kolonial Prancis. Pada usia 21 tahun, Ho Chi Minh muda memutuskan untuk melihat dunia lebih luas, kemudian

bekerja sebagai pembantu di dapur kapal dan pekerjaan lainnya secara serabutan demi menunjang kehidupannya. Selanjutnya, Ho Chi Minh menghabiskan waktu mudanya di Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Setelah Perang Dunia I usai, Ho Chi Minh muda menjadi aktivis politik. Dia juga bergabung dengan grup nasionalis Vietnam di Paris dan melakukan pernyataan petisi di konferensi damai Versailles guna meraih prinsip menentukan diri sendiri serta demokrasi di Vietnam. Namun, apa yang dilakukannya ketika itu mengalami kegagalan.

Saat itu, Rusia berhasil membentuk dirinya menjadi negara komunis pertama di dunia, membelah pergerakan sosialisme internasional. Para aktivis sayap kiri di banyak tempat berhadapan dengan pilihan untuk menjadi sosdem (*social democratics*) atau komunisme (*communism*). Pada 1920, Ho Chi Minh membuat sebuah keputusan penundaan untuk memilih salah satu di antara keduanya, sosdem atau komunisme, dengan membuat beberapa artikel di sebuah koran antiko-lonial yang berlatar komunis bertajuk *Le Paria*. Hingga akhirnya, Ho Chi Minh sampai di sebuah negara yang baru berdiri bernama Uni Soviet (Sovyet Union). Di Uni Soviet, Ho Chi Minh dilatih dengan metode dan perspektif ajaran Marxism oleh Comintern (Sovyet-Controlled Communist International) untuk melihat konteks kemerdekaan Vietnam secara luas dan menyeluruh.

Pada pertengahan tahun 1920-an, Ho Chi Minh menikah dengan seorang perempuan asal Tiongkok. Sepuluh tahun kemudian, pascapernikahannya, Ho Chi Minh memantapkan dirinya memilih komunisme. Selanjutnya, dia berhasil menyatukan beragam partai komunis kecil di Vietnam, di bawah satu payung Partai Komunis Vietnam.

Hoang, V.C. (1964) dalam bukunya yang berjudul *“From Colonialism to Communism”* menceritakan *proverb* andalan Ho Chi Minh sebagai *“The storm is an opportunity for the pine and the cypress to show strength and stability.”* Yang artinya kurang lebih adalah bahwa badai yang datang sesungguhnya adalah ujian untuk membuktikan ketangguhan atau kekuatan serta stabilitas pohon pinus dan cemara.

Pohon pinus dan cemara adalah metafora masyarakat Vietnam, sedangkan badai adalah metafora untuk beragam kolonialisme di Vietnam yang selama itu menguji mereka. Arti dari nama Ho Chi Minh sebe-

narnya adalah *“the light bearer”* atau si pembawa cahaya. Arti ini dianggap cocok bagi dirinya sebagai pemimpin nasional dari pandangan tradisi Confusius, yakni mewujudkan kebajikan dan kebijaksanaan manusia. Gerakan itu dianggap berhasil ketika Ho Chi Minh mampu mendeklarasikan kemerdekaannya pada tahun 1945.

### **1.4.3 Vietnam dan Amerika Serikat**

Kesan pertama yang terbayang ketika seseorang menyebut nama Vietnam adalah perang, kehancuran, kejahatan kemanusiaan, pengungsian, dan kematian. Perang Vietnam atau the Vietnam War (sering pula disebut “Perang Indocina II”) yang terjadi antara 1957 dan 1975 telah menimbulkan banyak korban dari seluruh pihak yang berperang. Perang ini merupakan bagian dari Perang Dingin antara dua kubu ideologi besar, yaitu Amerika Serikat (SEATO) dan Rusia (Komunis). Southeast Asia Treaty Organisation (SEATO) adalah Pakta Pertahanan Asia Tenggara, sebuah organisasi yang didirikan untuk memblokir berkembangnya komunisme lebih lanjut di Asia Tenggara. SEATO ditandatangani pada tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina. SEATO dibentuk pada pertemuan mitra perjanjian di Bangkok pada bulan Februari 1955 dan memiliki markas besar yang berlokasi di Kota Bangkok, Thailand. Setelah tahun 1976, Vietnam Selatan bersatu dengan Vietnam Utara, kemudian bertransformasi menjadi sebuah negara Sosialis Komunis. SEATO dibubarkan pada tanggal 30 Juni 1977.

SEATO versus Komunis alias Amerika Serikat versus Rusia melanjutkan Perang Dingin pada 1957 hingga 1975 di Asia Tenggara, yang dikenal sebagai Perang Indocina II, di Vietnam. Lanjutan Perang Dingin tersebut membagi Vietnam menjadi dua kubu yang berperang. Kubu pertama adalah Republik Vietnam (Vietnam Selatan) dengan keanggotaan sekutu Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Australia, Selandia Baru, dan Filipina (bantuan militer oleh Taiwan dan Spanyol). Kubu kedua adalah Republik Demokratik Vietnam (Vietnam Utara) dengan keanggotaan sekutu Uni Soviet, Tiongkok, Korea Utara, Mongolia, dan Kuba. Akibat perang ini, banyak korban berjatuh dari kedua belah kubu. Jumlah korban yang tewas dari kubu Vietnam Selatan diperkirakan lebih dari 280.000 jiwa, sedangkan kubu Vietnam

Utara lebih dari 1.000.000 jiwa. Perang di Vietnam ini mengakibatkan eksodus besar-besaran warga Vietnam ke negara lain, terutama Amerika Serikat, Australia, Eropa, serta negara-negara Barat lainnya. Tak heran jika banyak ditemukan restoran dan komunitas Vietnam yang cukup besar di negara-negara tersebut.

#### **1.4.3.1 Amerika Serikat Bertahan di Vietnam (Maret 1959–Desember 1964)**

Komitmen Amerika Serikat adalah melawan berkembangnya pengaruh komunisme di seluruh dunia, termasuk di Vietnam. Kehadirannya ada secara tegas di Vietnam Selatan setelah pihak Prancis resmi meninggalkan Vietnam. Awalnya, pihak Amerika Serikat tidak terlalu menyadari kekuatan penghadangan terhadap pengaruh komunisme di Vietnam. Namun, sungguh mengejutkan pihak Amerika Serikat, ternyata politisi yang didukung yang bernama Ngo Dinh Diem mampu menjalankan tugas ke pemerintahannya secara efisien dan efektif. Sebagai seorang perdana menteri di bawah Presiden Bao Dai, Diem berhasil meringkus organisasi mafia Binh Xuyen, milisi Cao Dai dan sekte religi Hoa Hao yang sebelumnya sudah ditentang pada masa pemerintahan Vietnam sebelumnya.

Pada bulan Oktober 1955, Diem membuat sebuah referendum yang menghasilkan kemenangannya atas Bao Dai. Dia kemudian mengangkat dirinya sendiri menjadi presiden dari Republik of Vietnam dan memperoleh dukungan penuh dari Amerika Serikat, khususnya untuk menghalau komunisme di Vietnam Selatan. Hal ini membuat pihak pemerintah Vietnam Utara, khususnya Ho Chi Minh tidak senang. Mereka, kemudian diam-diam mem-*benchmark* kelemahan dari pihak Vietnam Selatan. Setelah berhasil mempelajarinya, kemudian berdiplomasi dengan menawarkan unifikasi dengan Vietnam Selatan, di bawah peraturan hukum dan perundang-undangan komunis.

Kondisi sesungguhnya yang terjadi pada kedua belah pihak, baik di Vietnam Utara maupun di Vietnam Selatan adalah sebagai berikut.

- Vietnam Utara harus berhadapan dengan banyak masalah internal semisal eksekusi para nonkomunis nasionalis. Selain itu, pengiriman ke kamp kerja paksa dan meneror para pihak yang

tidak setuju dengan propaganda komunisme. Di desa-desa, revolusi rakyat atas reformasi agraria yang diberlakukan mengakibatkan ribuan kematian sia-sia.

- Di Vietnam Selatan, Presiden Diem mulai merasakan ketidaknyamanan atas kehadiran Amerika Serikat yang mulai menampakkan wajah aslinya yang mirip dengan “rasa” pemerintah kolonial Prancis pada masa sebelumnya.

Akhirnya, pada bulan Oktober 1955, Diem menang atas Bao Dai pada sebuah referendum. Saat itu, pada tahun yang sama, General Lawton Collins dalam kedudukannya sebagai Special Representative in Vietnam yang mewakili pemerintah Amerika Serikat mengatakan “*The 50-50 chance of saving South Vietnam is worth trying*”.

#### **1.4.3.2 Amerika Serikat Versus Vietnam (Januari 1965–September 1967)**

Ketika pada tahun 1965 gerilyawan Viet Cong Vietnam Utara membuat jalan tembus untuk menuju Vietnam Selatan, Amerika Serikat segera meresponsnya dengan cara memperluas perannya di dalam peperangan. Pada bulan Maret 1965, Amerika Serikat mengirimkan angkatan darat pertamanya. Tak lama setelah itu, di bawah komando Jenderal William Westmoreland, terjadi kontak perang antara Amerika Serikat dan Vietnam Utara yang komunis melalui *Operation Rolling Thunder*. Kampanye dan hujan bom ditujukan kepada pihak Vietnam Utara yang komunis beserta sejumlah besar pasukan tempur yang diterjunkan ke medan perang tersebut. Strategi kombinasi dilakukan oleh pihak Amerika Serikat di medan pertempuran antara tentara dan marinir. Perang yang berlangsung dan hujan bom yang masif memunculkan frustrasi luar biasa dari kedua pihak terkait yang berperang (Vietnam Selatan plus Amerika Serikat dan Vietnam Utara yang komunis).

#### **1.4.3.3 Titik Balik Vietnam (September 1967–Desember 1968)**

Kejadian yang luar biasa dapat dikatakan sebagai titik balik yang dapat diamati atas pelibatan banyak negara terhadap perang kedua belah kubu Vietnam. Kejadian tersebut adalah sebagai berikut.

- **Vietnam Utara**

Menurut Pribbenow, M. (2003) dalam *"The Ology War: Technology and Ideology in the Defense of Hanoi, 1967"* dalam *Journal of Military History (1)* halaman 183, dikemukakan hasil keputusan Partai Buruh Korea pada bulan Oktober 1966, pada awal tahun 1967. Pemerintah Korea Utara mengirim satu skuadron tempur dan 200 pilot untuk bertugas ke Vietnam Utara guna mendukung skuadron tempur Vietnam Utara ke-921 dan ke-923 untuk melindungi Hanoi. Mereka terus berperang hingga tahun 1968. Ditambah pengiriman dua resimen artileri antipesawat. Selain itu, Korea Utara juga mengirimkan senjata, amunisi, dan dua juta set seragam untuk rekan-rekan mereka di Vietnam Utara. Lebih lanjut, menurut Gluck, C (2001) dalam *"Korea admits Vietnam war role"*. *BBC News*. Diakses tanggal 19 Oktober 2006; *"North Korea fought in Vietnam War."* *BBC News*. 31 Maret 2000. Diakses tanggal 19 Oktober 2006; *"North Korea honours Vietnam war dead"*. *BBC News*. 12 Juli 2001. Diakses tanggal 19 Oktober 2006 bahwa Kim Il-sung dilaporkan telah mengatakan kepada seluruh pilot tempur agar "berperang seakan-akan langit Vietnam adalah langit mereka sendiri."

- **Vietnam Selatan**

Di wilayah selatan Vietnam, mengutip pendaratan pertama pasukan tempur darat Amerika di Vietnam Selatan selama bulan Maret 1965, khususnya Resimen Marinir Ketiga AS, Divisi Marinir III, dikerahkan ke Vietnam dari Okinawa untuk mempertahankan lapangan udara Da Nang, Vietnam, dalam *Facts about the Vietnam Veterans Memorial Collection*". *nps.gov*. Selama puncak keterlibatan militer AS, 31 Desember 1968, Summers, H.G. Jr. (1985) dalam *Vietnam War Almanac, Facts on File Publishing*, menjelaskan perincian pasukan sekutu sebagai berikut.

1. Sebanyak 536.100 personel militer AS dengan 30.610 personel militer AS tewas saat itu.
2. Sebanyak 65.000 personel *Free World Forces*.
3. Sebanyak 820.000 personel Angkatan Bersenjata Vietnam

Selatan atau South Viet Nam Armed Forces (SVNAF) dengan 88.343 tewas saat itu.

4. Pada akhir perang, ada sekitar 2.200 personel militer AS hilang dalam aksi atau *Missing in Action* (MIA) dan menjadi tawanan perang atau *Prisoners of War* (POW).

#### 1.4.3.4 “Vietnamisasi” Perang Nixon (Desember 1969–Desember 1971)

Richard Nixon, Presiden Amerika Serikat (AS) yang berkuasa saat itu, pada 8 Desember 1969, menyampaikan pengumuman sangat penting bahwa perang yang terjadi di Vietnam sudah mencapai konklusi atau dalam kata lain mendekati akhir. AS yang memegang kendali blok barat siap menggunakan pendekatan baru terhadap Vietnam. Program baru Amerika Serikat itu dinamakan “Vietnamisasi”.

Terobosan baru Nixon diartikan bahwa AS akan menyerahkan tanggung jawab perang kepada Pasukan Vietnam Selatan. Caranya dengan melatih tentara Vietnam Selatan menjadi mesin perang yang bertempur melawan Pasukan Vietnam Utara. Untuk memulai program “Vietnamisasi”, Nixon mengambil langkah awal dengan menarik 60 ribu tentara AS dari medan tempur Vietnam dan mewarisi senjata-senjata milik negaranya kepada tentara Vietnam Selatan.

Orang-orang Amerika Serikat yang anggota keluarganya banyak dikirim berperang di Vietnam, terbuai dengan harapan sesuai isi kampanye “Vietnamisasi”. Selain itu, secara bertahap, tentara ditarik dari medan perang Vietnam. Hal ini karena perang yang menyengsarakan tersebut benar-benar akan berakhir dan Amerika Serikat tidak akan ikut campur lagi. Namun, kurang lebih empat bulan setelah konferensi pers berakhirnya perang Vietnam, Nixon menjilat ludahnya sendiri.

Pada bulan April 1970, Presiden Nixon (dari Partai Republik) memerintahkan militer AS dan pasukan Vietnam Selatan menyerbu Kamboja. Serangan di negara tetangga Vietnam ditujukan untuk memusnahkan sejumlah bangunan komunis di Kamboja. Namun, sesaat setelah Amerika Serikat menyerang Kamboja, Vietnam Utara melancarkan serangan balas dendam. Mereka membombardir Vietnam Selatan

tanpa ampun (termasuk wilayah Kamboja yang berbatasan dengan Vietnam menjadi terdampak).

Karena melihat Vietnam Selatan terus terdesak, Amerika Serikat mau tak mau kembali “turun gunung”. Melalui serangan udara, pasukan Vietnam Utara dapat dipukul mundur sementara perang di Vietnam terus berlangsung hingga 1975. Hingga ketika Saigon (sekarang Ho Chi Minh City) jatuh ke tangan rezim komunis Vietnam Utara, peperangan di ranah Vietnam itu berhenti (Liputan6.com, Washington diakses pada 18 November 2018).

#### **1.4.3.5 Amerika Serikat Pulang (Januari 1972–Januari 1973)**

Pertempuran di Vietnam memang tidak berakhir meskipun Perjanjian Paris 1973 telah disetujui. Perang baru berakhir secara total pada tahun 1975 setelah Saigon jatuh ke tangan rezim komunis. Pada 19721–1973, sebagian tentara Amerika Serikat telah dipulangkan, tetapi kemudian terjadi pengiriman kembali setelah Vietnam Selatan dalam kondisi terdesak dibombardir oleh Vietnam Utara.

#### **1.4.3.6 Amerika Serikat Balik Lagi (Januari 1973–1975)**

Jumlah korban yang meninggal semasa perang Vietnam dari pihak Vietnam Selatan diperkirakan melebihi 280.000 jiwa. Sementara itu, korban dari pihak Vietnam Utara lebih dari 1.000.000 jiwa. Perang ini mengakibatkan eksodus besar-besaran warga Vietnam ke luar negeri, terutama negeri-negeri Barat semisal Amerika Serikat, Australia dan lainnya yang memberikan asilum politik. Tak heran jika di negara-negara tersebut, ditemukan komunitas Vietnam secara luas. Mereka pun umumnya fasih berbahasa Prancis.

Tak dapat dipungkiri bahwa perang Vietnam yang juga disebut Perang Indocina II ini merupakan bagian dari Perang Dingin antara dua kubu ideologi besar, yakni komunis dan liberal. Kedua kubu yang saling berperang adalah Republik Vietnam (Vietnam Selatan) dan Republik Demokratik Vietnam (Vietnam Utara). Republik Vietnam (Vietnam Selatan) bersekutu dengan Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Australia, Selandia Baru, dan Filipina. Sementara itu, Republik



Demokratik Vietnam (Vietnam Utara) yang bersekutu dengan Vietnam Utara adalah Uni Soviet dan Tiongkok yang berideologi komunis.

Di dalam tayangan sebuah televisi nasional di Amerika Serikat pada tahun 1973, Presiden Nixon dari Partai Republik mendeklarasikan perdamaian secara terhormat di Vietnam setelah penandatanganan perjanjian gencatan senjata di Paris, Prancis. Gencatan senjata dimulai pada 23–27 Januari 1973 meskipun perang di Vietnam tersebut sejatinya berakhir pada 1975. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Nixon mengimbau kepada kedua belah pihak yang berperang, yaitu Vietnam Selatan (dengan dukungan Amerika Serikat dan Prancis) dan Vietnam Utara (dengan dukungan Uni Soviet dan Tiongkok) agar saling melepaskan tahanan perang yang diikuti dengan pasukan tempur Amerika Serikat yang akan ditarik secara bertahap.

#### **1.4.3.7 Unifikasi Dua Vietnam dan Amerika Serikat Pulang untuk Selamanya (1976)**

Setelah berakhirnya Perang Vietnam pada akhir 1975, pada 1976, kedua Vietnam, baik Vietnam Utara dan Vietnam Selatan akhirnya bersatu (unifikasi) di bawah peraturan perundang-undangan rezim komunis Vietnam Utara. Keduanya juga mendeklarasikan diri dengan nama resmi Republik Sosialis Vietnam (*Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam*), dengan bahasa resmi *Việt Nam* dan memiliki moto negara “Kemerdekaan, Kebebasan, Kebahagiaan” (*Độc lập, tự do, hạnh phúc*). (Liputan6.com, Washington, diakses pada 18 November 2018).



## BAB II BERAGAMA DI VIETNAM



Isu beragama di Vietnam kini menjadi semakin menarik sebab berada di tengah pusaran sistem pemerintahan yang memegang teguh ideologi sosialis komunis. Namun, hal ini sejalan dengan pesatnya laju pertumbuhan ekonomi Vietnam yang berlandaskan ideologi kapitalis. Berdasarkan Pew Forum (2015) yang berbasis di Washington DC, Amerika Serikat, atas proyeksi keagamaan di Vietnam, gambaran masyarakat, baik yang beragama maupun tidak beragama di Vietnam adalah sebagai berikut.

• Kristen	: 9.310.000 orang
• <b>Islam</b>	: <b>200.000</b>
• Tidak berafiliasi (ateis)	: 31.720.000
• Hindu	: < 10.000
• Buddha	: 16.590.000
• Agama lokal	: 45.790.000
• Yahudi	: < 10.000
• Yang lainnya	: 430.000
• <b>Total</b>	: <b>104.060.000</b>

Data tersebut berbeda dengan data statistik dari CIA World Factbook 2016 yang menyatakan jumlah penduduk di Vietnam sebanyak 95.261.021 juta jiwa. Pada 2015, Pew Research menyatakan jumlah populasi di Vietnam sebesar 104.060.000 orang dengan

beragam latar belakang agama dan kepercayaan yang dianutnya. Yang terbanyak adalah penganut agama lokal sebanyak 45.790.000 orang. Peringkat kedua adalah tidak berafiliasi dengan agama dan kepercayaan apa pun (ateis) sebanyak 31.720.000 orang dan ketiga adalah penganut agama Buddha sebanyak 16.590.000 orang. Sementara itu, penganut agama Islam sangat kecil jumlahnya alias minoritas, yakni hanya 200.000-an orang di seluruh Vietnam.

Untuk mengendalikan seluruh kegiatan keagamaan dan kepercayaan, pemerintah Vietnam membentuk sebuah lembaga baru yang dalam bahasa Vietnam disebut sebagai Ban Tôn Giáo Chính Phủ. Lembaga baru ini memiliki tugas dan kewenangan mengurus seluruh persoalan keagamaan, kepercayaan, dan kegiatan beragama yang ada di seluruh wilayah Vietnam.

## **2.1 Ban Tôn Giáo Chính Phủ (Lembaga Urusan Agama di Vietnam)**

Ban Tôn Giáo Chính Phủ adalah nama Vietnam dari Government Committee for Religious Affairs (Chuyên qua lam tiêu đề thư) yang berlokasi di Kota Hanoi dan beralamat di Dương Đình Nghệ, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Vietnam dengan nomor telepon +84 24 3824 8763. Lembaga ini adalah sebuah lembaga yang baru dibentuk dan belum genap berusia satu tahun ketika para peneliti dua kali datang ke sana pada tahun 2018 untuk melakukan interviu mendalam. Ban Tôn Giáo Chính Phủ adalah sebuah departemen di negara sosialis komunis Vietnam yang mengurus seluruh agama di Vietnam. Meskipun jumlah populasi muslimin di Vietnam sangat kecil, lembaga ini tertarik dengan lembaga dan proses sertifikasi halal, serta menyatakan serius untuk mempelajarinya.

Dengan bantuan pendekatan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Hanoi, tim peneliti berhasil mendatangi kantor lembaga Ban Tôn Giáo Chính Phủ tersebut dalam dua kunjungan. Kunjungan pertama dilakukan bersama rombongan Muhibah Dai Serumpun kelima negara ASEAN yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI). Kunjungan kedua dilakukan oleh dua orang peneliti (penulis dan Rana Amiruddin) yang datang kembali untuk

memperoleh informasi mendalam terkait dengan salah satu lembaga di negara Vietnam yang baru dibentuk tersebut. Pada kunjungan kali ini, kami memperoleh keberuntungan karena Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Vietnam, H.E. Ibnu Hadi, berkenan mendampingi secara langsung setelah beberapa tamu negara penting dari Indonesia pulang. Oleh karena itu, kedatangan kedua kali ini menjadi lebih bermakna kenegaraan.



Gambar 2.1  
Penulis dan  
Rana Amiruddin  
didampingi  
H.E. Ibnu Hadi  
berkunjung ke  
Ban Tôn Giáo  
Chính Phủ.

Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)

Ban Tôn Giáo Chính Phủ menyatakan bahwa kini pihak pemerintah Vietnam tengah menyempurnakan draf peraturan perundang-undangan Vietnam terkait dengan produk dan industri halal di dalam negeri, khususnya untuk tujuan ekspor. Sayangnya, ketika kami mendesak untuk meminta kopian dari draf peraturan perundang-undangan tersebut, dengan menghaturkan permohonan maaf, mereka menyatakan belum saatnya membagikannya kepada publik. Alasannya karena semuanya masih dalam tahap penyelesaian yang bersifat *private and confidential*. Kami pun memakluminya dan tidak ingin memaksa. Hal ini mengingatkan untuk dapat diterima dengan baik, kedatangan kami guna melakukan interviu mendalam di lembaga tersebut sudah merupakan kesempatan langka dan sangat “mewah”. Kami menyadari jika Vietnam bukanlah negeri yang terbuka seperti Indonesia.



Gambar 2.2  
Penulis bersama  
perwakilan  
dari Ban Tôn Giáo  
Chính Phủ.

Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)

Sekalipun Ban Tôn Giáo Chính Phủ pada tahun 2019 ini masih memproses peraturan perundang-undangan terkait dengan produk dan industri halal, sejak tanggal 26 Juli 2011, pemerintah Vietnam secara resmi telah mengeluarkan satu izin untuk satu perusahaan yang diakui untuk mengeluarkan sertifikasi halal, yaitu Halal Certification Agency (HCA) yang berkedudukan di Kota Hanoi. Legitimasi diberikan melalui Surat Keputusan Nomor 631/TGCP-TGK di Kota Hanoi dengan penerbitan *Appointment of Halal Certification Body* kepada Halal Certification Agency yang disingkat HCA.

Sebagaimana telah diprediksikan bahwa target utama hasil industri halal di Vietnam adalah membidik pasar ekspor ke negara-negara berpenduduk muslim dunia, khususnya Timur Tengah dan Asia (termasuk Indonesia). Tujuannya adalah agar peningkatan pertumbuhan ekonomi yang sudah tinggi sekarang ini menjadi lebih tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Vietnam kini fokus pada strategi membuka komunikasi dengan banyak pihak yang dianggap paham mengenai industri halal (baik di dalam maupun luar negeri). Pihak pemerintah Vietnam juga meminta masukan kepada para penduduk muslimnya sambil terus mem-*benchmark* keberhasilan ekspor industri halal “saudara tua” atau tetangganya, yaitu Thailand.

Salah satu langkah strategis yang dilakukan pemerintah Vietnam adalah dengan mengirim perwakilan halal Vietnam pilihan mereka secara resmi. Halal Certification Agency (HCA) datang ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) di Bogor untuk secara langsung belajar ilmu halal dan standar sertifikasi Indonesia. HCA yang memperoleh keistimewaan tersebut dikirim untuk belajar tentang bagaimana penyertifikasian halal yang benar ke LPPOM MUI di Bogor, Jawa Barat, sehingga dapat menyesuaikan prasyarat dan syarat agar barang-barang hasil industri Vietnam dapat lolos masuk ke pasar Indonesia.



*Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)*

Gambar 2.3 Interview mendalam dengan Orang Pertama HCA (Halal Certification Agency) Hajj. Mohammad Omar Tran Xuan Giap

Langkah strategis pemerintah Vietnam tersebut sudah seoyongnya dilakukan. Hal ini mengingat sudah beberapa kali terjadi penolakan terkait masuknya produk industri Vietnam ke Indonesia karena produk-produk tersebut ditetapkan sebagai “tidak lolos uji halal”. Tak mengherankan pula jika pengiriman perwakilan halal Vietnam ke LPPOM MUI untuk belajar tak lepas dari pertimbangan strategis bisnis ekspor Vietnam terhadap pasar di Indonesia. Selain belajar di LPPOM MUI di Bogor, Indonesia, pemerintah Vietnam juga mengirimkan perwakilannya untuk belajar ke negeri-negeri muslim lainnya sesuai dengan target tujuan ekspor mereka.



Sebagaimana diungkapkan dalam laporan Global Innovation Index 2018 pada awal November 2018 lalu, dalam waktu setahun, Vietnam mampu melompat sejauh 12 tingkat. Pada tahun 2017, Vietnam berada di posisi 57, sedangkan pada tahun 2018 sudah bertengger di posisi 45 (hanya satu tingkat di bawah Thailand yang berada di posisi 44).



Gambar 2.4  
Pemerintah Vietnam mengirim Hajj. Mohammad Omar Tran Xuan Giap (HCA) perwakilan halal Vietnam ke LPPOM MUI di Bogor.

Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)

Pengiriman perwakilan pemerintah Vietnam untuk mengikuti International Training di LPPOM MUI diselenggarakan pada tanggal 22–30 Oktober 2013 di Mirah Hotel Bogor. Dua orang perwakilan tersebut adalah Hajj. Mohammad Omar Tran Xuan Giap dan Hajj. Abdulkadir Osman Bao Van Trung.

Sebenarnya, tidak ada yang salah dengan keinginan sebuah negara untuk memintarkan warganegaranya (khususnya yang mengabdikan pada kepentingan negara). Namun, sebagai salah satu negara yang menjadi tempat tujuan belajar, sudah seyogianya bagi Indonesia untuk tidak lengah dalam mem-*benchmark* kembali kualitas sumber daya manusia dari negeri yang mengirim perwakilannya untuk mempelajari kondisi pasar dan peluang yang ada di tanah air. Hal ini karena investasi ilmu oleh pemerintah Vietnam kepada warganegaranya diduga adalah *future value* bagi mereka untuk lebih *gain profit* pada masa mendatang melalui upaya ekspor.



Gambar 2.5  
Hajj. Mohammad  
Tran Xuan Giap  
bersama rombo-  
ngan Muhibah Dai  
Serumpun MUI  
dan Dewan Masjid  
Indonesia.

Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)

## 2.2 Ragam Agama di Vietnam

Secara resmi, Republik Sosialis Vietnam adalah sebuah negara ateis seperti yang dideklarasikan oleh pemerintah komunis Vietnam dengan sebutan *Đảng Cộng sản Việt Nam*, disingkat ĐCSVN serta sepenuhnya menguasai pemerintahan dan mengendalikan negara, militer, dan media secara terpusat. Namun, menurut Departemen Negara Amerika Serikat Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Buruh (2002) dengan judul “Vietnam” dalam *International Religious Freedom Report 2004*, menyatakan bahwa meskipun pemerintah negara ini menganut paham Komunis dan mengendalikan masyarakatnya dengan ketat di seluruh Vietnam, pemerintah membebaskan masyarakatnya untuk memilih agama atas kesadarannya sendiri. Mereka juga dibebaskan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing asalkan seluruh kegiatan keagamaan dilaporkan kepada negara.

Pew Research Center (2010) menyatakan bahwa sebesar 73,2 persen masyarakat asli Vietnam didominasi oleh yang tidak beragama (ateis) atau berkepercayaan asli. Sisanya terbagi 12,2 persen untuk Buddhisme, 6,8 persen untuk Katolik, 4,8 persen untuk Caodaisme, 1,5 persen untuk Protestanisme, 1,4 persen untuk Hoahaoisme, dan 0,1 persen untuk lain-lain (termasuk Islam di dalamnya). Terdapat agama *triple* atau tiga pengajaran atau *tam giáo* yang merupakan agama dalam masyarakat Vietnam yang memiliki pengaruh kuat pada kepercayaan



dan praktik Vietnam. Agama ini merujuk pada percampuran sinkretis dari Buddha Mahayana, Konghucu dan Taoisme, serta kepercayaan asli Vietnam. Salah satu praktik spiritual umum dan paling terkenal adalah penghormatan leluhur, sebuah praktik yang berkembang pada budaya Tionghoa dan kebanyakan budaya Asia lainnya.

Sebelumnya, pada 2002 lalu, Pew Research Center melaporkan bahwa 24 persen dari penduduk Vietnam memandang agama “sangat berpengaruh”. Oleh karena itu, menelusuri latar belakang agama apa saja yang datang dan yang telah memberikan pengaruh di Vietnam sejauh ini sangat menarik untuk dilakukan. Agama-agama yang dimaksud adalah sebagai berikut.

### **Buddha**

- Buddhisme datang ke Vietnam pada awal abad II Masehi di bagian utara dari Tiongkok dan melalui rute selatan dari India. Buddha Mahayana pertama kali menyebar dari Tiongkok ke wilayah Delta Sungai Merah di Vietnam pada sekitar tahun 300 Masehi. Buddha Theravada datang dari India di selatan wilayah Delta Mekong beberapa tahun kemudian, antara 300–600 Masehi. Buddhisme yang dipraktikkan oleh orang Vietnam biasanya adalah aliran Mahayana, meskipun beberapa etnis minoritas (seperti Khmer Krom di wilayah Delta selatan Vietnam) masuk aliran Theravada.
- Praktik Buddha di Vietnam berbeda dari negara Asia lainnya dan tidak berisi struktur, hierarki, atau *sangha* institusional yang sama dengan tradisi Buddha lainnya. Agama tersebut berkembang dari hubungan simbiosis dengan Taoisme, spiritualitas Tionghoa, dan agama asli Vietnam, dengan kebanyakan praktisioner Buddha berfokus pada ritual devosional dibandingkan dengan meditasi.

### **Katolik**

- Sejauh perkembangan gereja Kristen terbesar di Vietnam tersebut, Katolik Roma pertama kali masuk negara tersebut melalui para misionaris Katolik Portugis pada abad XVI dan pengaruhnya menguat pada masa pemerintahan kolonial

Prancis. Meskipun misi-misi terawal hanya berhasil melakukan perpindahan agama, misi-misi selanjutnya yang dilakukan oleh para misionaris Yesuit, kemudian mendirikan pusat-pusat Kristen terhadap para penduduk lokal.

- Misionaris Yesuit Alexandre de Rhodes, yang berkarya di Vietnam antara 1624 dan 1644, menjadi misionaris terkenal pada masa tersebut. Selain itu, dia membuat jasa-jasa signifikan terhadap budaya Vietnam dengan mengembangkan abjad pada bahasa Vietnam bersama dengan para sarjana Vietnam dan berdasarkan pada karya para misionaris Portugis awal. Penggunaan abjad tersebut, yang berdasarkan pada aksara Latin dengan penambahan tanda-tanda diakritik, aslinya digunakan untuk membantu pengajaran dan upaya-upaya penginjilan. Abjad tersebut masih digunakan dan sekarang disebut sebagai *Quốc Ngữ* (bahasa nasional).
- Pendeta misionaris Prancis Pigneau de Behaine memainkan peran penting dalam sejarah Vietnam pada akhir abad XVIII dengan berteman dengan Nguyễn Ánh, anggota paling senior dari kepala-kepala pemerintahan Nguyễn untuk kabur dari pemberontakan Tây Sơn bersaudara pada tahun 1777. Menjadi orang kepercayaan dan penasihat militer Nguyễn Ánh pada saat dibutuhkan, dia meraih kesepakatan besar bagi Gereja. Pada saat Nguyễn Ánh menjadi Kaisar Gia Long, aktivitas misionaris Katolik diberi izin tanpa halangan sebagai tanda balas budi. Pada waktu kenaikan takhta Kaisar tersebut pada 1802, Vietnam memiliki tiga keuskupan Katolik dengan 320.000 anggota dan lebih dari 120 pendeta Vietnam.
- Menurut *Katalog Hierarki Katolik*, saat ini terdapat 5.658.000 penganut Katolik di Vietnam, mewakili 6,87 persen dari seluruh penduduknya. Terdapat 26 keuskupan (termasuk tiga keuskupan agung) dengan 2.228 paroki dan 2.668 pendeta.

### **Protestan**

- Protestan diperkenalkan di Da Nang pada 1911 oleh seorang misionaris Kanada yang bernama Robert A. Jaffray. Selama

bertahun-tahun, dia disusul oleh lebih dari 100 misionaris, para anggota dari Aliansi Kristen dan Misionaris, sebuah denominasi Protestan Evangelikal. Dua organisasi Protestan yang secara resmi disahkan oleh pemerintah adalah Gereja Evangelikal Selatan Vietnam (GESV), yang disahkan pada 2001, dan Gereja Evangelikal Utara Vietnam (GEUV) yang lebih kecil, yang disahkan sejak 1963.

- Saat ini, diperkirakan jumlah penganut Protestan menurut sumber pemerintahan adalah 500.000 orang, sedangkan menurut sumber gereja adalah 1 juta orang. Perkembangan terbanyak terjadi pada suku-suku minoritas (Montagnard), seperti Mnong, Ede, Jarai, dan Bahnar, dengan perkiraan yang mengklaim bahwa dua dari tiga penganut Protestan di Vietnam adalah anggota dari etnis minoritas. Menurut beberapa perkiraan, pertumbuhan penganut Protestan di Vietnam bertumbuh 600 persen dari sepuluh tahun sebelumnya. Beberapa orang yang baru berpindah agama masuk dalam gereja-gereja rumah Evangelikal yang tak terdaftar, yang jumlah pengikutnya dikatakan secara keseluruhan berjumlah sekitar 200.000 orang.
- Gerakan Baptis dan Mennonite secara resmi diakui oleh Hanoi pada Oktober 2007 yang dipandang sebagai pengaruh terbesar dalam tingkat kebebasan beragama yang dinikmati oleh penganut Protestan di Vietnam. Hal yang serupa juga terjadi pada Oktober 2009, gerakan Majelis Allah secara resmi memperoleh izin dari pemerintah untuk beroperasi, yang merupakan langkah awal untuk menjadi sebuah organisasi yang disahkan.
- Majelis-Majelis Allah dikatakan terdiri atas sekitar 40.000 pengikut pada 2009, Gereja Baptis sekitar 18.400 pengikut dengan 500 tempat pelayanan pada 2007, dan Gereja Mennonite sekitar 10.000 pengikut.

#### **Ortodoks Timur**

- Untuk Kristen Ortodoks, Gereja Ortodoks Rusia diwakili di Vĩng Tầu, Vietnam, yang utamanya berasal dari para karyawan pemakai bahasa Rusia dari perusahaan hasil kerja sama Rusia-Vietnam

“Vietsovpetro”. Paroki yang mengambil nama dari ikon Bunda dari Kazan dibuka pada 2002 dengan pemberkatan dari Sinode Kudus Gereja Ortodoks Rusia, yang diberikan di Troitse–Sergiyeva Lavra. Para perwakilan dari departemen hubungan luar negeri Gereja Ortodoks Rusia datang ke Vŭng Tàu dari waktu ke waktu untuk memberikan pelayanan ilahi Ortodoks.

- Vietnam juga disebut sebagai wilayah di bawah yurisdiksi Metropolitan Hong Kong dan Asia Tenggara Nikitas (Kepatriarkan Ekumenikal Konstantinopel), meskipun di sana tidak ada kabar tentang aktivitas terorganisasi.

### **Hindu**

- Hindu di Vietnam dikaitkan dengan etnis minoritas Cham (agama pertama dari Kerajaan Champa merupakan sebuah bentuk dari Hindu Saiwis yang dibawa melalui laut dari India). Suku Cham mendirikan kuil-kuil Hindu (Bimong) di wilayah Tengah Vietnam, beberapa di antaranya masih digunakan saat ini; Mỹ Sơn yang sekarang sudah tidak digunakan, sebuah Situs Warisan Dunia UNESCO, adalah kompleks candi Cham paling terkenal.
- Sekitar 50.000 etnis Cham di wilayah pesisir selatan–tengah mempraktikkan bentuk devosional dari Hindu. Kebanyakan Hindu Cham masuk dalam kasta Nagavamshi Kshatriya, namun sebagian kecil merupakan Brahmin. 4.000 penganut Hindu lainnya (kebanyakan Tamil dan yang lainnya berasal dari keturunan Cham atau campuran India-Vietnam) yang tinggal di Ho Chi Minh City, di mana Kuil Mariamman dijadikan sebagai titik penting pada komunitasnya. Di Provinsi Ninh Thuận menjadi tempat di mana kebanyakan Cham di Vietnam bermukim, Cham Balamon (Hindu Cham) berjumlah 32.000 orang; di antara 22 desa di Ninh Thuận, 15 desa di antaranya adalah desa Hindu.

### **Islam**

- Islam adalah sebuah agama minoritas di Vietnam. Sebagai agama minoritas, Islam banyak dianut oleh masyarakat Vietnam keturunan Champa.

- Sejarah mencatat bahwa sebelum memeluk Islam, masyarakat Kerajaan Champa (yang menguasai wilayah selatan dan tengah Vietnam) dahulunya adalah penganut agama Hindu. Namun kemudian, secara bertahap mereka berpindah menganut Islam. Penyebaran agama Islam terjadi melalui interaksi dengan jemaah dan pedagang yang datang dari India, Persia Arab. Selanjutnya, berkembang pesat dan menyebar di Kerajaan Champa hingga sekarang.
- Sebagai kelompok minoritas di Vietnam, etnis Champa memiliki jumlah hanya sekitar 160.000-an ribu orang dari total populasi sekitar 90 juta penduduk di Vietnam. Sebagian besar dari etnis Champa di Vietnam beragama Islam meskipun sebagian kecil Champa masih ada yang menganut kepercayaan leluhur hingga kini yang disebut Cham Bani.

### 2.3 Etnis Champa dan Islam di Vietnam

Menurut BBC Indonesia 2015, para ahli sejarah bersepakat bahwa Islam telah sampai ke tempat ini pada abad X dan XI Masehi. Kini, umat Islam tersebar di daerah yang beragam, seperti di Binh Thuan, Ninh Thuan, An Giang, Tay Ninh, Dong Nai, Ho Chi Minh City, dan kelompok kecil di Ibu kota Hanoi. Berdasarkan pengamatan lapangan, diperoleh bahwa sosok luar warga muslim Vietnam berikut kehidupannya tampak seperti masyarakat di Malaysia dan Indonesia pada umumnya, dibandingkan dengan tampak luar dan cara hidup masyarakat lain Vietnam di negerinya. Muslimah Vietnam hampir semuanya mengenakan tudung (jilbab) dan busana gamis ala muslimah negeri muslim lainnya. Sementara itu, para pria mengenakan sarung dan peci atau kopiah. Ketika azan berkumandang yang terdengar dari masjid atau surau, puluhan pria muslim Vietnam akan langsung menghentikan pekerjaan. Mereka bergegas menuju masjid terdekat. Provinsi An Giang yang berada di wilayah Vietnam Tengah adalah provinsi dengan populasi muslim Vietnam terbanyak. Bahkan, ada lima desa Provinsi An Giang yang dihuni oleh mayoritas etnis Cham. Satu dari lima desa tersebut, seluruh penghuninya adalah penganut agama Islam.

Dapat dikatakan bahwa “pribumi” muslimin Vietnam sebenarnya adalah etnis Champa setelah etnis ini masuk Islam. Karena sebelum masuk Islam, etnis Champa adalah penganut agama Hindu. Kerajaan Islam Champa pernah menguasai wilayah Vietnam dan sekitarnya berkaitan dengan sejarah para Wali Songo di tanah Jawa yang berjaya pada masa lampau. Namun, sungguh disayangkan, jejaknya hilang hampir tak berbekas.

Menurut Amiruddin, J. dan Hasram, K. (2018) dalam bukunya *Muslim dan Halal di Vietnam*, dikatakan bahwa pemerintah Vietnam sudah lama memberikan perlindungan khusus kepada kelompok minoritas muslim Champa di Vietnam ini. Hal ini karena masyarakat muslim Champa diyakini merupakan keturunan langsung dari Kerajaan Champa dari masa lalu sebelum mereka dikalahkan oleh etnis Dai Viet dari wilayah utara Vietnam. Jika ditarik lebih jauh dua ribu tahun ke belakang, pada awal-awal dimulainya tahun Masehi, sejarah Tiongkok mencatat nama lain etnis Champa dengan nama “Lin-yi” yang berarti asal kota Lin atau Lam Ap.



Gambar 2.6  
Kerajaan Islam  
Champa pernah  
menguasai wilayah  
Vietnam dan sekitarnya.

Sumber: <https://pxhere.com> (domain public)

Dikisahkan bahwa Lin-yi merupakan sebuah entitas politik yang terdiri atas beberapa suku gabungan di Delta Sungai Mekong yang kemudian menjelma menjadi sebuah kerajaan bernama Kerajaan Funan pada tahun 192 Masehi (abad II). Kerajaan Funan merupakan

salah satu dari kerajaan tua di wilayah Delta Sungai Mekong. Namun, hubungan antara Lin-yi dan Champa hingga kini masih belum diketahui secara jelas, ada *missing link* di sana. Sementara itu, sesuai dengan catatan dalam aksara Sanskerta yang ditemukan pada sebuah batu di wilayah Vietnam tengah, nama Champa sendiri baru muncul pada tahun 658 Masehi (abad ketujuh). Kerajaan Champa atau dalam bahasa Vietnam Chiêm Thành adalah kerajaan yang pernah menguasai daerah yang sekarang termasuk di wilayah Vietnam tengah dan selatan, dimulai dari 658 Masehi (abad VII) hingga tahun 1832. Masyarakat etnis suku Champa menggunakan kekerabatan sistem matrilineal atau dari garis ibu. Dengan kata lain, anak perempuanlah yang berhak memperoleh warisan keluarganya. Lebih lanjut, cara mereka berbusana pun persis masyarakat Funan, semisal berpakaian dengan baju sepinggang, berjalan tanpa alas kaki, menganut kepercayaan Hindu, serta upacara kematian dengan cara dikremasi lalu abunya disimpan di dalam bejana atau ditaburkan ke laut.



Sumber: <https://en.wikipedia.org>

Gambar 2.7

Distribusi wilayah Champa.

Menurut SarDesai (2013) dikatakan bahwa bahasa Champa termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Prasasti tertua dalam bahasa Cham adalah Prasasti Dong Yen Chau yang diperkirakan dibuat pada abad IV Masehi. Prasasti ini sekaligus menjadi contoh bukti tertulis tertua bagi rumpun bahasa Austronesia. Rumpun bahasa Austronesia atau kadang disebut juga sebagai “bahasa kepulauan” adalah sebuah rumpun bahasa yang sangat luas penyebarannya di dunia ini. Wilayahnya dari Taiwan hingga Hawaii dan dari ujung

utara sampai Selandia Baru atau Aotearoa di ujung selatan, serta dan dari Madagaskar di ujung barat sampai Pulau Paskah atau Rapanui di ujung timur. Kebanyakan bahasa Austronesia ini tidak mempunyai sejarah panjang dalam bentuk tertulis sehingga upaya untuk merekonstruksi bentuk-bentuk yang lebih awal, yaitu sampai pada Proto-Austronesia, menjadi lebih sulit.

Lebih jauh SarDesai (2013) menjelaskan bahwa Kerajaan Champa merupakan kerajaan kuno yang pernah eksis di Asia Tenggara, yang dimulai dengan upaya memisahkan diri dari dominasi Kerajaan Tiongkok yang dipimpin oleh Dinasti Han. Pada abad X dan XI, Kerajaan Champa berhasil memperluas wilayah kerajaannya hingga ke selatan. Menguasai wilayah pesisir Vietnam hingga wilayah Phan Rang, yakni satu kota dari Provinsi Binh Thuan, yang sekarang masuk dalam wilayah *south central coast* yang terbagi ke dalam enam wilayah besar kerajaan, yaitu Sinhapura, Indrapura, Vijaya, Khautara, Pandurangga.

Etnis Cham yang kini ada merupakan keturunan langsung Kerajaan Champa. Saat ini, sebagian besar dari mereka tinggal di Delta Sungai Mekong, diberi nama sebagai *the Cham Village*. Wisatawan yang tertarik ke tempat ini, dari Ho Chi Minh City dapat menggunakan perahu selama enam jam dari muara Sungai Mekong sampai ke Chau Doc untuk melihat Cham Village atau perkampungan Champa. Namun demikian, para wisatawan tak akan memperoleh informasi di lokasi bekas Kerajaan Champa di Cham Village. Begitu pula dengan situs reruntuhan dan bangunan atau peninggalan penunjang informasi lainnya, tak ada jejak sama sekali. Padahal, menurut Ahti R. Westphal, R.A. (2012) warga Kerajaan Cham merupakan pelaut yang tangguh dan pandai berdagang. Sekitar abad V hingga awal abad XIX, mereka sempat menguasai wilayah Vietnam tengah dan selatan hingga mencapai Laos. Mereka berdagang dengan bangsa Tionghoa hingga bangsa Arab. Bahkan, Andaya, L.Y. (2008) dalam bukunya *“Leaves of the Same Tree: Trade and Ethnicity in the Straits of Melaka”*, menuliskan bahwa Kerajaan Champa merupakan saingan berat dari Kerajaan Khmer di Kamboja dan Dai Viet, sebuah kerajaan yang ada di sebelah utara Vietnam.

Pada masa-sama awal di antara abad VII hingga abad X, tidak ada rekaman catatan yang menunjukkan aktivitas masyarakat muslim





Sumber: <https://en.wikipedia.org>  
Gambar 2.8 : Teritorial Kerajaan Champa.

Champa di wilayah kekuasaan Kerajaan Champa. Dengan demikian, para ahli sejarah menduga bahwa jalur perdagangan yang terjadi di dalam interaksi Kerajaan Champa dengan para pedagang merupakan pintu masuk awal penyebaran agama Islam di kerajaan itu, sebagaimana sejarah masuknya Islam di Nusantara dahulu yang dijelaskan oleh Azra, A. (2013) dalam bukunya yang berjudul *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad ke-17 dan ke-18*.

Nakamura, R. (2000) dalam bukunya *“The Coming of Islam to Champa”* menerangkan kedatangan Islam ke Champa dibagi dalam dua gelombang besar, yaitu pada awal abad IX hingga abad XI dan abad XVI dan XVII. Pertama adalah mereka para muslim yang datang dari Persia, Arab, India, dan Tiongkok yang berinteraksi dengan masyarakat etnis Champa tertentu dari Kerajaan Champa yang memang memiliki akses berhubungan dagang dengan orang-orang asing dari luar kerajaan. Kedua, ketika perdagangan melalui laut dan samudra sedang dalam masa puncak kejayaan. Terjadi lonjakan signifikan masyarakat etnis Champa di Kerajaan Champa yang masuk Islam. Pada periode ini, etnis Melayu yang bertetangga dengan wilayah Kerajaan Champa turut memberi kontribusi Islamisasi penduduk Kerajaan Champa.

Sekitar abad XII, peperangan antara Kerajaan Champa dan Kerajaan Khmer dimulai. Kerajaan Champa berubah menjadi kerajaan Islam sejak Raja Che Bo Nga diislamkan oleh Sayyid Hussein Jumadil Kubro. Namanya, kemudian diubah menjadi Sultan Zainal Abidin, yang berkuasa sejak tahun 1360, namun tewas dalam perang dengan bangsa Dai Viet pada 1390.

Melalui hubungan perkawinan, Kerajaan Champa bersaudara dengan Kerajaan Chermin di Kelantan, Malaysia. Ini menyebabkan keturunan Champa dan Chermin berhak atas takhta satu sama lain. Bahkan ketika Jiddah, ibu kota Chermin habis digempur Kerajaan Siam pada tahun 1467, semua keluarga Kerajaan Chermin pindah ke Champa. Dalam rombongan itu, ada Sayyid Ali Nurul Alam, anak Jumadil Kubro yang menjabat semacam *level* Patih di bawah koordinasi dengan Mahapatih Gajah Mada, karena Kerajaan Chermin adalah salah satu negara bagian Kerajaan Majapahit pada waktu itu.

Anaknya yang bernama Sultan Maulana Sharif Abdullah Mahmud Umdatuddin alias Wan Bo Tri Tri, kemudian meneruskan jabatan Raja Champa tahun 1471 hingga tahun 1478. Dia melahirkan anak yang bernama Syarif Hidayatullah yang kelak juga sangat dikenal sebagai Sunan Gunung Jati. Sebelum itu, anak Jumadil Kubro yang lain, yaitu Ibrahim Zainuddin Al Akbar As Samarqandiy alias Ibrahim Asmoro menikah dengan putri Raja Champa yang bernama Candra Wulan, lalu dari sana lahirlah Sunan Ampel di Champa. Dengan demikian, secara silsilah, Sunan Ampel adalah pamannya Sunan Gunung Jati.

Kondisi peperangan dengan Kerajaan Khmer dan Kerajaan Dai Viet terus memburuk. Mereka membakar kampung-kampung yang dihuni warga Cham, sawah, dan berbagai bangunan. Banyak warga Champa yang mengungsi ke Kelantan dan Aceh. Oleh karena itu, banyak bukti ditemukan jika sampai sekarang bahasa Champa dan bahasa Aceh banyak memiliki kesamaan atau masih serumpun. Sementara itu, di Malaysia, warganegaranya yang memakai nama depan Wan, Che, Nik dipastikan adalah keturunan Champa.

Raja terakhir Kerajaan Champa adalah seorang muslim bernama Po Chien, pengikutnya menyebarkan agama Islam hingga ke Nusantara (kini Indonesia). Ikatan emosional di antara Kerajaan Champa dan Kerajaan Majapahit di Indonesia sangat erat hingga kini. Di Indonesia, makam putri dari Kerajaan Champa tersebut berlokasi di Dusun Unggahan, desa atau kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Pernikahan Putri Champa yang memiliki nama asli Dewi Kasyifah (juga dikenal dengan nama lain Darawati) adalah putri dari Ibrahim Asmarakandi. Di Kerajaan Champa tersebut, Kasyifah diambil anak angkat oleh seorang Tionghoa dan diganti namanya menjadi Indrawati, lalu Kasyifah lalu Asiyah. Oleh orang tua angkatnya, Indrawati dihadiahkan kepada Raja Majapahit V yang bernama Prabu Brawijaya. Namun dengan suatu permintaan, yakni agar bangsa Tionghoa diperbolehkan untuk tetap tinggal di tanah Jawa dan dijaga keselamatannya. Karena sangat terkesan dengan kecantikan Dewi Indrawati, Prabu Brawijaya tertarik dengan tawaran keluarga Tionghoa. Permintaan mereka pun dipenuhi sekaligus menerima hadiah yang diberikan dengan senang hati.

Dari hasil pernikahan Putri Champa Dewi Indrawati dan Raja Majapahit V, lahirlah Raden Sultan Patah yang kemudian bergelar Sultan Kerajaan Islam Demak Bintoro. Setelah Raden Patah ditetapkan oleh para wali di Jawa dalam musyawarahnya di Ngampel sebagai Sultan Kerajaan Demak yang berkuasa sekitar tahun 1500–1518 M, sang ibu Dewi Indrawati berkeinginan untuk menengok putranya yang dikabarkan telah menjadi Raja Kerajaan Islam Demak Bintoro. Kedatangan Dewi Indrawati di Demak berbarengan dengan berlangsungnya musyawarah para wali untuk membahas perkembangan agama Islam di tanah Jawa. Atas permintaan Sunan Bonang dan persetujuan Raden Patah, Dewi Indrawati beserta putranya Raden Patah diajak ke Bonang Lasem untuk mengajar dan memimpin para muslimat di Bonang. Dewi Indrawati sang ibu menjadi *muballighah* hingga akhir hayatnya. Beliau wafat dan dimakamkan di dekat Pasujudan Kanjeng Sunan Bonang di Desa Bonang Lasem, kini dikenal bernama Dusun Unggahan, desa atau Kecamatan Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur.

Ketika Kerajaan Champa ditaklukkan oleh Vietnam pada abad XV dan Raja Po Chien yang muslim kalah, dia beserta pengikutnya, kemudian bermigrasi ke wilayah Vietnam bagian selatan, sedangkan sebagian besar rakyatnya pindah ke Kamboja. Kini, bangunan menara kuno peninggalan Kerajaan Champa di wilayah pusat pemerintahannya di Nha Trang telah ditetapkan UNESCO sebagai warisan budaya yang dilindungi. Sayangnya, akibat penjajahan Prancis, Jepang, pembagian negara Kamboja, dan Vietnam, serta Perang Vietnam, membuat warisan budaya Champa hancur tak bersisa, tinggal desa-desa muslim Cham saja yang bertahan di Delta Sungai Mekong hingga saat ini.

### **2.3.1 Masjid dan Surau di Vietnam**

Kondisi di Vietnam sebagai sebuah negara dengan sistem politik sosialis komunis, membuat setiap masjid dan surau terdaftar resmi sekaligus dengan nama imam masjid dan suraunya. Masyarakat di negeri-negeri berhaluan komunis memang tidak sebebaskan seperti para penduduk di negeri nonkomunis.

Terdaftar dalam kegiatan keberagamaan membuat mereka terkadang merasa lebih baik karena dalam beberapa kondisi, mereka

justru memperoleh keuntungan informasi dan dukungan finansial. Sebagai contoh, saat bulan suci Ramadan, khususnya saat beriktikaf di masjid dalam waktu sepuluh hari terakhir. Jemaah masjid harus jauh-jauh hari mendaftarkan namanya kepada imam masjid untuk seterusnya dikirimkan kepada aparat pemerintah berwenang. Jikalau ada ceramah di dalam masjid, negara wajib mengetahui jauh hari sebelumnya secara tertulis isi dari ceramah yang akan disampaikan. Sebagian besar masjid dan surau di Vietnam yang memperoleh donasi dari luar negeri, khususnya negeri muslim lainnya wajib didaftarkan, dilaporkan jumlah besarnya, serta dipakai untuk pembangunan apa saja. Sebagaimana situasi dan kondisi di banyak negeri Komunis lainnya di seluruh dunia, segala sesuatu yang serba terlapor seperti itu sudah dianggap hal yang biasa dan telah berlangsung sejak lama, baik di Vietnam Utara lalu setelah selatan berunifikasi di bawah kekuatan Komunisme pimpinan Ho Chi Minh, diberlakukan hal serupa.

Kini, di seluruh Vietnam terdapat 40 buah masjid (dalam 19 provinsi/distrik) serta 22 buah surau (dalam 19 provinsi/distrik). Sungguh menarik untuk diamati, mengapa di Vietnam terdapat lebih banyak masjid daripada suraunya. Pertama, ukuran masjid lebih besar dibandingkan dengan surau sehingga dapat menampung lebih banyak orang. Selain itu, masjid adalah pusat tempat berkumpul dan beraktivitas muamalah jemaahnya yang dirasa sudah cukup memadai (bagi minoritas muslimin Vietnam yang jumlahnya tidak signifikan tersebut) untuk menampung keberadaan aspirasi mereka. Kedua, muslimin Vietnam hidup dengan berkelompok atau tidak terserak sehingga ketika kelompok keluarga muslimin ini berkumpul semua seperti pada hari-hari besar Islam, hanya masjid yang dapat menampung mereka.

Menurut [www.angelfire.com/vt/vietnamesemuslims/masjidList.htm](http://www.angelfire.com/vt/vietnamesemuslims/masjidList.htm), dijelaskan secara perinci 40 masjid dan 22 surau berdasarkan lokasi distrik, tipe rumah ibadah Islam (berupa masjid dan surau) beserta nama dan alamat lengkapnya sebagai berikut.

## • 40 Masjid (dalam 19 provinsi/Distrik)

### (1) Provinsi/Distrik: Angiang/Tan Chau

(1) Masjid Mahmudiah

Ap Phum Xoai, Chau Phong commune

Dibangun pada tahun 1963, direnovasi pada tahun 1993, 150 keluarga Cham beribadah di sini.

(2) Masjid Nekma

Ap Phum Xoai, Chau Phong commune

Dibangun pada tahun 1930 dan melayani sekitar 1.000 muslimin. Sekolahnya memiliki 7 kelas untuk pelajar muslim dan 1 kelas untuk pelajar muslimah.

### (2) Provinsi/Distrik: Angiang/Chau Phu

(3) Masjid Al-Aman (Katambong)

Ap Khanh An 1, Khanh Hoa commune

Dibangun pada tahun 1965, sekitar 210 keluarga Cham beribadah di sini, dengan sekolah Islam yang terdiri atas 150 murid. Karena sedikit ladang, orang-orang di sini, terutama mencari nafkah dengan peternakan kambing, beberapa melakukan usaha bisnis.

### (3) Provinsi/Distrik: Angiang/An Phu

(4) Masjid Al Ehsan

Da Phuoc commune

Dibangun pada tahun 1937, direnovasi pada tahun 1992, sekitar 200 keluarga Cham beribadah di sini. Orang-orang hidup dari tekstil, perikanan, bisnis, menanam padi, dan peternakan, dengan sekolah Islam yang terdiri atas 120 murid.

(5) Masjid Jamius Sunna

Da Phuoc commune

Dibangun pada tahun 1982, direnovasi pada tahun 2000, 82 keluarga Cham beribadah di masjid ini.

(6) Masjid Ar-Rohmah

Ap La Ma, Vinh Truong commune.

Dibangun pada tahun 1414, direnovasi pada tahun 1994, masjid ini terletak di sebuah pulau kecil di Sungai Hau Giang. Umat muslim di sini membutuhkan dana untuk membantu murid miskin yang memiliki hasil belajar atau *output* yang langsung berdampak manfaat.

(7) Masjid Al-Muslimin

Quoc Thai commune

(8) Masjid Khoiri Yahx  
Ap III. Koh Koi village, Nhon Hoi commune  
Direnovasi pada tahun 1992, melayani 174 keluarga (kurang lebih sekitar 1.836 orang muslimin setempat).

(9) Masjid Mukor Romah (Khanh Binh)  
Ap III Champ Khanh Binh commune  
Masjid tua ini sudah berusia sekitar 100 tahun, berbatasan dengan negeri tetangga Kamboja, direnovasi selama tiga kali pada tahun 1991. Masjid ini melayani 400-an orang jemaahnya sambil melakukan amal usaha pada masa-masa sulit dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.

#### (4) Provinsi/Distrik: An Giang/Phu Tan

(10) Masjid al-Mubarak  
Ap Chau Giang, komune Phu Hiep  
Dibangun pada tahun 1750 dan merupakan salah satu masjid tertua di Vietnam. Pengklasifikasian ini sebagai kepentingan historis oleh pemerintah. Masjid ini melayani 200 keluarga Cham dari sekitar 1.000 muslimin.

(11) Masjid Jamiul Azhar  
Ap Chau Giang, Phu Hiep commune  
Dibangun pada tahun 1425. Lebih dari 200 keluarga beribadah di sini.

#### (5) Provinsi/Distrik: An Giang/Chau Tanh

(12) Masjid Jamia Al Muslimin  
Vinh Hanh Village

#### (6) Provinsi/Distrik: Hanoi/Hoan Kiem

(13) Masjid An-Noor  
12 Hang Luoc (near Long Bien bridge and Dong Xuan market)  
Dibangun pada tahun 1890 oleh pedagang India dan direnovasi pada tahun 1950. Masjid ini melayani 20 muslimin Vietnam, termasuk mereka para karyawan muslim dari berbagai kedutaan asing terdekat.

(14) Masjid Ar Rahim  
45 Nam Ky Khoi Nghia  
Dibangun pada tahun 1885 oleh muslim Malaysia–Indonesia. Lebih dari 200 orang beribadah di masjid ini.

(15) Masjid Musulman  
66 Dong Du (di samping hotel bintang lima Sheraton)  
Ini adalah masjid paling ramai di Kota Ho Chi Minh. Dibangun pada tahun 1935 oleh perkumpulan India muslim yang tinggal di Vietnam.



- (16) Masjid Jamiul Islamiah (Nancy mosque)  
459B Tran Hung Dao (dekat kantor polisi)

Pertama kali dibangun pada tahun 1950, lalu dibangun kembali pada tahun 2004 dengan arsitektur Arab yang dirancang oleh arsitek Vietnam.

**(5) Provinsi/Distrik: HCMC/ Distrik 3**

- (17) Masjid Niamatul Islamiyah  
Distrik 3. 360 Cach Mang Thang Tam

Dibangun pada tahun 1952. Lebih dari 40 keluarga Kinh dengan asal Tiongkok (kelompok etnis Hoa) berdoa di sini, termasuk 250 Muslim.

**(6) Provinsi/Distrik: HCMC/Distrik 5**

- (18) Masjid Al-Jamia (Cho Lon Jamial Mosque)  
Distrik 5. 641 Nguyen Trai

Dibangun pada tahun 1932, 80 orang Cham beribadah di sini.

**(7) Provinsi/Distrik: HCMC/Distrik 6**

- (19) Masjid Alsa Adah  
Distrik 6. 45/67 Binh Tien, phuong 15

Dibangun pada tahun 1969, 49 orang keluarga Cham beribadah di sini. Mereka adalah pengusaha dan pekerja.

**(8) Provinsi/Distrik: HCMC/Distrik 8**

- (20) Masjid Jamia al-Anwar  
Distrik 8. 157B/09 Duong Ba Trac

Masjid ini dibangun pada tahun 1965. Awalnya, masjid ini hanya sebagai surau, kemudian dibangun kembali pada tahun 1968 sebagai masjid. Tempat ibadah ini melayani 240 keluarga Cham. Mereka melakukan bisnis kecil. Masjid ini kini sering tidak cukup menampung jemaah. Pada saat-saat tertentu, jemaah banyak yang terpaksa beribadah di jalan raya di depan masjid, khususnya saat melakukan ibadah salat Jumat.

**(9) Provinsi/Distrik: HCMC/Distrik 9**

- (21) Masjid Jamia Al- Muwahidin  
Distrik 9

**(10) Provinsi/Distrik: HCMC/Distrik 10**

- (22) Masjid Haiyat Al-Islam  
317/75 Cach Mang Thang Tam



Dibangun pada tahun 1962 dan dibangun kembali pada tahun 2002, 28 orang keluarga Cham berdoa di sini. Sebelum 1962, mereka berdoa di masjid terdekat Ni'matul Islam.

52 Nguyen Van Troi

Lantai pertama adalah Kantor Perwakilan Komunitas Islam HCMC. Lantai 2 adalah tempat untuk saudara-saudara muslim. Sebuah sekolah Islam berada di belakang masjid dan juga tempat ibadah bagi umat Islam. Masjid ini mulai dibangun pada tahun 1969 dan selesai pada tahun 1971, melayani 102 keluarga Cham.

**(12) Provinsi/Distrik: Tien Giang**

(24) Masjid Jamia Musulmane

59 Trinh Hoai Duc, My Tho city; 70 km Southwest of HCMC

Dibangun pada tahun 1930 dan direnovasi pada tahun 1957 oleh muslim India. Setelah India pergi, kepengurusan masjid diserahkan kepada muslim Cham. Sekarang hanya ada tiga keluarga Cham yang tinggal di sebelah masjid dan beberapa pengusaha keliling dari Chau Doc dan Ninh Thuan.

**(13) Provinsi/Distrik: Tra Vinh**

(25) Masjid Al Muslimin

133 Tran Quoc Tuan, Tra Vinh city; 137 km Southwest of HCMC

Masjid ini sedang akan dibangun kembali.

**(14) Provinsi/Distrik: Long An**

(26) Masjid al-Muslimin

Tau Buu village, Ben Luc district; 20 km South of HCMC

**(15) Provinsi/Distrik: Tay Ninh**

(27) Masjid Al Muslimin

Tay Ninh; 100 km di sebelah utara dari Kota HCMC

Dibangun pada tahun 1957.

(28) Masjid Al Muslimin

Tan Hung village (dahulunya di Bau Bac)

(29) Masjid Noor Al Iman

Tan Hung village (dahulunya di New Bau Bac)

(30) Masjid Baitul Huda

Tan Phu village, Tan Chau district (sebelumnya di Bao Cho E)

- (31) Masjid Niamah  
Suoi Day village, Tan Chau district

**(16) Provinsi/Distrik: Binh Phuoc**

- (33) Masjid Hayat Al Islam  
Phu Rieng village; 140 km Northeast of HCMC  
Masjid ini dibangun pada tahun 1990.

**(17) Provinsi/Distrik: Binh Duong**

- (34) Masjid Al Muttaqin  
Minh Hoa village; Dau Tieng district (Long Ho); 120 km arah timur laut dari kota of HCMC  
Masjid ini dibangun pada tahun 1992.

**(18) Provinsi/Distrik: Dong Nai**

- (35) Masjid Al Islam  
Binh Son village; Long Thanh district; 60 km Northeast of HCMC  
Dibangun pada tahun 1975. (Arah: di Jalan Raya 51 (Vung Tau–HCMC), km 69 setelah motel Thanh Tam, jalan 100 m lebih dan belok kanan (dekat papan nama 30 km/jam), terus di jalan 770 sekitar 12 km melalui area karet dan buah. Di sebelah kanan sebuah pabrik karet dan 100 m ke bawah, menyeberangi jembatan kecil, belok kanan setelah jembatan ke jalan tanah liat. Jalan lurus 2 km, melewati kuburan. Ujung jalan ditemukan desa muslim, masjid terletak di sebelah kanan).
- (36) Masjid Noor Al Ehsan  
Xuan Hung village, Long Khanh district; 120 km dari Ho Chi Minh City.

**(19) Provinsi/Distrik: Ninh Thuan**

- (37) Masjid Al Muslimin 101  
Phuoc Nam village, Ninh Phuoc District (Van Lam).  
Dibangun pada tahun 1962.
- (38) Masjid Al Mubarak 102  
Xuan Hai village, Ninh Hai district (Phuoc Nhon)
- (39) Masjid An Noor 103  
Xuan Hai village, Ninh Hai district (An Nhon)
- (40) Masjid Niamah 104  
Phuoc Nam village, Ninh Phuoc district (Nho Lam)

• 22 Surau (dalam 12 provinsi/Distrik)

**(1) Provinsi/Distrik: Angiang/Tan Chau**

- (1) Surau No. 1  
Ap Phum Xoai, Chau Phong commune
- (2) Surau Maskinar Rahmah  
Ap Phum Xoai, Chau Phong commune
- (3) Surau Dares Salam  
Ap Phum Xoai, Chau Phong commune
- (4) Surau Shariful Islamiah  
Ap Phum Xoai, Chau Phong commune
- (5) Surau Noor Al Islam  
Ap Phum Xoai, Chau Phong commune
- (6) Surau Hayat Al Islam  
Ap Phum Xoai, Chau Phong commune
- (7) Surau Zumadul Islam  
Ap Phum Xoai, Chau Phong commune
- (8) Surau Al Wusta  
Ap Phum Xoai, Chau Phong commune

**(2) Provinsi/Distrik: Angiang/Chau Phu**

- (9) Surau No. 1  
Khanh Hoa commune
- (10) Surau No. 5  
Khanh Hoa commune

**(3) Provinsi/Distrik: Angiang/An Phu**

- (11) Surau Noor Din  
Koh Koi village, Nhon Hoï commune

**(4) Provinsi/Distrik: An Giang/Phu Tan**

- (12) Surau Al-Azhar  
Ap Chau Giang, Phu Hiep commune

**(5) Provinsi/Distrik: An Giang/Long Xuyen**

(14) Surau al Muslimin  
Long Xuyen city

**(6) Provinsi/Distrik: HCMC/Distrik 3**

(15) Surau Noor Al-Islam  
39 Tran Quang Dieu (It was built in 1970)

**(7) Provinsi/Distrik: HCMC/Distrik 4**

(16) Surau Khairiyah  
26/13 Ton That Thuyet. Built in 1972

**(8) Provinsi/Distrik: HCMC/Distrik 8**

(17) Surau Mubarak  
85/16 Pham The Hien. Built in 1963

**(9) Provinsi/Distrik: HCMC/Phu Nhuan Distrik**

(18) Surau Noor Al-Ehsan  
111/24 Huynh Van Banh

**(10) Provinsi/Distrik: Binh Thanh**

(19) Surau Noor Al-Islam  
4<sup>th</sup> floor, Phan Van Han Building

**(11) Provinsi/Distrik: Tay Ninh**

(20) Surau Niamah  
Bao xuong mau

**(12) Provinsi/Distrik: Dong Nai**

(21) Surau Noor Al-Yakin  
Xuan Hung village, Long Khanh district (Lot A)

(22) Surau Noor Al-Hidayah  
Xuan Hung village, Long Khanh district (Lot H)

Ada hal menarik jika kita membandingkan antara masjid dan surau di Indonesia dengan masjid dan surau di Vietnam. Jika di Indonesia terdapat lebih banyak jumlah surau yang berlokasi di kampung-kampung, bahkan hingga ke pelosok negeri dibandingkan dengan jumlah masjidnya, tidak demikian halnya di Vietnam. Di Vietnam, ditemukan lebih banyak jumlah masjid dibandingkan dengan jumlah suraunya.

Pemerintah Vietnam mendata dengan serius dan penuh tanggung jawab, termasuk nama para imam di masing-masing masjid dan surau. Mereka di data sejak ditunjuk menjadi imam hingga terjadi pergantian karena menuanya usia atau wafat. Uniknya, jadwal ceramah para imam beserta materi ceramah yang akan disampaikan kepada jemaah juga wajib dilaporkan kepada pemerintah setempat. Aturan ini berlaku untuk semua pimpinan agama dan rumah ibadah yang berada di seluruh Vietnam tanpa terkecuali. Masyarakat Vietnam pun sudah terbiasa dengan kondisi tersebut dan menerima apa adanya.

Di negeri yang tata kelola pemerintahannya berlandaskan ideologi komunis sosialis, segala sesuatunya memang diberlakukan serba tercatat dan terlapor. Tentu ada sisi positif dan negatif dengan sistem ideologi seperti ini. Sisi positifnya adalah segala sesuatunya menjadi mudah dirunut kembali perihal asal usul sebuah kejadian atau peristiwa. Sisi negatifnya, sebagai individu, ruang gerak seseorang menjadi tidak leluasa atau tidak bebas dan kehilangan hak demokrasi. Namun, negeri sosialis komunis seperti yang diajarkan oleh Karl Marx memang bukan sebuah negeri demokratis individualis, namun sebaliknya.

### 2.3.2 Lima Masjid Besar di Ho Chi Minh City

Sebagian besar muslim Vietnam tinggal di wilayah selatan Vietnam. Sebagian besar bertahan mencari penghidupan di kampung asalnya dan sebagian lagi merantau ke wilayah utara, yaitu Hanoi yang menjadi ibu kota Vietnam dan berada di wilayah utara.

Ho Chi Minh City adalah kota terbesar di Vietnam. Kota ini dahulunya terkenal dengan nama Saigon. Sekalipun Saigon telah berubah nama menjadi Ho Chi Minh City, sebagai penanda bersatunya wilayah selatan dengan utara Vietnam ketika Amerika Serikat berhasil dipukul mundur pada 2 Juli 1976, tidak mengubah komposisi jumlah penduduk muslim Vietnam yang dahulunya sudah banyak terkonsentrasi di wilayah selatan.

Sebagai muslim Indonesia, tentu kita sudah sangat akrab dengan masjid. Masjid-masjid di Vietnam kurang lebih mirip dengan di Indonesia dan di beberapa negara lain di Asia Tenggara, seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Jikalau ada perbedaan, hanya pada tampak luar desain masjid yang terasa lebih kuat pengaruh Islam Asia Selatan (India, Pakistan, dan Bangladesh) dibandingkan dengan Asia Tenggara, seperti pada bentuk kubah dan gerbang masjid.

Komunitas muslim India yang keturunannya kini masih tinggal di Vietnam memiliki andil besar dalam perkembangan dan pertahanan Islam di negeri sosialis komunis ini. Mereka melakukan perdagangan dengan masyarakat lokal sejak masa kolonialisme Prancis. Perdagangan di tanah yang baru selama sekian masa, membuat para pedagang muslim India lantas menjadi mapan di Vietnam. Mereka solid dalam hal kebersatuan etnis dan tinggal secara berkelompok. Namun, belakangan ini terjadi pergeseran ketika masyarakat Champa yang bermigrasi dari Chau Doc di Delta Sungai Mekong bergerak menuju Ho Chi Minh City. Hal ini membuat pergeseran posisi struktural di beberapa masjid di Vietnam yang beralih kepada komunitas muslim dari etnis Champa.

Ketika di Indonesia dan negara lain di Asia Tenggara hanya menggunakan masjid untuk melakukan ibadah *mahdoh* (yang khusus) semata, tidak demikian di Vietnam. Minoritas muslim Vietnam, memperlakukan masjid sebagai segalanya. Muslimin Vietnam (begitu juga kita semua) meyakini jika segala sesuatu yang baik dimulai dari masjid. Oleh karena itu, segala sesuatu yang baik dimulai dari masjid sehingga seringkali hal yang bersifat muamalah pun dilakukan pula di masjid.

Masjid-masjid di Vietnam benar-benar bersifat sebagai *the centre of excellence* dari seluruh aktivitas musliminnya. Masjid digunakan



untuk perayaan hari-hari besar Islam, seperti Idulfitri, Iduladha, Maulid Nabi Muhammad saw. hingga acara-acara yang lebih personal sifatnya, seperti walimah pernikahan, akikah, hingga kegiatan sosial, seperti belajar agama dan mengaji.

Masjid-masjid di Vietnam, selain terdapat sajadah untuk salat, mimbar, dan pengeras suara untuk azan, terdapat meja belajar di ruang khusus untuk mempelajari Alquran dan ilmu Islam terkait lainnya. Yang paling menarik adalah masjid menyediakan dapur umum yang selalu berasap. Artinya, selalu ada kegiatan memasak untuk menyiapkan hidangan yang akan dinikmati bersama di masjid. Jemaah masjid juga akan bergotong-royong pada saat hari-hari besar Islam. Mereka saling membantu menyelesaikan tugas sesuai yang diamanahkan. Jika turis muslimin datang ke Vietnam di wilayah selatan, minimal ada lima masjid besar serta utama yang wajib dikunjungi.

### **(1) Musulmane Mosque atau Saigon Central Mosque**



Gambar 2.9  
Musulmane  
Mosque yang  
berada di Ho Chi  
Minh City.

*Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)*

Memiliki dua nama dalam bahasa Prancis sebagai Musulmane Mosque dan bahasa Inggris sebagai Saigon Central Mosque. Masjid ini beralamat di 66 Dong Du Street, Distrik 1, Ho Chi Minh City, Vietnam. Musulmane Mosque dibuka setiap hari pada pukul 08.00–21.00. Saigon Central Mosque atau Musulmane Mosque ini merupakan salah satu

masjid yang paling menonjol di Kota Ho Chi Minh City. Masjid ini berdiri atas jasa masyarakat muslim India Selatan yang tinggal di Vietnam. Jejak mereka sangat jelas, tidak hanya dapat dilihat dari jejeran resto India yang berada di sepanjang jalan di Kota Ho Chi Minh City, tetapi juga secara nyata berupa masjid tempat beribadah. Masjid ini sebenarnya juga memiliki nama lokal lain, yaitu Masjid al-Jami'a al-Muslimin dan Dong Du Mosque.

Masjid yang dibangun pada tahun 1930-an ini memiliki keunikan. Selain meninggalkan kesan kuat pada arsitektur yang ditampilkan dan suasana khuyuik saat beribadah, termasuk jajanan kuliner halal yang tersedia di luar masjid, letak masjid ini menempel dengan hotel berbintang lima berlogo Sheraton Hotel.



Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)

Gambar 2.10  
Berada di pelataran  
Musulmane Mosque.

Terkait dengan Sheraton Hotel yang posisinya menempel dengan bangunan masjid, Konjen RI untuk Ho Chi Minh City, H.E. Hanif Salim, sempat berbagi pengalamannya ketika didekati secara diplomatik oleh kumpulan masyarakat India muslim yang bermukim di Ho Chi Minh City. Mereka adalah pemilik resmi tanah wakaf yang sebagian diambil paksa oleh pemerintah Vietnam untuk diberikan kepada manajemen *chain-hotel Sheraton* untuk dibangun hotel berbintang lima di sana.



Tujuan diplomatik kumpulan masyarakat muslim India tersebut adalah agar Indonesia (sebagai negeri dengan penduduk mayoritas terbesar dunia) memberikan dukungan atas keberatan pihak India untuk tanah yang diambil alih tersebut. H.E. Hanif Salim menyatakan tidak dapat melakukan hal yang diminta oleh perwakilan masyarakat India tersebut karena hal itu di luar wilayah yurisdiksi pemerintah Indonesia. Lebih jauh lagi, sistem hukum atas tanah di Vietnam tidak sama dengan yang diterapkan di Indonesia maupun India. Singkat kata, Sheraton Hotel bintang lima itu akhirnya tetap dibangun dan masyarakat muslim India yang kehilangan sebagian hak atas tanah wakafnya tidak dapat berbuat apa-apa.

Bangunan Musulmane Mosque jika diamati dengan saksama dibangun dengan bentuk bangunan ala tradisional India yang lengkap dengan menara menjulang tinggi pada keempat sudut masjidnya. Kapasitas yang dapat ditampung oleh masjid ini adalah sekitar 350-an jemaah. Hal unik lainnya dari masjid ini adalah tempat wudu dibentuk dengan kolam segi empat yang cukup besar.

Awalnya, Musulmane Mosque adalah tempat yang hanya diperuntukkan bagi jemaah muslim asal India yang datang dan/atau menetap. Namun belakangan ini, terjadi perubahan. Muslimin dari seluruh dunia yang ingin beribadah di masjid dan beristirahat sejenak diperbolehkan.



Gambar 2.11  
Pengunjung masjid diizinkan  
untuk beristirahat di dalam  
masjid.

Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)

Beragam sumber menyatakan jika pembangunan masjid menghabiskan dana sekitar 10,5 juta Dong atau setara dengan USD 5.700 atau sekitar Rp560 juta pada masa itu (sekitar tahun 1935-an), yaitu ketika Vietnam masih dalam penjajahan Prancis dan melalui dua masa transisi

penguasaan wilayah oleh pihak asing, serta saat di bawah kekuasaan Amerika Serikat di Vietnam Selatan.

Pada tahun 1970-an, Musulmane Mosque ini direnovasi. Suasana di dalam dan sekitar masjid sangat bersahabat. Berkat kenyamanan beranda teduh dan lantai batu, pengunjung juga diizinkan untuk duduk, membaca, atau bahkan tidur siang ketika musim panas menyengat.

Ada pengalaman menyenangkan yang dialami penulis ketika dalam kondisi flu berat, namun harus tetap menyelesaikan penelitian yang telah dimulai. Ketika kepala terasa semakin berat dan nyeri, penulis terpaksa rebahan di atas sajadah sejak salat asar, hingga melewati magrib sambil menunggu azan isya tiba.

Karena jemaah sedang tidak banyak, kecuali beberapa orang muslimah yang sebagian besar bercakap bahasa Melayu, penulis yang sedang tiduran karena sakit menjadi perhatian pihak pengurus masjid. Apa yang terjadi kemudian? Penulis dan rombongan justru disuguhi makan malam gratis yang nikmat dan lengkap ala muslim Champa Vietnam. Rupanya, pihak manajemen masjid selalu mempersiapkan kuliner lokal untuk para musafir yang datang dari luar Vietnam, yang datang ke Kota Ho Chi Minh City, serta yang mampir di masjid dan melakukan salat di masjid tersebut. Sungguh terasa manisnya jaringan *silaturahmi ukhuwah Islamiah* di sini, Islam itu indah!



Gambar 2.12  
Kuliner lokal yang  
dihidangkan pihak  
manajemen masjid.

Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)

Menu yang dihidangkan untuk kami bertiga sesungguhnya sederhana. Namun, hidangan tersebut menjadi istimewa karena kami sedang dalam kondisi bersafar. Kuliner halal khas etnis Champa juga terasa unik di lidah kami sebagai orang Indonesia. Namun, bagi Anda yang suka berpetualang rasa (walau tetap wajib dalam koridor

jaminan kepastian halal), dapat membayangkan rasa renyah kerupuk (lebih tepatnya semacam opak orang Sunda) yang adonannya dicampur wijen hitam, yang dicocol seperti saat penggunaan sendok ke arah piring yang berisi kerang remis yang direbus berbumbu dengan sedikit rasa manis. Ketika merasa masih kurang sedap, kita dihadapkan dengan dua pilihan rasa lainnya, yaitu cocolan garam kasar dan lemon cina yang kecil-kecil, tetapi rasanya manis-asam-segar. Demam yang penulis rasakan langsung terasa sembuh, khususnya ketika perut yang awalnya kosong dan habis minum obat penurun demam menjadi lebih terisi, energi pun kembali pulih. Rupanya, keikhlasan menjamu tamu menjadi salah satu obat mujarab penawar sakit seorang musafir.

Tak jauh dari bangunan masjid banyak terdapat restoran halal yang dikelola oleh masyarakat muslim asal Turki, India, bahkan Malaysia dengan jenis kuliner yang sesuai dengan negeri asal mereka. Ada juga restoran yang menawarkan masakan khas etnis Champa Vietnam dengan label halal yang sungguh menggoda untuk dicoba.

## **(2) Cholon Mosque**

Masjid ini terletak di tengah-tengah daerah Cholon yang merupakan wilayah Chinatownnya Kota Ho Chi Minh City. Cholon Mosque beralamat di 641 Nguyen Trai Street, Ward 11, District 5, Kota Ho Chi Minh, Vietnam. Masjid ini terlihat cukup mencolok sehingga tidak menyulitkan pada saat awal pencariannya.

Dibangun pada tahun 1932, Masjid Cholon pada awalnya hanya melayani komunitas muslim dari India Selatan yang tinggal di daerah tersebut. Namun, sejak tahun 1975 telah dibuka untuk muslim lainnya, semisal muslim asal Malaysia dan Indonesia yang berada di Vietnam. Masjid dibuka setiap hari dan pada setiap waktu salat dari hari Senin hingga Minggu.

Berada di sebuah jalan yang agak masuk ke dalam, dengan ornamen sederhana dan skema bangunan berwarna putih hijau, pengunjung akan dapat melihat langsung arah pintu masuk Masjid Cholon. Di samping gang menuju masjid, terdapat restoran halal yang menyediakan menu sup Tom Yam.



Gambar 2.13  
Restoran halal yang terdapat  
di samping gang menuju masjid.

*Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)*

Turis muslim yang berkunjung ke sana disarankan datang pada waktu terbaik di sekitar makan siang atau malam. Kedatangan turis pada waktu tersebut yang lantas akan menikmati kuliner halal ala Vietnam (sebagian bermenu Thailand semisal Tom Yam Kung untuk campuran dengan udang atau Tom Yam Talay untuk campuran dengan potongan ikan) juga turut berkontribusi pada keberlanjutan manajemen masjid yang keuntungannya akan diinfakkan pada pengelolaan masjid kembali.



*Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)*  
Gambar 2.14. Penulis bertemu imam masjid Ustaz  
Haji Zacriya beserta pengurus masjid.

Atas jasa KJRI di Ho Chi Minh City, selain bertemu dengan imam masjid Ustaz Haji Zacriya dan pengurus masjid (sambil sebelumnya mencicipi kuliner restoran masjid), rombongan penulis juga didampingi oleh dua orang sahabat baru yang bertugas sebagai penerjemah bahasa Vietnam ke bahasa

Indonesia untuk beberapa narasumber yang akan diwawancarai. Mereka berasal dari jaringan Keluarga Besar Alumni Universitas Gadjah Mada (KAGAMA UGM). Keduanya adalah Agatha Mursanto dan Indra Wahab. Agatha Mursanto adalah seorang alumni FEB UGM, staf lokal KJRI di Ho Chi Minh City yang sebelumnya bekerja di pos di Suriname. Sementara itu, Indra Wahab berasal dari F-MIPA UGM yang bersuamikan pria asli Ho Chi Minh City yang kini memiliki nama Islam Aly (dengan nama lengkap Ho Math Aly), yang juga alumni dari UGM dari Fakultas Ilmu Komputer atas beasiswa Islamic Development Bank (IDB).

Dua Pasutri Indonesia–Vietnam ini kini memutuskan untuk tinggal di kampung halaman sang suami yang bekerja pada perusahaan semen Indonesia yang berkedudukan di Ho Chi Minh City. Mereka pun membesarkan keempat orang anak mereka di Vietnam.



Gambar 2.15  
Penulis bersama Agatha Mursanto  
dan Indra Wahab.

*Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)*

Selain bekerja, Indra dan Aly adalah jemaah masjid yang turut memakmurkan beragam acara di masjid, khususnya pada hari-hari besar Islam. Aly sendiri menjadi seorang muallaf sebelum menikah dengan gadis Jawa manis incarannya yang bernama Indra itu (bahkan sebelum menjadi mahasiswa di UGM). Pertemuan mereka di UGM, kemudian membuahkan cinta dan berlanjut hingga jenjang pernikahan. Ketika kami tanyakan mengapa tidak tinggal di Yogyakarta, Indonesia, saja daripada di Ho Chi Minh City, Vietnam, lalu apakah berbahagia selama hidup dan tinggal di Vietnam bersama keluarga, dijawab oleh Indra bahwa mereka memang dengan sadar memutuskan hidup dan tinggal di negara asal suami serta menjadi bagian dari pendakwah Islamiah di

Vietnam. Lebih jauh kehidupan mereka sekeluarga berbahagia selama di Vietnam hingga kini.

### (3) Al Rahim Mosque



Gambar 2.16  
Masjid Al Rahim yang berkaitan erat dengan kelompok masyarakat Indonesia dan Malaysia.

Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)

Al Rahim Mosque dibangun pada tahun 1885 dan beralamat di Jalan 45 Nam Ky Khoi Nghia, District 1, Kota Ho Chi Minh City, Vietnam. Masjid yang memiliki nama lain, yaitu Masjid Boyan (Bawean) ini dibuka setiap harinya. Seperti kita ketahui, Bawean adalah salah satu nama pulau yang ada di Indonesia, tepatnya di Madura, Jawa Timur.

Pada tahun 2010, bangunan masjid yang sudah berdiri ratusan tahun itu dibongkar total lalu dibangun kembali oleh dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia. Tak heran jika masjid ini berkaitan erat dengan kelompok masyarakat Indonesia dan Malaysia, khususnya pada akhir pekan.

Selain masyarakat muslimin Champa sebagai etnis pertama yang menghuni wilayah Vietnam, di sekitar masjid ini dihuni pula oleh masyarakat muslimin asal Bawean, Madura, Jawa Timur.

Stokhof, M (2008) dalam bukunya *“The Bawean of Ho Chi Minh City”* dan Stokhof dan Salemink (2009) dalam jurnal Vietnamese



Studies berjudul *“State Classification and Its Discontents: The Struggle Over Bawean Ethnic Identity in Vietnam”*, menjelaskan masyarakat Bawean yang tinggal di sekitar masjid ini. Al Rahim Mosque awalnya dinamakan *Chua Ma Lai* (Masjid Malaysia) hingga tahun 1972. Namun, pada tahun 1973, namanya diubah menjadi seperti nama yang sekarang ini *“Masjid al Rahim Malaysia-Indonesia.”*



Gambar 2.17  
Simbol bintang dan bulan sabit yang terdapat di depan bangunan masjid.

Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)

Tampak dari luarnya, bangunan masjid ini penuh dengan simbol-simbol muslim, seperti bintang dan bulan sabit. Berkat dekorasi dinding masjid itulah, nuansa Timur-Tengah agak kemelayu-melayuan menjadi semakin kental terasa.

Keluar dari kendaraan menuju Masjid Al Rahim, kita akan jumpai jejeran kuliner halal yang dijual di pinggir jalan atau *halal food street*. Mereka menjual aneka gorengan (beberapa terlihat seperti pisang goreng), dengan tulisan halal besar berwarna merah yang mencolok. Salah satu penjualnya adalah seorang ibu tua bertutup kepala (meski bukan jilbab). Mereka menjual kuliner dagangannya dengan



sangat sopan dan tidak memaksa. Keramahan dan senyuman yang terpancar di wajah ibu penjual jajanan tersebut

Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)

Gambar 2.18  
Kuliner halal yang diujakan di pinggir jalan dekat masjid.

pun mampu meluluhkan hati rombongan peneliti untuk membeli beberapa makanan yang dijajakannya.

Memasuki halaman masjid, kita akan disambut oleh papan nama dengan warna latar *sea foam green* bertuliskan Cong Dong Hoi Giao, Masjid Al Rahim Malaysia–Indonesia di samping tempat wudu luar ruang. Selanjutnya, setelah menaiki tangga depan masjid, sampailah kami di lantai penerimaan yang terletak di lantai dua masjid. Di lantai tersebut, ternyata telah tersedia aneka kudapan hangat serta teh dan kopi Vietnam dalam poci yang masih mengepul. Rasa haru langsung menyeruak hati kami karena memang pagi itu kami belum sarapan cukup di hotel tempat menginap. Sambil menikmati kuliner yang mirip dengan sarapan ala rumahan di tanah air (sejenis arem-arem, pisang goreng, lapis legit, dan sebagainya), kami langsung memulai interviu mendalam.



Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)

Gambar 2.19 (kiri)  
Bersama pengurus masjid  
Ustaz Haji Abdoul Tarif.



Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)

Gambar 2.20. Ustaz Haji Abdoul Tarif yang merupakan seorang keturunan Madura.

Kami sungguh merasa terkejut ketika mengetahui bahwa pengurus masjid yang bernama Ustaz Haji Abdoul Tarif adalah asli keturunan Madura, tepatnya asal Bawean. Tak heran jika salah satu nama lain Masjid Al Rahim ini adalah Masjid Boyan. Beliau berusia sekitar 70-an tahun. Meski tidak lahir di Indonesia, Ustaz Haji Abdoul Tarif lumayan fasih berbahasa Melayu–Indonesia. Pada usia 10 tahun, beliau dibawa orang tuanya ke Vietnam dari Singapura untuk menjemput rizki-Nya ke



Saigon (nama lama Ho Chi Minh City). Setelah dewasa, pada usia 20 tahun, beliau menikah dengan gadis asli Vietnam dan dikarunia empat orang anak (meski tak ada satu pun yang mampu berbahasa Melayu–Indonesia). Kini, di usia senjanya, yang dilakukan beliau adalah mengabdikan kepada umat dengan melakukan perawatan terhadap masjid yang telah direnovasi tersebut.

#### (4) Jamiyah Islamic Mosque atau Masjid Jamiul Muslimin



Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)  
Gambar 2.21  
Jamiyah Islamic Mosque  
dengan arsitektur bernuansa Timur  
Tengah.

Masjid ini terletak di salah satu jalan paling sibuk di Ho Chi Minh City, sebuah jalan utama yang dilalui kendaraan dari arah pusat Kota Ho Chi Minh City menuju bandara internasional Tan Son Nhat. Tepatnya beralamat di 52 Nguyen Van Troi, Distrik Phu Nhuan, Ho Chi Minh City, Vietnam. Karena letaknya yang strategis dan bentuk arsitekturnya yang kental bernuansa Timur–Tengah dan warnanya yang kontras dibandingkan dengan bangunan yang ada di sekitarnya, membuat masjid ini mudah ditemukan dan diakses. Tampak luar bangunan masjid terdiri atas tiga bagian, yaitu kubah berwarna emas, lantai dua berwarna hijau terang, dan lantai dasar berwarna hijau lumut. Ruangannya fungsional masjid dibagi menjadi dua, yaitu lantai atas untuk salat

dan lantai bawah untuk mengajar mengaji anak-anak. Awal dibangunnya Masjid Jamiyah Islamic Mosque adalah untuk tempat beribadah masyarakat etnis Champa. Masjid ini dibuka selama seminggu penuh, dari hari Senin hingga Minggu.

Sebagaimana fungsi masjid lainnya, masjid ini juga dapat digunakan untuk acara kelahiran akikah bayi baru lahir, pernikahan,

hingga mensalatkan jenazah. Hanya saja, yang lebih menonjol dari aktivitas masjid lainnya di Ho Chi Minh City adalah fokus masjid ini pada aktivitas mengajar mengaji (baca dan tulis Alquran) serta tulisan Arab Gundul dan Arab Jawi (Jawa) kepada seluruh jemaahnya yang berminat, baik tua maupun muda dan/atau para perempuan dan anak-anak. Usai salat Jumat, masjid seringkali mengadakan akikah bayi, terkadang ada juga yang melangsungkan pernikahan.

Pada saat rombongan penulis melakukan riset di masjid ini, sedang berlangsung acara akikah bayi laki-laki dari etnis Champa yang bernama Khaeruddin. Karena rombongan penulis adalah kaum hawa sehingga oleh sahibul bait dan sahibul hajat diarahkan ke bangunan di belakang masjid untuk bergabung dengan para muslimah lainnya.



Gambar 2.22  
Penulis disambut oleh  
sahibul bait.

*Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)*

Prosesi acara akikah di Vietnam dilaksanakan hampir sama dengan yang dilakukan oleh para keluarga muslimin di Indonesia. Jemaah pria berkumpul dan bayinya diikutsertakan dalam masjid untuk dibacakan doa-doa dan salawat. Setelah selesai, sang bayi, kemudian dibawa kembali ke ruangan jemaah perempuan, tempat di mana ibunda sang bayi menunggu sambil bersiap untuk bersantap bersama para tamu jemaah muslimah lainnya.

Hal menarik lainnya pada saat prosesi akikah adalah ketika beragam nampan (baki) berbentuk bundar yang terbuat dari seng atau besi berisi kuliner lezat berseliweran di depan rombongan. Ada satu nampan yang lewat, namun bukan berisi makanan melainkan berisi bayi Khaeruddin.

Bayi Khaeruddin tertidur nyenyak di dalam nampan yang dilengkapi dengan bantal kecil, bertopi rajut, bersarung tangan, dan bersepatu kain. Bayi Khaeruddin juga diselimuti selembar selimut tipis begaris hitam-putih. Ia pun tak terganggu oleh suara riuh rendah para muslimah yang bercengkerama sambil menikmati kuliner yang telah dihidangkan. Saat penulis mencoba menggendongnya, bayi Khaeruddin pun tetap tidur pulas dalam pelukan penulis yang mengiringi dengan doa keselamatan lahir batin serta dunia dan akhirat.

Adat atau kebiasaan masyarakat suku Champa pada saat ingin memberikan hadiah kepada si bayi adalah dengan meletakkan uang



*Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)*

Gambar 2.23

Bayi Khaeruddin tertidur nyenyak dalam gendongan.

kertas ke bawah bantal yang ditudurinya di dalam nampan bulat tersebut. Sambil baki yang berisi bayi disorong secara “urut kacang” di atas karpet yang diduduki, dari satu posisi duduk muslimah ke yang berikutnya, saat itu juga diselipkan uang kertas sebagai hadiah untuk si bayi (dan/atau kedua orang tua bayi). Sebagai penanda bahwa pada saat akikah dilaksanakan hadir tiga orang tamu perempuan yang datang dari jauh, dari Indonesia, kami pun menyisipkan beberapa lembar uang kertas lima puluh ribu dan sertus ribuan secara bergantian ke bawah bantal bayi Khaeruddin. Kami pun mendoakan agar kelak bayi Khaeruddin memiliki kesempatan untuk datang ke Indonesia dan banyak berkawan dengan orang Indonesia.

Menu lezat yang menggiurkan rombongan peneliti sesungguhnya sederhana. Menu tersebut berupa tiga macam kari india bersusu (mungkin juga santan) yang berisi pilihan daging kambing, ayam, atau ikan yang dilengkapi dengan pisang mas, acar mentimun, dan garam kasar pedas berbumbu serta irisan jeruk nipis. Kelezatan menu tersebut pun masih terus terbayang di kepala penulis selama beberapa hari pada sisa perjalanan riset Vietnam.



Gambar 2.24  
Menu lezat yang dihidangkan pada saat acara akikah.

Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)

### (5) Jamiul Islamiyah Mosque

Masjid ini beralamat di 495B Tran Hung Dao Street, Cau Kho Ward, Distrik 1, Ho Chi Minh City, Vietnam dan dibuka setiap hari. Masjid Jamiul Islamiyah ini juga dikenal sebagai Masjid Nancy, siapa itu Nancy dan mengapa nama “berbau” barat itu sedemikian penting untuk disandingkan dengan kesakralan masjid, tidak diperoleh jawaban



Gambar 2.25  
Jamiul Islamiyah Mosque yang juga dikenal dengan Masjid Nancy.

Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)

pasti dari berbagai sumber yang menjadi narasumber penulis. Masjid pertama kali dibangun pada tahun 1950. Dibangun kembali untuk kedua kalinya antara tahun 1980 dan 2003. Setelah pembangunan yang kedua kali ini, pada tahun 2004, masjid secara resmi terbuka bagi muslimin lain selain etnis keturuna India, seperti muslimin etnis Cham dan lain sebagainya secara inklusif.

### 2.3.3 Satu-satunya Masjid di Hanoi

Kini, satu-satunya masjid di Kota Hanoi hanyalah Masjid Al Noor yang terletak di jantung Kota Hanoi, di jalan 12, Hàng Lược, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hanoi. Masjid ini selalu dipenuhi oleh umat dari seluruh ibu kota dan daerah di sekitarnya. Menurut informasi yang diperoleh, dikabarkan bahwa di Hanoi sebelumnya ada tiga buah masjid. Namun, seiring perjalanan waktu, yang tetap berfungsi sebagai rumah ibadah muslimin hanya tersisa satu, yaitu masjid Al Noor. Dua masjid lainnya karena lama ditinggal oleh para pendirinya, akhirnya rusak karena lapuk tak terawat.



Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)

Gambar 2.26. Al Noor satu-satunya masjid yang berada di Kota Hanoi, Vietnam.

Masjid Al Noor pada saat salat Jumat ketika dipadati jemaah mampu menampung sekitar 300-an jemaah. Dari total jemaah muslimin yang beribadah di masjid, yang asli dari Vietnam biasanya hanya sekitar seperlima dari jumlah maksimal daya tampung masjid. Selebihnya adalah para pejabat dan karyawan dari kedutaan besar negara-negara muslim yang berada di Kota Hanoi.

Masyarakat muslimin Vietnam berusaha tetap taat dalam menjalankan keislamannya. Sebagai contoh, sekalipun di Vietnam babi adalah makanan sehari-hari yang paling populer (sama populernya dengan ayam jika di Indonesia), muslimin di Vietnam mencoba tetap mematuhi kaidah halal dan haram di dalam Islam, yakni dengan tidak memakan babi.

Pada saat membuat *Pho* (dibaca Fe) yang merupakan makanan tradisional Vietnam, muslimin Vietnam mengubah komposisi kaldu dari rebusan tulang babi sebagai warisan resep jitu nenek moyang Vietnam dengan tulang sapi atau ayam. Muslimin Vietnam juga tidak meminum *khamr* atau minuman beralkohol, seperti bir dan anggur. Dalam mengonsumsi daging sapi dan daging ayam pun harus disembelih dengan cara Islam, yaitu sebelum hewan-hewan tersebut disembelih harus mengucapkan asma Allah *Azza wa Jalla*. Muslimin Vietnam juga tidak mengonsumsi (mengharamkan) semua binatang buas (yang bertaring dan berbisa) serta darah.

Kepengurusan masjid Al Noor Hanoi dilakukan secara bergantian atau bergilir. Sebelum kedatangan rombongan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Komisi Dakwah dalam “Muhibah Dai Serumpun 2018” bersama penulis, masjid memiliki manajer seorang asli Vietnam keturunan Pakistan bernama Doan Hong Cuong. Dia mengelola masjid ini selama lebih dari 20 tahun, namun kini kepengurusannya telah berganti. Saat ini, Masjid Al Noor dipimpin oleh seorang ustaz lulusan Lybia ahli bahasa Arab dan agama Islam asal etnis Champa di Ho Chin Minh



Gambar 2.27  
Mieu Abbas sebagai Imam  
Masjid Al Noor sekaligus *general manager*.

Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)

City bernama Mieu Abbas. Ustaz Mieu Abbas berasal dari suku Champa, menikah dengan seorang perempuan asal Hanoi yang menjadi seorang mualaf. Dalam kartu namanya tertera sebagai imam masjid dan *general manager*.

Masjid Al Noor dikelola oleh badan pengurus masjid yang mereka sebut sebagai Mosque Management Committee. Badan pengurus ini telah berlangsung sejak tahun 2001 dan terdiri atas lima perwakilan kedutaan negara muslim di Hanoi yang diketuai oleh salah satu dari mereka. Lima perwakilan kedutaan itu adalah Mesir, Libia, Algeria, Irak, dan Indonesia. Seluruh kedutaan negara muslim di Vietnam memperoleh kesempatan untuk menjadi bagian dari Mosque Management Committee di tahun yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dapat dipahami jika terdapat satu nama yang mewakili Indonesia dalam susunan kepengurusan pergantian masjid Al Noor di Kota Hanoi tersebut yang bernama Azhar Rizal. Beliau adalah salah seorang staf lokal di KBRI Hanoi dan juga pemilik resto “Batavia Hanoi” di Kota Hanoi.

Pada saat penelitian dilakukan, penulis melihat ada dualisme kepemimpinan di Masjid Al Noor. Satu pemimpin lain yang merasa memiliki ikatan kuat dengan Masjid Al Noor bernama Ustaz Abdus Salam. Ustaz Abdus Salam adalah mahasiswa muslim Vietnam yang kuliah agama Islam di Libia dan teman dekat Ustaz Mieu Abbas. Awalnya, sebagai kawan lama yang sama-sama merantau dari Ho Chi Minh City di selatan Vietnam ke Hanoi di wilayah utara, membuat kedua ustaz ini berada dalam susunan kepengurusan Masjid Al Noor. Namun, kemudian terjadi dinamika di dalam perkongsian kepengurusan Masjid Al Noor di Hanoi ini.

Pengurus Masjid Al Noor juga dipercaya menjadi ketua dari organisasi muslim yang bernama Hanoi Muslim Community. Organisasi ini diperuntukkan sebagai wadah untuk mewakili kepentingan masyarakat muslimin Vietnam di Hanoi. Imam masjid Mieu Abbas bersama beberapa rekan muslim Hanoinya menjadi pendiri sekaligus pengurus dan ber Kantor di Masjid Al Noor. Hanoi Muslim Community berada dekat pintu gerbang masjid.

Masjid Al Noor sendiri yang berada dalam kondisi 100 tahun pembangunan, dimulai dari awal abad XIX ketika pedagang dari India dan



Timur Tengah pergi ke Vietnam Utara untuk membeli kain dan menukar mata uang. Ustaz Mieu Abbas menjelaskan pada tahun 1830-an sekitar 1.000 orang India mengadu peruntungan di wilayah Indocina-Prancis. Orang-orang India yang datang ketika itu adalah para pedagang kaya yang menguasai perdagangan kain katun dan sutra. Karena perniagaan yang menguntungkan, banyak dari mereka yang kemudian memutuskan untuk menetap di Vietnam. Mereka pun tinggal di wilayah permukiman kampung India di Kota Hanoi yang terkonsentrasi di Jalan Hang Dao, distrik Hoan Kiem (di sekitar Danau Indah).

Sebagai muslimin India asal Bombay (sekarang bernama Mumbai, India), guna memenuhi kebutuhan beribadahnya pada tahun 1885, mereka bahu-membahu mengumpulkan dana untuk membangun masjid yang kemudian dinamakan Al Noor. Pembangunan masjid berlangsung cukup lama hingga akhirnya dapat digunakan pada tahun 1890.

Masjid yang dibangun dengan gaya khas Islam, lengkap dengan kubah, pintu melengkung, dan puncak tersebut berukuran kecil, hanya seluas kurang lebih 700 m<sup>2</sup>. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak sumbangan untuk pembangunan masjid diperoleh dari beberapa negeri muslim Timur Tengah semisal Kuwait. Kini, masjid ini pun menjadi indah dan manis serta terawat.

Suasana di sekeliling masjid Al Noor sangat unik. Di samping persis masjid, terdapat kantor utama Partai Komunis Vietnam dengan belasan bendera Vietnam dan bendera palu arit berkibar-kibar ditiup angin. Ketika membidikkan kamera, penulis menangkap aktivitas judi kartu jalanan dan para penjudinya. Di balik sekelompok para penjudi tersebut, terdapat satu toko butik tas dan sepatu bermerek terkenal dari Italia. Penulis juga melihat warung kaki lima yang menjual jus jeruk dan mangga. Benar-benar terasa komplet karena semua “kebutuhan” manusia dunia dan akhirat ada di dalam satu jalanan bernama Jalan Hang Luoc Street, Hoan Kiem Dist, Hanoi, Vietnam.

Hal positif yang diperoleh saat penelitian berlangsung adalah terkait aktivitas halal yang berada sangat dekat dengan Masjid Al Noor. Kuliner halal dekat masjid tidak dijajakan di depan masjid (karena sempitnya trotoar di depan masjid dan berada di tengah jalan berpenduduk





Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)

Gambar 2.28

Restoran halal yang dapat ditemui dekat masjid.

padat dengan lalu lintas yang sangat ramai), tetapi terletak agak menyempil di gang kecil samping kanan masjid. Nama restoran halal tersebut adalah “Zaynab” dengan tulisan *Halal Food* besar berlatar belakang warna hijau dan putih dengan simbol kubah masjid yang dilengkapi dengan dua menara kiri dan kanan seperti masjid di Turki.

Pemilik restoran adalah keluarga Vietnam keturunan Pakistan dan masih bersaudara dengan

pengurus Masjid Al Noor sebelum kepemimpinan Ustaz Mieu Abbas. Nama Zaynab diambil dari nama istrinya. Restoran ini merupakan salah satu restoran halal yang ada di Kota Hanoi. Zaynab hadir untuk menjawab pertanyaan para turis muslimin mancanegara jika datang ke Hanoi dan beribadah di Masjid Al Noor. Di depan jalan penunjuk menuju restoran dari arah masjid terpampang sertifikat halal yang dikeluarkan oleh HVN yang merupakan singkatan dari Halal Vietnam. Sertifikat halal ditandatangani oleh *general manager* sekaligus imam masjid Al Noor atas nama Haji Mieu Abbas.

Restoran Zaynab ini berukuran kecil, sangat sederhana, dan berdiri di atas bangunan yang juga sederhana. Hanya tersedia empat lajur meja dan kursi. Namun demikian, menu yang ditawarkan pas di lidah turis Asia Tenggara, termasuk Indonesia, berupa mi goreng, nasi goreng, serta beberapa menu India dan Melayu seperti yang dijual di berbagai restoran halal Vietnam lainnya.

Menjadi turis ke negeri dengan minoritas muslim seperti Vietnam memang tidak harus membandingkannya dengan negeri mus-

lim lainnya yang lebih maju. Menikmati dinamika yang “berdenyut” di tempat penelitian merupakan suatu kenikmatan tersendiri. Yang terpenting semuanya serba halal, halal, dan halal. Namun seberapa halal produk barang yang beredar di Vietnam, akan dibahas lebih detail pada bab-bab selanjutnya.

#### **2.3.4 Ragam Etnis Muslimin di Vietnam**

Sebenarnya, hampir keseluruhan negara Vietnam (wilayah yurisdiksi Vietnam sekarang) dahulunya merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Islam Champa. Namun, karena Champa takluk kepada penjajah, mereka akhirnya justru diusir dari Vietnam dan mengungsi ke beberapa negara tetangga, seperti Kamboja, Malaysia dan Brunei Darussalam. Agama Islam merupakan agama utama bagi masyarakat Champa etnis minoritas yang berkaitan erat dengan masyarakat Melayu yang membawa serta jati diri budayanya ke Vietnam.

Menurut Philip (2006) dari the Australian National University dalam *“Economy in Motion: Cham Muslim Traders in Mekong Delta”, the Asia Pacific Journal of Anthropology*, bahwa sepertiga dari muslimin di Vietnam berasal dari kelompok etnis lain yang terdiri atas campuran etnis (Cham, Khmer, Melayu, Minang, Vietnam, Tionghoa, dan Arab). Secara umum, juga dikenal sebagai Cham atau muslim Cham yang berada di sekitar wilayah Châu Đốc bagian barat daya.

Menurut sensus 1999, dari *Population aged 5 and over as of 1 April 1999 by religion, by sex and by school attendance* Tổng Cục Thống kê Việt Nam, dikatakan bahwa pada bulan April 1999, sensus Vietnam menunjukkan terdapat 63.146 muslim. Lebih dari 77 persen dari total muslim Vietnam tinggal di South Central Coast, 34 persen di Ninh Thuận Provinsi, 24 persen di Bình Thuận Provinsi, kurang dari 1 persen di Ho Chi Minh City, dan 22 persen lainnya tinggal di Mekong Delta wilayah, terutama di Provinsi An Giang. Hanya 1 persen muslim tinggal di daerah lain di negeri ini. Sementara itu, jumlah orang yang memiliki kepercayaan hanya 2 persen dalam setiap bidang konsentrasi utama dalam jenis kelamin yang seimbang, kecuali An Giang. Lebih lanjut, populasi muslim wanita adalah 7,5 persen lebih besar daripada jumlah penduduk laki-laki muslim. Menurut Caeser (2003) dalam *Islam:*

*Beliefs and Observances*, distribusi ini agak berubah dari yang diamati dalam laporan sebelumnya. Sebelum tahun 1975, hampir setengah dari umat Islam di negeri ini tinggal di Mekong Delta dan pada akhir tahun 1985 komunitas muslim di Ho Chi Minh City dilaporkan berjumlah hampir 10.000 orang.

Dari 54.775 populasi muslim, sebanyak 13.516 atau 25 persen berusia lebih dari 5 tahun, yang saat ini duduk di bangku sekolah. Sebanyak 26.134 atau 48 persen, telah mengenyam pendidikan sekolah pada masa lalu. Sisanya sebanyak 15.121 atau 27 persen pernah bersekolah, dibandingkan dengan 10 persen dari populasi umum. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam menempati peringkat tertinggi kedua dalam hal pendidikan tingkat sekolah informal dari semua kelompok agama di Vietnam (tingkat tertinggi untuk Protestan sebanyak 34 persen). Sekolah nontingkat kehadiran adalah 22 persen untuk pria dan 32 persen untuk wanita.

Menurut sensus 1999 dalam Philip (2007) dalam *Cham Muslims of the Mekong Delta: Place and Mobility in the Cosmopolitan Periphery*, tingkat partisipasi muslimin Vietnam untuk mengenyam pendidikan di jenjang universitas rendah, yakni kurang dari 1 persen jika dibandingkan dengan populasi umum masuk universitas yang berada pada level di bawah 3 persen. Untuk memahami seberapa jauh tingkat partisipasi masuk jenjang universitas di Vietnam dari masyarakat muslim yang minoritas itu, kita mulai dengan mengetahui siapa saja dan mengapa serta bagaimana.

#### **2.3.4.1 Kelompok Klasik Muslim Vietnam**

Masyarakat Vietnam memiliki keunikan cara beragama. Akulturasi budaya lokal dengan peradaban Islam yang datang dari luar Vietnam sering kali tak terhindarkan. Mereka dapat dibagi ke dalam tiga kelompok. Kelompok pertama adalah muslimin Champa yang merupakan kelompok mayoritas. Kedua adalah muslimin dari beragam suku. Mereka adalah kelompok pedagang muslim yang datang dari beragam negeri, seperti Arab, India, Indonesia, Malaysia, dan Pakistan (dan jumlah mereka merupakan kelompok terbesar dari jumlah umat Islam secara keseluruhan), kemudian menikah dengan masyarakat lokal. Ketiga

adalah muslimin asli Vietnam. Mereka adalah kelompok warga Vietnam yang masuk setelah berinteraksi dengan para pedagang muslim dan berkomunikasi secara baik.

Uniknya, dari yang sedikit itu pun, ditemukan tiga mazhab Islam di Vietnam, yaitu Sunni, Bani, dan Syafi'i. Penganut mazhab Sunni dan Bani keduanya tersebar di seluruh penjuru Vietnam, sedangkan mazhab Syafi'i hanya sebagian kecil dan bermukim di lokasi antara Tuan Han dan Ninh Thuan. Dalam perkembangan Islam di Vietnam, mazhab Bani berkembang menjadi aliran anomali dari sudut ajaran Islam. Mazhab Bani yang berkembang masif di Vietnam membuat banyak dai sedunia yang datang ke Vietnam mencoba untuk meluruskannya. Lebih lanjut, ajaran mazhab Bani yang berkembang di daerah antara Ninh Thuan dan Binh Thuan tidak ada di dalam ajaran Islam. Mazhab Bani memiliki pengaruh kuat dari warisan India bercampur dengan warna mistis kelokalan Vietnam. Terlalu lama putus dengan dunia Islam mancanegara dan hubungan silaturahmi dengan muslimin lain di luar Vietnam, membuat mereka buta terhadap ajaran Islam yang hakiki.

Titik balik terjadi pada tahun 1959. Sebagian muslimin Vietnam yang tinggal di bagian selatan, khususnya di Kota Saigon (sekarang Ho Chi Minh City) merambah ke Vietnam di wilayah utara, membuka dialog mengenai ajaran Islam yang sesungguhnya lalu memperbaikinya. Sejak 1959 ini pula, secara berkelanjutan dibangun banyak masjid baru. Di Provinsi Ninh Thuan, kini bertambah empat pembangunan masjid baru, yaitu Masjid Phuic Nhon, Masjid An Xuan, Masjid Van Lam, dan Masjid Nho Lam.

Gerakan pembaharuan Islam di Vietnam semakin meluas ke penjuru wilayah lainnya pada tahun 2006. Pada dasarnya, minoritas muslimin Vietnam haus akan ilmu Islam. Mereka benar-benar membutuhkan orang yang mampu menuntun dan memotivasi agar menjadi muslimin yang lebih berkualitas ke depannya.

#### **2.3.4.2 Muslimin Vietnam Kini**

Sekalipun minoritas, muslimin di Vietnam solid menjadi bagian dari keseluruhan penduduk Vietnam. Meskipun belum signifikan, keberadaan mereka berkaitan erat dengan kemajuan negara dan per-

tumbuhan ekonomi negerinya yang belum pernah dialami pada masa pemerintahan Vietnam sebelum Reformasi Doi Moi pada tahun 1986.

Pada 2007, Vietnam resmi menjadi anggota organisasi negara perdagangan internasional setelah mampu melakukan perbaikan ekonomi dan meluaskan jaringannya beberapa tahun sebelumnya. Vietnam mampu membangun beberapa komponen perbaikan ekonomi dan membuka diri di hadapan investor asing dan perusahaan-perusahaan swasta dengan jumlah investasi miliaran dolar di berbagai lini dan sektor yang beragam. Namun demikian, Vietnam belum terlihat memberikan *trickle down effect* kepada kelompok minoritas musliminnya. Sebagian besar penduduk muslimin masih terperangkap atau belum mampu keluar dari jerat kemiskinan, khususnya muslimin yang tinggal di luar Ho Chi Minh City.

Pada bidang pendidikan, pelajar muslim Vietnam mampu memasuki sekolah-sekolah negeri dan beragam kejuruan (*ma'had*), termasuk beberapa universitas di dalam maupun luar negeri. Impian bagi keluarga muslimin Vietnam adalah bisa mengirimkan putra-putri mereka untuk belajar ke Malaysia, Indonesia, Saudi, Libia, dan Mesir guna menuntut berbagai bidang keilmuan. Sebagian mereka ada yang telah lulus dan berhasil meraih ilmu terapan, kemudian kembali untuk mengabdikan di Vietnam. Mereka memperoleh pekerjaan di beragam lini perusahaan. Namun, mereka yang kembali dengan hanya mengantongi ilmu-ilmu syariah dan usuluddin, tidak mampu memperoleh pekerjaan resmi karena tidak ada lembaga atau yayasan yang mau menampung mereka (karena ilmu yang mereka peroleh dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan pasar pekerjaan di Vietnam).

Akhirnya, para lulusan ilmu syariah dan usuluddin yang tidak memperoleh pekerjaan, kemudian bekerja di lembaga-lembaga non-formal keagamaan berbasis masjid yang memperoleh dukungan dana dan bimbingan manajemen dari negara muslim yang lebih makmur. Mereka yang kini menjadi motor penggerak aktivitas dakwah di tengah masyarakat Vietnam. Adapun, dakwah di Vietnam dibagi menjadi dua kelompok, yaitu dakwah yang dilakukan oleh muslimin Vietnam di luar negeri dan dakwah yang dilakukan oleh muslimin Vietnam dari dalam negeri.

### 2.3.4.3 Empat Komite Islam di Vietnam



Gambar 2.29  
Bersama perwakilan dari Ban Tôn  
Giáo Chính Phủ.

*Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)*

Islam adalah satu dari 15 agama dan 36 lembaga keagamaan yang resmi diakui pemerintah Vietnam hingga kini. Organisasi-organisasi tersebut secara resmi berada di bawah naungan komite pemerintah untuk urusan keagamaan (Government Committee of Religious Affairs) atau Ban Tôn Giáo Chính Phủ yang awalnya berdiri di bawah semacam Kementerian Dalam Negeri. Namun dalam perkembangannya, berdasarkan Keputusan Perdana Menteri No. 134/2009/QĐ-TTg, tertanggal 3 November 2009, Ban Tôn Giáo Chính Phủ diputuskan berdiri sendiri dan membawahi 14 badan sebagai berikut.

1. Departement of Catholic Affaris
2. Departement of Buddhist Affaris
3. Departement of Protestant Affaris
4. Departement of Caodai Affaris
5. Departement of Other Religion Affaris
6. Departement of International Cooperation
7. Departement of Legislation and Inspection
8. Departement of Organization and Personnel
9. The Committee Office
10. Institue for Religious Policy Studies
11. State Religious Affairs Review

12. Information Centre
13. Professional College for State Religious Affairs
14. Religion Publisher

Untuk urusan yang berhubungan dengan Islam, berada di bawah Departement of Other Religion Affaris. Lembaga inilah yang menjadi jembatan atau penyambung segala urusan muslimin Vietnam dengan pemerintahnya. Untuk kelancaran komunikasi, pemerintah Vietnam membangun empat komite Islam (*Islamic Community*) yang tersebar di empat provinsi dan kota yang berbasis penduduk muslim terbanyak. Secara berurutan, lokasi keempat komite Islam itu adalah di Ho Chi Minh City (dibangun pada tahun 1992), di An Giang (dibangun pada tahun 2004), di Tay Ninh (dibangun pada tahun 2010), dan di An Giang kembali (pada tahun 2012). Keempat komite Islam ini menjadi induk untuk menegosiasikan semua kebutuhan muslimin Vietnam kepada pemerintahnya. Keempatnya bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup, kehidupan, dan penghidupan seluruh muslimin yang berada di Vietnam.





## BAB III

# HALAL VIETNAM BELAJAR JUGA KE LPPOM MUI



Berdasarkan informasi yang diperoleh, sesuai surat keputusan dari pemerintah Vietnam Nomor 631/TGCP-TGK, tertanggal 26 Juli 2011, diterbitkan *Appointment of Halal Certification Body* kepada Halal Certification Agency (HCA) yang berkedudukan di Kota Hanoi. Sayangnya, HCA yang telah mengirimkan perwakilannya untuk belajar penyertifikasian halal ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) di Bogor, Jawa Barat, ternyata belum mengantongi legitimasi dari LPPOM MUI terkait jaminan produk halal hingga bulan Februari 2019. Padahal, legitimasi dari LPOOM MUI sangat diperlukan agar barang-barang hasil industri Vietnam dapat masuk ke pasar Indonesia sesuai syarat dan prasyarat yang telah ditetapkan. Lebih lanjut, Ir. H. Osmena Gunawan sebagai Wakil Ketua LPPOM MUI, dalam interviu mendalam, dengan tegas mengatakan bahwa sertifikasi halal dari Vietnam belum di-“*recognized*” alias belum diakui oleh Indonesia hingga 2019.

Untuk memahami bagaimana sebuah produk dari luar negeri, khususnya Vietnam, dapat memberikan jaminan halal sehingga dapat masuk ke pasar Indonesia, wajib bagi Vietnam memahami metodologi yang digunakan saat Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa di Indonesia. Selain itu, perlu untuk memahami tahapan penilaian

sebuah produk dari sebuah perusahaan hingga dikeluarkannya sertifikat halal MUI. Lebih jauh, kita melihat bagaimana posisi organisasi muslimin di Vietnam, apakah sudah dapat dikategorikan sebagai majelis ulama di Vietnam yang dapat menjadi perpanjangan tangan MUI di Indonesia atau perlu dukungan Komisi Dakwah dari MUI sebagai *advisory body* bagi organisasi muslimin di Vietnam ke depannya.

### 3.1 Metode Penetapan Fatwa MUI

Amin, M. (2017) dalam orasi ilmiahnya di Kementerian Agama UIN Maulana Malik Ibrahim, berjudul “Solusi Hukum Islam (*Makharij Fiqhiyyah*) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia”, mengatakan fatwa-fatwa DSN-MUI ditetapkan dan diputuskan dengan mekanisme dan tata cara yang tidak umum. Oleh karena itu, ada beberapa orang yang gagal paham terhadap fatwa DSN-MUI. Meskipun demikian, para ulama di DSN-MUI sangat bertanggung jawab dan percaya diri bahwa fatwa-fatwa DSN-MUI tersebut dikeluarkan berdasarkan aturan dan metodologi penetapan fatwa yang diatur dalam syariat Islam. Memang, agak sulit memahami fatwa-fatwa DSN-MUI hanya dengan menggunakan keilmuan standar. Hal ini karena banyak fatwa DSN-MUI yang menggunakan solusi hukum Islam atau *makharij fiqhiyyah* sebagai landasannya. Setidaknya, ada empat solusi fikih yang dijadikan landasan dalam menetapkan fatwa DSN-MUI, yaitu *al-Taysir al-Manhaji*, *Tafriq al-Halal ‘An al-Haram*, *l’adah al-Nadhar*, dan *Tahqiq al-Manath*.

Dua di antara keempat fikih yang telah disebutkan sesuai dengan kaidah halal dan haram di dalam Islam. Pertama adalah *Al-Taysir al-Manhaji*, dapat diartikan memilih pendapat yang ringan, namun tetap sesuai aturan. Meskipun mengambil pendapat yang lebih meringankan atau *at-taisir*, tetapi tetap dalam koridor *manhaj* yang ada. Artinya, fatwa DSN-MUI akan memberikan jalan keluar dengan memberikan solusi terbaik selama tidak bertentangan dengan syariat. Namun demikian, penggunaan metode tersebut tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau *al-mubalaghah fi al-taysir*. Hal itu tidak dibenarkan karena menimbulkan sikap meremehkan atau *al-tasâhul*.

Metode *Al-Taysîr al-Manhaji* dimaksudkan untuk menghindari fatwa disahkan tanpa mengikuti pedoman. Tidak jarang suatu masalah dijawab dengan fatwa yang meringankan, tetapi hanya mempertimbangkan aspek kemaslahatannya dan tidak mengindahkan aspek kesesuaian metodologinya atau *al-manhaj*. Dalam pandangan, hal itu tidak boleh dilakukan karena berpotensi terpesok dalam mencari hal-hal yang ringan atau *tatabbu' al-rukhas* yang dilarang dalam syariat Islam.

Kaidah berikutnya terkait dengan pemisahan antara harta halal dan nonhalal atau *at-tafriq baina al-halal wal haram*. Umumnya, orang memahami bahwa percampuran antara yang halal dan yang haram dimenangkan yang haram sesuai kaidah “apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, percampuran tersebut dihukumi haram” atau *idza ijtama' al-halal wa al-haram ghuliba al-haram*. Dalam pandangan DSN-MUI, kaidah tersebut tidak cocok diterapkan di bidang ekonomi. Kaidah tersebut lebih cocok diterapkan dalam bidang pangan, khususnya yang cair. Halal haram dalam bidang pangan terkait dengan bahannya atau *'ain* jika terjadi percampuran maka akan terjadi persinggungan dan persenyawaan yang sulit dipisahkan. Dalam kondisi seperti itu, kaidah “apabila bercampur antara yang halal dan yang haram, percampuran tersebut dihukumi haram” atau *idza ijtama' al-halal wa al-haram ghuliba al-haram* tepat diterapkan.

### 3.2 Prosedur Fatwa Halal MUI

Ada banyak tahapan yang perlu dilalui sebelum sebuah fatwa ditetapkan oleh MUI. Fatwa itu dapat dibuat karena amanah perundang-undangan, dapat pula atas permintaan masyarakat atau untuk menjawab suatu masalah yang ramai diperbincangkan di masyarakat. Berdasarkan *Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa* yang ditulis oleh Dr. H.M. Asrorun Ni'am Sholeh, M.A. selaku Sekretaris Komisi Fatwa MUI, metode penetapan fatwa dijabarkan sebagai berikut.

1. Sebelum fatwa ditetapkan, dilakukan kajian komprehensif untuk memperoleh deskripsi utuh tentang objek masalah (*tashawwur al-masalah*), rumusan masalah, serta dampak masalah keagamaan

yang ditimbulkan dan titik kritis dari berbagai aspek hukum (norma syariat) yang berkaitan dengan masalah tersebut.

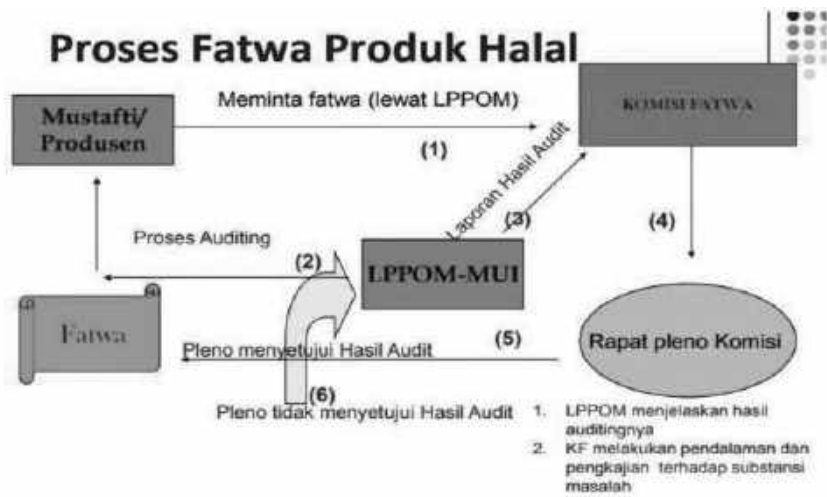
2. Kajian komprehensif mencakup telaah atas pandangan *fuqaha mujtahid* masa lalu, pendapat para imam mazhab dan ulama yang muktabar, telaah atas fatwa-fatwa yang terkait, serta pandangan ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan.
3. Kajian komprehensif, antara lain dapat melalui penugasan pembuatan makalah kepada anggota komisi atau ahli.

Selanjutnya, fatwa ditetapkan secara kolektif oleh suatu lembaga yang disebut Komisi Fatwa dan didasarkan pada Alquran, hadis, ijma, qiyas, dan dalil lain yang muktabar dengan mengikuti langkah-langkah berikut.

1. Masalah yang *ma'lum min al-din bi al-dlarurah* langsung difatwakan dengan menyampaikan hukum sebagaimana adanya.
2. Masalah yang terjadi perbedaan pendapat (*masail khilafiyah*) di kalangan mazhab maka
  - a. penetapan fatwa didasarkan pada hasil usaha pencapaian titik temu di antara pendapat melalui metode *al-jam'u wa al-tau-fiq*;
  - b. jika tidak tercapai titik temu, penetapan fatwa didasarkan pada hasil tarjih melalui metode *muqaranah* (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah *ushul fiqh muqaran*.
3. Masalah yang tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan mazhab atau ulama yang muktabar, didasarkan pada ijthad kolektif melalui metode *bayani* dan *ta'lili* (*qiyasi, istihsaniy, ilhaqiy, istihsaniy dan sad al-dzaraa'i*), serta metode penetapan hukum (*manhaj*) yang dipedomani oleh para ulama mazhab.
4. Dalam masalah yang terdapat perbedaan di kalangan peserta rapat dan tidak tercapai titik temu maka penetapan fatwa disampaikan tentang adanya perbedaan pendapat tersebut disertai dengan penjelasan argumen masing-masing, disertai penjelasan dalam hal pengamalannya, sebaiknya mengambil yang paling

hati-hati (*ihthyath*) serta sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat (*al-khuruuj min al-khilaaf*).

Sementara itu, penetapan fatwa produk halal dilakukan setelah adanya laporan hasil pemeriksaan (*auditing*) oleh Auditor Halal dan telah melalui proses evaluasi dalam Rapat Auditor LPPOM MUI. Laporan hasil audit, kemudian disampaikan oleh Direktur LPPOM MUI dalam Sidang Pleno Komisi. Dalam bidang yang memerlukan keahlian fikih secara khusus, seperti proses penyembelihan dan proses penyucian, Auditor Halal dalam menjalankan tugasnya disertai oleh Komisi Fatwa. Sertifikat Halal selanjutnya dikeluarkan oleh MUI setelah ditetapkan status kehalalannya oleh Komisi Fatwa MUI. Berikut skema proses fatwa produk halal.



Sumber: Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa (<http://mui.or.id>)

Gambar 3.1  
Skema proses fatwa MUI.

### 3.3 LPPOM MUI

Berdirinya LPPOM MUI bermula dari mandat pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia agar MUI mampu berperan aktif dalam meredakan gejolak yang terjadi di masyarakat Indonesia terkait kasus lemak babi pada tahun 1988. Pada tanggal 6 Januari 1989, didirikanlah

LPPOM MUI untuk dapat melakukan pemeriksaan dan memberikan sertifikasi halal. Kini, pada 2019, LPPOM MUI genap berusia 30 tahun sejak didirikan.



Sumber: LPPOM MUI 2019

Gambar 3.2. LPPOM MUI Milestone.

Untuk memperkuat posisi LPPOM MUI dalam menjalankan fungsi sertifikasi halal, pada 1996, ditandatangani Nota Kesepakatan Kerja Sama antara tiga lembaga, yaitu Departemen Agama, Departemen Kesehatan, dan MUI. Nota kesepakatan tersebut disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001 yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan atau audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal.

Dalam proses dan pelaksanaan sertifikasi halal, LPPOM MUI melakukan kerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta sejumlah perguruan tinggi di Indonesia,

antara lain Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka, Universitas Djuanda, UIN, Universitas Wahid Hasyim Semarang, dan Universitas Muslimin Indonesia Makassar. Sementara itu, kerja sama dengan lembaga lain yang telah terjalin, yaitu dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kadin Indonesia Komite Timur Tengah, GS1 Indonesia, dan Research in Motion (Blackberry). Khusus dengan BPOM, sertifikat halal MUI merupakan persyaratan dalam pencantuman label halal pada kemasan untuk produk yang beredar di Indonesia.

Kini, pada usianya yang ke-30 tahun, LPPOM MUI menjadi lembaga sertifikasi halal pertama dan terpercaya di Indonesia dan semakin menunjukkan eksistensinya sebagai lembaga sertifikasi halal yang kredibel, baik di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini dibuktikan pada 2017 dan 2018, LPPOM MUI memperoleh sertifikat akreditasi SNI ISO/IEC 17025: 2008 untuk Laboratorium Halal dan SNI ISO/IEC 17065:2012 serta DPLS 21 untuk lembaga sertifikasi halal dari Komite Akreditasi Nasional (KAN). Standar ini tidak hanya diakui di Indonesia, tetapi juga diakui oleh Badan Akreditasi Uni Emirat Arab (ESMA).

### **3.4 Negara dan Lembaga Halal Asing Mitra LPPOM MUI**





















Pada Januari 2019, LPPOM MUI bekerja sama dengan berbagai pihak. Lembaga ini juga telah membangun dan meresmikan laboratorium halal di dua lokasi, yaitu di Kawasan Industri Modern Cikande, Banten, dan di Kawasan Deltamas, Cikarang, Jawa Barat. Kedua laboratorium halal tersebut diharapkan dapat semakin meningkatkan layanan LPPOM MUI kepada kalangan industri yang memerlukan jasa laboratorium. Kini, sistem sertifikasi dan sistem jaminan halal yang dirancang dan diimplementasikan oleh LPPOM MUI telah diakui, bahkan diadopsi oleh lembaga-lembaga sertifikasi halal luar negeri (LPPOM MUI, 2019).










Tabel 3.1  
Negara dan Lembaga Halal Asing Mitra LPPOM MUI.

No.	Negara	Lembaga	Kategori			Status
			Slaughtering	Raw Material	Flavor	
1	Singapura	MUIS (Majelis Ulama Islam Singapore)				Expired 2020/06/08
2	Malaysia	JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia)				Expired 2020/06/08
3	Brunei Darussalam	Bahagian Kawalan Makanan Halal Jabatan Hal Ehwal Syariah				Expired 2020/06/08
4	Jepang	MPJA (Muslim Professional Japan Association)				Expired 2019/06/06
5		JMA (The Japan Moslem Association)				Expired 2020/09/28
6	Taiwan	THIDA (Taiwan Halal Integrity Development Association)				Expired 2020/09/27
7	India	Jamiat Ulama Halal Foundation				Expired 2020/06/08
8		Jamiat Ulama I-Hind Halal Trust				Expired 2020/06/08
9	Hongkong	APHC (Asia Pacific Halal Council Co Ltd)				Expired 2019/10/02
10	Thailand	CICOT (The Central Islamic Council of Thailand)				Expired 2020/09/27

11	Vietnam	HCA (Halal Certification Agency)				Expired 2019/05/26
12	Filipina	HDIP (Halal Development Institute of the Philippines)				Expired 2019/05/26
13	Sri Lanka	Halal Accreditation Council (Guarantee) Limited				Expired 2019/05/26
14	Australia	ICCV (The Islamic Coordinating Council of Victoria)				Expired 2020/06/08
15		SICHMA (Supreme Islamic Council of Halal Meat in Australia Inc)				Expired 2020/09/27
16		AHDAA (Australian Halal Development & Accreditation)				Expired 2019/08/31
17		GHTC Pty.Ltd (Global Halal Trade Center Pty. Ltd)				Expired 2020/08/07
18		WAHA (Western Australian Halal Authority)				Expired 2020/08/08
19		AHAA (Australian Halal Authority & Advisers)				Expired 2020/09/12
20			GAHC (Global Australian Halal Certification)			

21	<b>New Zealand</b>	(APHSNZ-Pty 2011 Ltd) Asia Pacific Halal Service - New Zealand, Pty 2011 Limited				<i>Expired</i> 2020/06/08
22		NZIDT (New Zealand Islamic Development Trust)				<i>Expired</i> 2020/09/27
23		FIANZ (The Federation of Islamic Association of New Zealand, Inc)				<i>Expired</i> 2019/10/02
24	<b>Belgia</b>	HFCE (Halal Food Council of Europe)				<i>Expired</i> 2020/09/28
25	<b>Polandia</b>	MRU (The Muslim Religious Union of Poland)				<i>Expired</i> 2020/06/08
26	<b>Belanda</b>	HQC (Halal Quality Control)				<i>Expired</i> 2020/06/08
	<b>Jerman</b> (Osnabrueck)					
	<b>Jerman</b> (Darmstadt)					
	<b>Denmark</b>					
27	<b>Spanyol</b>	Instituto Halal De Junta Islamica (Halal Institute of Spain)				<i>Expired</i> 2020/09/28
28	<b>Italy</b>	WHA (World Halal Authority)				<i>Expired</i> 2019/05/26
29	<b>Belanda</b>	TQHCC (Total Quality Halal Correct Certification)				<i>Expired</i> 2019/06/06

30		(HFFIA) (Halal Feed and Food Inspection Authority)				<i>Expired</i> 2018/07/18
31	Jerman	Halal Control				<i>Expired</i> 2018/08/02
32	Inggris	HCE  (Halal Certification Europe)				<i>Expired</i> 2020/09/27
33		(HFA)–UK  Halal Food Authority				<i>Expired</i> 2019/05/26
34	Swiss	HCS  (Halal Certification Services)				<i>Expired</i> 2020/09/27
35	Turki	Eurasia Halal Services Centre				<i>Expired</i> 2019/10/02
36		HAFA Halal Certification and Food Imp&Exp Ltd				<i>Expired</i> 2019/06/08
37	Republik Irlandia	IFI  (Islamic Foundation of Ireland)				<i>Expired</i> 2020/09/11
38	Amerika Serikat	ISA  (Islamic Services of America)				<i>Expired</i> 2020/09/27
39		Halal Transaction of Omaha				<i>Expired</i> 2020/06/08
40		IFANCA  (The Islamic Food and Nutrition Council of America)				<i>Expired</i> 2020/06/08
41		HFC USA  (Halal Food Council USA)				<i>Expired</i> 2020/09/27
42		AHF  (American Halal Foundation)				<i>Expired</i> 2020/09/27

44	Brasil	FAMBRAS (Federation of Muslims Associations in Brazil)				Expired 2020-09-12
45		CDIAL  (Islamic Dissemination Centre for Latin America Brazil)				Expired 2020/09/27
46	Afrika Selatan	NIHT  (National Independent Halal Trust) South Africa				Expired 2019/05/26

Sumber: LPPOM MUI, 2019

### 3.5 Kriteria dan Persyaratan untuk Badan Sertifikasi Halal dari Negara Asing

Keputusan Rapat Koordinasi Nasional MUI mengenai Produk Halal pada tahun 2003 ditetapkan pada 15 Oktober 2009 di Jakarta. Keputusan tersebut, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai *The Decree of the National Coordination Meeting between the Indonesian Council of Ulama (MUI) Concerning Halal Products, Year 2003*. Dengan adanya keputusan mengenai produk halal tersebut, kita dapat memahami sistem sertifikasi dan jaminan halal yang dirancang serta diimplementasikan oleh LPPOM MUI dan yang telah diakui, bahkan diadopsi oleh banyak lembaga sertifikasi halal luar negeri.

Ditetapkan tujuh kriteria bagi negara asing yang ingin mengeksport produknya ke Indonesia dengan label sertifikasi halal MUI (termasuk Vietnam), sebagai berikut.

1. Lembaga sertifikasi yang melakukan penilaian makanan halal, obat-obatan, dan kosmetik harus didirikan oleh dan/atau di bawah organisasi Islam yang sah/pusat Islam yang memikul tugas utama untuk mendidik umat Islam sesuai dengan aturan Islam dan menyediakan fasilitas untuk salat dan pendidikan Islam. Organisasi Islam didukung oleh umat Islam di suatu wilayah atau wilayah tertentu di luar negeri yang populasinya paling sedikit 40 orang.

2. Organisasi Islam ini akan memiliki kantor permanen yang dikelola dengan tepat di bawah dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan kredibel.
3. Organisasi Islam akan memiliki komisi fatwa (*ifta'*) yang berfungsi untuk menetapkan status halal dan sekelompok ilmuwan yang akan menjadi *auditor* halal. Komisi fatwa tersebut harus terdiri atas minimal tiga ulama atau ilmuwan muslim yang memiliki pengalaman dalam hukum Islam dan memiliki kompetensi untuk mengeluarkan fatwa atau keputusan. Di luar kelompok ilmuwan, minimal dua ilmuwan harus memiliki kemampuan untuk melakukan pemeriksaan di rumah potong hewan (RPH), restoran, industri atau pabrik, dan pengolahan, serta industri tambahan.
4. Lembaga sertifikasi harus memiliki *standard operating procedure* (SOP) untuk proses sertifikasi. SOP tersebut harus memuat setidaknya pendaftaran, administrasi, dan pemeriksaan produksi pabrik, hasil audit, dan pertemuan komisi fatwa.
5. Semua fail administrasi (formulir pendaftaran, laporan, data perusahaan, dan fail lainnya) dari organisasi Islam harus diatur dalam sistem yang baik yang akan memudahkan penelusuran ke perusahaan yang disertifikasi.
6. Badan tersebut harus memiliki jejaring yang luas, khususnya dengan Dewan Makanan Halal Dunia.
7. Mampu berkolaborasi dengan MUI untuk mengatur kegiatan keperawatan dan pemantauan produk halal di Indonesia.

Dari sisi pemahaman para konsumen, juga sangat penting untuk memperoleh informasi sejak awal terkait kriteria yang wajib diketahui dalam menilai produk halal yang akan dipilihnya. Kriteria tersebut tidak hanya merujuk pada komposisi yang ada di dalam makanan dan minuman yang akan dipilih, tetapi juga sumber bahan yang dipakai, cara pengolahan, pengemasan, hingga logistiknya.

Sari dan Sudrajat (2013) menyebutkan bahwa dengan adanya label halal tersertifikasi, selain memberikan rasa aman, juga memberikan kenyamanan di benak dan hati konsumen muslimin. Selain itu,

label halal tersertifikasi itu sendiri akan meningkatkan keuntungan produsen. Dengan kata lain, muslimim akan lebih memilih produk yang berlabel halal tersertifikasi daripada produk yang belum tertera label halal tersertifikasi. Sementara itu, Rachmat (2013) mengungkapkan bahwa motivasi konsumen dalam membeli produk dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keadaan sosial, budaya, psikologis, dan faktor pribadi dari konsumen itu sendiri.

Menurut LPPOM MUI (2019), masyarakat secara berkelanjutan perlu memperoleh pemahaman dasar terkait bahan baku dan bahan tambahan dari seluruh bahan yang digunakan untuk menghasilkan produk dan/atau yang menjadi bagian dari komposisi produk (*ingredient*), termasuk bahan penolong saat produk terbentuk yang seringkali terabaikan. Bahan penolong adalah bahan yang digunakan untuk membantu pembuatan produk, namun tidak menjadi bagian dari komposisi produk. Sebagai contoh, bahan tidak boleh berasal atau yang mengandung babi dan turunannya, minuman beralkohol (*khamr*), turunan *khamr* yang diperoleh hanya dengan pemisahan secara fisik, darah, bangkai, dan bagian apa pun dari tubuh manusia. Lebih lanjut, bahan yang digunakan tidak dihasilkan dari fasilitas produksi yang juga digunakan untuk membuat produk yang menggunakan babi atau turunannya dan bahan tidak bercampur dengan bahan haram atau najis. Bahan hewani pun harus berasal dari jenis hewan halal, yaitu jenis hewan yang harus disembelih dan harus dibuktikan penyembelihan-nya sesuai dengan syariat Islam. Penyembelihan halal dapat dibuktikan melalui sertifikat halal MUI, sertifikat dari lembaga yang sertifikat halalnya dapat diterima, atau diaudit langsung oleh LPPOM MUI.

Mengenai persyaratan alkohol (etanol), harus tidak berasal dari industri minuman beralkohol. Sementara itu, aturan penggunaan alkohol meliputi berikut ini.

1. Kadar alkohol pada produk akhir tidak terdeteksi.
2. Kadar alkohol pada produk *intermediet* (produk yang tidak dikonsumsi langsung) tidak lebih dari 1 persen.
3. *Flavor* dengan etanol lebih dari 1 persen dapat digunakan pada produk akhir jika bahan-bahan halal dan *flavor house* disertifikasi halal MUI.

4. Hasil samping industri *khamr* yang berbentuk cair dan hanya diperoleh secara fisik tidak boleh digunakan.
5. Hasil samping industri *khamr* atau turunannya yang berbentuk padat, misalnya *brewer yeast*, boleh digunakan setelah dicuci sesuai syariat (*tathhir syar'an*).
6. Hasil samping industri *khamr* atau turunannya dapat digunakan jika bahan/produk telah direaksikan lebih lanjut sehingga menghasilkan senyawa baru, dan reaksi yang dapat dilakukan secara kimiawi atau biotransformasi.

Lebih lanjut, persyaratan produk mikrobial meliputi berikut ini.

1. Produk tidak menyebabkan infeksi dan intoksikasi pada manusia.
2. Media pertumbuhan, bahan aditif, dan bahan penolong tidak mengandung bahan yang berasal dari babi atau turunannya.
3. Untuk produk mikrobial yang diperoleh tanpa pemisahan dari media pertumbuhannya, media pertumbuhan harus menggunakan bahan yang suci dan halal.

Adapun, pemahaman tentang produk mikrobial yang diperoleh dengan pemisahan dari media pertumbuhan yang menggunakan bahan haram dan najis selain babi dan turunannya harus dilakukan penyucian sesuai kaidah atau syariat (*tathhir syar'an*), produk mikrobial yang menggunakan mikroba rekombinan, dan yang terpenting tidak boleh menggunakan gen dari babi atau manusia.

### 3.6 Tujuh Lembaga Sertifikasi Halal Vietnam

Di Vietnam, ada tujuh lembaga sertifikasi halal. Ketujuh lembaga tersebut, dua berada di Kota Hanoi, empat berada di Ho Chi Minh City, dan satu berada di Provinsi An Giang dengan perincian dalam tabel berikut.

Tabel 3.2  
Tujuh lembaga sertifikasi halal di Vietnam.

Hanoi
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Halal Certification Agency (HCA)</li> <li>2. Halal Vietnam</li> </ol>



Ho Chi Minh City
3. Halal Authority Vietnam (HAV)
4. Halal Vietnam Certification Service
5. International Halal Certification Organization Vietnam
6. Islamic Community of Ho Chi Minh City
Provinsi of An Giang
7. Islamic Community of An Giang Province

*Sumber: Diolah oleh Penulis (2018)*

Dari ketujuh lembaga sertifikasi halal yang ada di Vietnam, penulis dan rombongan hanya mengunjungi tiga lembaga, yaitu Halal Certification Agency (HCA) di Hanoi, Halal Vietnam di Hanoi, dan Halal Authority Vietnam (HAV) di Ho Chi Minh City. Berikut penjelasan ketiganya.

HCA di Hanoi adalah lembaga sertifikasi Vietnam yang resmi mewakili pemerintah Vietnam. Lembaga ini beralamat di Suite 402 Dinh Le Building, Tran Dang Ninh, 123B Hanoi, Hanoi, Vietnam, dengan nomor telepon 0084462693741 dan nomor faksimile 0084462671285. Pimpinan utama HCA adalah seorang muallaf bernama Mr. Hajj (singkatan haji) Mohammed Omar Tran Xuan Giap.



*Sumber:*

<https://www.halal.vn>

Gambar 3.3

Logo Halal Certification Agency (HCA).

HCA juga memiliki dua kantor cabang lainnya di Vietnam, yaitu di Ho Chi Minh City dan di Can Tho. Kedua lembaga ini dibentuk untuk memperluas jangkauan pelayanan

sertifikasi halal di Vietnam. Cabang di Ho Chi Minh City beralamat di Jalan E1-12A Block A, Sky Centre, No. 10 Pho Quang, Ward 2, Tan Binh District, dengan nomor telepon 02835471152 dan nomor faksimile 02835471162. Sementara itu, cabang yang berada di Can Tho beralamat di 11B Hoa Binh Avenue, Ninh Kieu District, Can Tho, dengan nomor telepon 00847103819990 dan nomor faksimile 00847103819991.

HCA dipilih oleh pemerintah Vietnam untuk mewakili secara resmi industri halal dari Vietnam. Lembaga ini juga bertugas untuk menjalin hubungan bilateral maupun multilateral dengan negara-negara asing tujuan ekspornya sesuai dengan tupoksi yang telah dijelaskan di dalam pembagian tugas di Ban Tồn Giáo Chính Phủ. Sementara itu, dalam menjalankan fungsinya, HCA memegang kode etik dengan menjaga perlindungan atas keimanan muslimin di Vietnam dan dunia, integritas atau kejujuran, dan profesionalisme.



Sumber: Dokumentai Penulis (2018)  
Gambar 3.4 Kunjungan ke HCA di kota Hanoi.

Untuk menjaga kredibilitasnya, HCA telah mengerakreditasi lembaganya kepada beberapa lembaga sertifikasi halal di beberapa negara lainnya. Selain kepada LPPOM MUI di Indonesia pada tahun 2017, HCA melakukan akreditasi kepada JAKIM Malaysia pada tahun 2013, GAC-GCC Accreditation Centre pada tahun 2017, dan ESMA–Emirate Authority Standardization and Metrology pada tahun 2017.

Haji Mohammed Omar Tran Xuan Giap dan Haji Abdullah Osman Bao Van Trung adalah dua orang perwakilan HCA yang dikirim pada tahun 2013 untuk belajar tentang proses halal di Indonesia. Menurut informasi yang diperoleh dari LPPOM MUI (2019), mereka memperoleh materi pembelajaran berikut ini ketika belajar di Indonesia.

1. *The Role of Fatwa in Halal Certification*
2. *Halal Guidelines for Materials*
3. *From Fatwa to Halal Standard*
4. *Policies and Procedural of Halal Certification*

5. *Halal Assurance System*
6. *Requirement for Halal Slaughterhouse Critical Control Point for Animal Sources Materials*
7. *Critical Points of Microbial Source Materials*
8. *Audit Simulations for Factories*
9. *Critical Points of Plants Source Material and Miscellaneous*
10. *Critical Points for Cosmetics*
11. *Drugs and Vitamins*
12. *Critical Points of Flavor*
13. *Documentation and Implementation of HAS*
14. *Halal Auditing Techniques*

Selain dengan LPPOM MUI, HCA Vietnam juga bekerja sama dengan Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) dan Central Islamic Committee of Thailand (CICOT). Selain itu, HCA Vietnam juga terdaftar sebagai anggota dari World Halal Food Council (WHFC) yang merupakan perhimpunan lembaga sertifikasi halal di seluruh dunia yang dibentuk pada tahun 1999 di Jakarta. WHFC bertujuan untuk membangun visi bersama dalam menerapkan standar sertifikasi halal. Terkait dengan struktur organisasi HCA, dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3.5  
Struktur Organisasi HCA.

Sumber: HCA Vietnam, 2018

Berikut perincian nama-nama yang bertanggung jawab dalam mengisi posisi pada divisi tersebut.

- **Sharia Board**

1. H. Imam Abdul Salam
2. H. Imam Abdul Halim–Dao Duy Anh

3. H. Mohammad Arifin
4. H. Laysi Abidine
- \* Haji Imam Abdul Salam sebagai ketua Sharia Board kami jumpai beberapa kali. Terakhir, kami mengundang beliau untuk makan malam bersama di Restoran Batavia Hanoi (Instagram @BataviaHanoi) atas sponsor Bapak Azhar Rizal, sang pemilik yang juga merupakan staf lokal KBRI Hanoi. Saat kami melakukan interviu mendalam, beliau memberikan beberapa masukan signifikan bagi penelitian yang dilaksanakan terkait dengan situasi serta kondisi dalam struktur organisasi halal di HCA Hanoi.



Gambar 3.6  
Makan malam  
bersama Haji Imam  
Abdul Salam.

*Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)*

- **Certification Board**

1. H. Mohammed Omar, M.A.
2. H. Abdulkadir Osman, B.Sc.
3. Mohamach Asnaquy, B.Sc.
4. Haphiro, B.Sc.
5. Mina, B.Sc.
6. Sani, B.Sc.

- **Advisory Board**

1. Dr. Hamzah Mohammad Salleh (alumni dari IIUM, Malaysia)
2. Abdul Aziz Mohammad–Halal Excellence Centre
3. Ahmad Shanizam Abdul Gani–Matrade

- **Admin Division**

1. Hanifah Aisyah, B.A.
2. Doan Thi Tuyet, B.A.

- **Training Division**

1. H. Mohamed Omar, M.A.
2. Tran Anh Tuan, B.A.

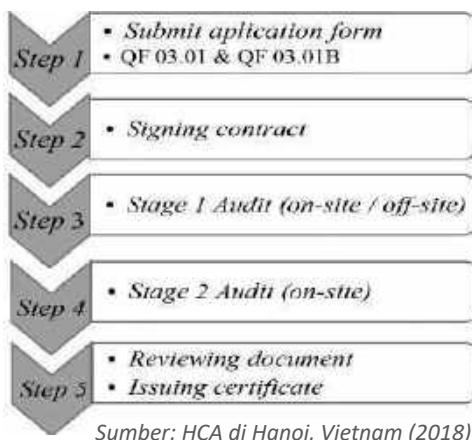
• **Technical Division**

1. Dr. Truong Huong Lan  
Head of Food Technology and Nutrition Department–FIRI MOST
2. Dr. Vu Dinh Tien  
Doctor of Chemical Process Engineering Head of Chemical Process Equipment School of Chemical Engineering, Hanoi University of Science and Technology

• **Certification Division**

1. Le My Hanh, M.A.
2. Trans Ba Dan, B.A.
3. Nguyen Thi Tra My, B.A.

Dalam melaksanakan fungsi dakwahnya, HCA Vietnam juga melakukan kegiatan sosial semacam kursus bahasa Arab dan kelas membaca Alquran. Selain itu, lembaga ini memberikan perhatian penuh kepada yang kurang beruntung dengan menyumbangkan dana senilai USD 8.000–10.000. Dana tersebut disumbangkan, misalnya untuk beasiswa pendidikan dan sedekah di bulan Ramadan kepada keluarga prasejahtera di Vietnam.



Gambar 3.7  
Alur Penyertifikasian di HCA.

Halal Vietnam di Hanoi (HVN) berbasis di Masjid Al Noor Hanoi. HVN dipimpin langsung oleh imam masjid Al Noor Haji Mieu Abbas. Haji Mieu Abbas adalah seorang etnis Champa asal selatan Vietnam yang menikah dengan seorang perempuan asal Hanoi yang mualaf. Setelah menikah, keduanya memutuskan untuk tinggal di Kota Hanoi.

HVN bertujuan untuk mempromosikan makanan halal di Vietnam. HVN didirikan oleh komunitas Islam Vietnam pada tahun 2010 yang melayani sertifikasi produk untuk industri makanan, kosmetik, penyembelihan daging dan unggas, bahan kemasan dan bahan kimia, produk *re-branding*, obat-obatan, restoran, dan hotel. Selain itu, layanan lain yang diberikan lembaga ini kepada masyarakat sebagai berikut.

1. Sebagai pusat informasi yang memberikan layanan tanya jawab untuk konsumen dan pelaku bisnis halal.
2. Memberikan panduan bagi komunitas muslimin Vietnam tentang syariat Islam dan bagaimana mempraktikkannya.
3. Memberikan perlindungan kepada konsumen halal Vietnam.
4. Mengikuti tren yang berkembang di masyarakat dengan membuat situs peramban dan media sosial lainnya.
5. Melayani jasa konsultasi panduan belajar ke luar negeri di negeri-negeri Islam.
6. Menjembatani beasiswa ke luar negeri untuk muslimin Vietnam.



Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)  
Gambar 3.8. Ha Noi Muslim Community



Sumber: <https://www.halal.vn> (2018)  
Gambar 3.9 Logo Halal Authority.

HVN juga membantu konsumen dalam menjawab seputar pertanyaan halal. Lembaga ini juga menyediakan jasa konsultasi yang berkantor pusat di Hanoi dan kantor di komunitas Islam Vietnam yang menawarkan jaringan pemasaran untuk negara-negara Arab dan Asia.

Kantor HVN di Hanoi beralamat di Jalan 4/67 An Dao C, Trau Quy town, Gia Lam district I, Hanoi, Vietnam dengan nomor telepon +84 43266 5095 dan +84 93622 0768. Sementara itu, kantor HVN di Ho Chi

Minh City beralamat di Jalan L14-08B, 14th floor, Vincom Centre 72 Le Thanh Ton Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

HVN mengklaim bahwa produk bersertifikasi halal dari HVN banyak dijual di luar negeri. Sertifikat halal HVN juga diterima oleh semua negara muslim dan daerah pengimpor halal sebagai agen sertifikasi halal terkemuka di Vietnam. Sayangnya, Indonesia belum mengakui HVN. Dalam arti, halal HVN belum diakui di Indonesia oleh LPPOM MUI. Namun demikian, HVN menyatakan bahwa tim profesionalnya terdiri atas para cendekiawan dan ulama, teknisi makanan, dan profesional terkait lainnya di bawah bimbingan International Halal Integrity Alliance (IHIA) yang beralamat di C-10-3A Oasis Centum, No.2, Jalan PJU 1 A/2 Ara Damansara, 47301, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia.



Gambar 3.10  
Bersama Pimpinan HAV Haji  
Basiroh Abdullah, Ph.D.

*Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)*

Halal Authority Vietnam (HAV) yang berada di Ho Chi Minh City ini merupakan satu dari tujuh lembaga sertifikasi Vietnam yang paling meninggalkan kesan tertentu bagi penulis. Pimpinan HAV adalah Haji Basiroh Abdullah, Ph.D. Haji Basiroh Abdullah adalah seorang muslim etnis Champa asal Phan Rang, Vietnam. Selain fasih berbahasa Melayu, beliau seorang doktor lulusan Islamic International University Malaysia (IIUM) dalam bidang ilmu linguistik bahasa Arab dan menempuh S-1 dan S-2 di Madinah, Saudi Arabia dalam bidang agama Islam.

Haji Basiroh Abdullah juga baru menjabat sebagai Presiden Muhammadiyah Cabang Vietnam yang berafiliasi dengan PP Muhammadiyah yang berada di Yogyakarta pada tahun 2018 lalu.

Kondisi ini merupakan suatu yang dapat dikatakan sangat langka bagi kelompok masyarakat muslimin etnis Champa dalam hal berpendidikan tinggi di Vietnam. Hal lain adalah posisi yang dijabat oleh beliau dalam usianya yang relatif masih sangat muda. Yang menarik, Bibi Zaenab, istri dari Haji Basiroh Abdullah, ternyata memiliki darah Indonesia dari Padang, Sumatra Barat dari pihak ibunya.

Sebagai informasi, Kota Phan Rang di Vietnam merupakan sebuah kota pertahanan terakhir dari Kerajaan Muslim Champa (yang salah seorang putrinya menikah dengan raja di Jawa) dari serbuan bangsa Viet Ninh dan menduduki wilayah Champa sejak 600 tahun lalu. Kota ini berada di selatan Vietnam sekitar 600 kilometer dari arah Ho Chi Minh City.

Kantor HAV berada di Jalan Lau 3, 53 Ho Hao Hon, P.Co Giang, Q.1, Ho Chi Minh City, Vietnam. HAV berdiri pada tahun 2015, persis setahun setelah Haji Basiroh Abdullah selesai menempuh pendidikan dan memperoleh gelar Ph.D. pada tahun 2014. Namun demikian, HAV mulai resmi beroperasi pada tahun 2017. Oleh karena itu, lembaga ini masih sangat baru sehingga Haji Basiroh Abdullah “menyapa” pihak Indonesia melalui jaringan ke-Muhammadiyah-an yang dimilikinya. Dengan demikian, terbuka bentuk kerja sama yang sinergis antara Indonesia–Vietnam bersama HAV dalam bidang sertifikasi halal.



Gambar 3.11  
Halal Authority yang beralamat di Jalan Lau 3, 53 Ho Hao Hon, P.Co Giang, Q.1, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)

Kantor HAV berdiri di atas sebuah bangunan besar di antara jajaran bangunan pertokoan dan restoran di wilayah ramai di Ho Chi Minh City, menjadi satu dengan tempat tinggal sekaligus restoran



halal “Kedai Samsudin” yang dikelola oleh keluarganya. Bangunan terdiri atas empat lantai. Lantai pertama digunakan sebagai restoran halal Kedai Samsudin yang sekaligus menjual beragam kerajinan tangan asli Vietnam berupa seni pahat kayu isi kulit kerang mutiara dalam desain kaligrafi Islam. Lantai kedua digunakan sebagai kantor HAV dan ruang rapat dengan para tamu atau klien halal. Lantai ketiga dan keempat digunakan sebagai tempat tinggal dan musala besar.

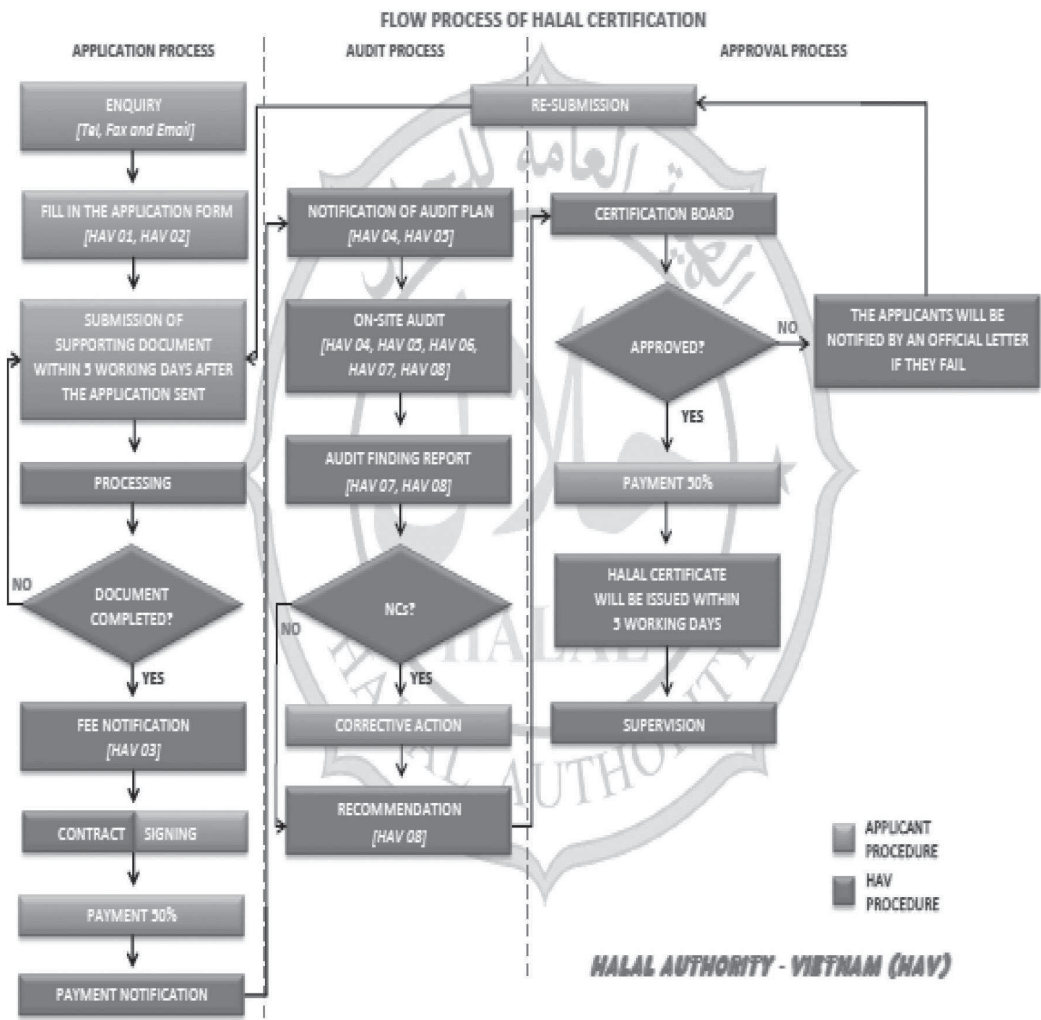
Sejauh yang telah dilakukan oleh HAV terkait sertifikasi halal meliputi makanan, minuman, barang konsumsi, dan pakan ternak. Beberapa produk makanan yang telah berhasil disertifikasi meliputi makanan segar, makanan kering, bubuk kaldu, dan kaldu beku. Ada juga buah-buahan, seperti wortel, bayam, labu, bawang merah, bawang putih, brokoli, kubis, daun bawang, tomat, cabai, lada, jahe, biji teratai, kacang hijau, kunyit, lemon, kubis, lobak, pisang, asparagus, dan kentang. Selain itu, mentega asal hewan, margarin asal nabati, minyak goreng, kue keju, chia biji basah, *matcha green tea*, berbagai kue brownies, ikan pangasius beku, dan lain sebagainya yang juga telah memperoleh sertifikasi halal.

Selain makanan, minuman yang telah mengantongi sertifikat halal, antara lain minuman sarang burung, *milk tea*, dan *grape fruit juice*. Barang konsumsi, seperti minyak esensial pomelo khusus, pomelo Attar, perawatan rambut dari minyak esensial pomelo, serta *animal feed*, misalnya *Choline chloride 60* persen *corn cob* atau tongkol jagung, *Choline chloride 75* persen sayuran, kalsium iodat anhidrat, kalium iodida, *Ethylenedianmine dihidroiodide*, dan lain sebagainya juga telah tersertifikasi halal.

Secara keseharian, Haji Basiroh Abdullah menyapa jemaahnya dengan berdakwah dari satu komunitas muslimin ke komunitas muslimin lainnya di seluruh Ho Chi Minh City, Vietnam tanpa lelah. Beliau juga beberapa kali diundang oleh KJRI Ho Chi Minh City untuk memberikan tausiah agama Islam dan menyampaikan kebenaran konsumsi halal sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alquran Surah al Baqarah ayat 168 karena kemampuannya dalam berbahasa Melayu dan Inggris.

Sistem peyertifikasian halal di HAV merujuk kepada JAKIM di Malaysia karena Haji Basiroh Abdullah lama menuntut ilmu di

IIUM Malaysia. Namun kini, ketika dirinya menjabat sebagai Presiden Muhammadiyah cabang Vietnam, beliau sedang belajar kepada LPPOM MUI untuk lebih memberikan kepastian jaminan halal kepada muslimin Vietnam di wilayah selatan yang berbasis etnis Champa dan lainnya. Dari hasil pembelajarannya di Malaysia, beliau pun membuat alur proses hingga memperoleh sertifikasi halal dari lembaga halal Vietnam seperti yang terlihat pada gambar berikut.



Sumber: Halal Authority Vietnam (2017)

Gambar 3.12 Flow Process of Halal Certification at Halal Authority Vietnam (HVA).

### 3.6.1 Halal di Vietnam Tanpa Fatwa Majelis Ulama?

Saat penulis melakukan interviu mendalam kepada Haji Mohammed Omar Tran Xuan Giap sebagai orang nomor satu di Halal Certification Agency (HCA) Hanoi, dia mengeluhkan sikap dan karakter LPPOM MUI. Menurutnya, LPPOM MUI dianggap sangat kaku terhadap produk industri dari Vietnam untuk bebas masuk ke pasar Indonesia. Kemudian, saya tanyakan kembali kepadanya terkait ketika kedua orang perwakilan HCA atas nama Haji Mohammed Omar Tran Xuan Giap (dirinya) dan Haji Abdullah Osman Bao Van Trung belajar tentang proses halal di Indonesia pada tahun 2013, apakah sudah lupa dengan materi yang telah disampaikan di dalam kelas pembelajaran halal LPPOM MUI yang dilaksanakan, bahwa hal penting yang harus dipenuhi adalah tiga poin teratas modul, yaitu *The Role of Fatwa in Halal Certification*, *Halal Guidelines for Materials*, dan *From Fatwa to Halal Standard*.

Sekalipun di dalam susunan *technical division* terdapat dua orang pakar ilmu teknologi pangan, yaitu Dr. Truong Huong Lan dari Head of Food Technology and Nutrition Department– FIRI MOST dan Dr. Vu Dinh Tien, seorang Doctor of Chemical Process Engineering dari Head of Chemical Process Equipment, School of Chemical Engineering, Hanoi University of Science and Technology, tidak serta merta dapat menggantikan posisi ulama yang dapat memberikan fatwa halal atas suatu produk atau barang atau jasa yang ditawarkan untuk pasar Indonesia. Lebih lanjut, LPPOM MUI juga memiliki kriteria dan persyaratan untuk badan sertifikasi halal dari negara asing sesuai dengan Keputusan Rapat Koordinasi Nasional Majelis Ulama Indonesia mengenai Produk Halal pada tahun 2003 dan ditetapkan pada 15 Oktober 2009 di Jakarta.

Sebagaimana telah dijelaskan pada halaman sebelumnya, ada tujuh kriteria untuk negara asing yang ingin mengekspor produknya ke Indonesia dengan label sertifikasi halal MUI (termasuk Vietnam di dalamnya). Ketika pihak lembaga penyertifikasian halal Vietnam tidak mampu untuk memenuhi prasyarat dari pemerintah Indonesia, khususnya LPPOM MUI, urusan ekspor impor produk industri halal dari Vietnam untuk masuk ke Indonesia akan menjadi terkendala.

### **3.6.2 Tawaran *Advisory Body* dari Komisi Dakwah MUI**

Saat interviu mendalam penulis kepada Ketua Komisi Dakwah MUI Ustaz K.H.M. Cholil Nafis, Ph.D., beliau mengatakan ketika urusan ekspor impor produk industri halal dari Vietnam untuk masuk ke Indonesia terkendala oleh hal yang bersifat teknis operasional keislaman, jikalau memang serius dimintakan secara G to G (lintas negara), pihak MUI bersedia menjadi *advisory body* bagi pemerintah Vietnam untuk menjembatani kesulitan yang dihadapi. Namun, semuanya dikembalikan lagi kepada pihak pemerintah Vietnam, apakah bersedia menerima saran dari Komisi Dakwah MUI atau menganggap apa yang sudah ada di Vietnam adalah hal yang lumrah. Hal ini mengingat HCA melalui jawaban Direkturnya Haji Mohammed Omar Tran Xuan Giap, misalnya, mereka merasa sudah cukup kredibel untuk urusan halal, ditambah pemerintah Malaysia melalui International Halal Integrity Alliance (IHIA) yang beralamat di C-10-3A Oasis Centum, No.2, Jalan PJU 1 A/2 Ara Damansara, 47301, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia, sudah menganggap apa yang dilakukan Vietnam sekarang ini sudah memenuhi standar halal.

### **3.7 Manajemen Halal dari LPPOM MUI di Indonesia dan JAKIM di Malaysia untuk Vietnam**

Adalah nama seorang muslimah etnis Champa asal Vietnam penerima beasiswa Islamic Development Bank (IDB) dari Kerajaan Saudi Arabia bernama Kho Di Dza dengan NIM F24098002, yang pada tahun 2014 lulus S-1 dari Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan Institut Pertanian Bogor (IPB), di Bogor. Kho Di Dza melakukan penelitian yang diberi judul “Mempelajari Sistem Sertifikasi Halal di Indonesia dan Malaysia, serta Pengembangan Model Sistem Sertifikasi Halal di Vietnam” yang kemudian penulis rujuk.

Sosok Kho Di Dza menjadi penting untuk dibahas karena tiga alasan. Pertama, yang diteliti oleh Kho Di Dza sangat sesuai dengan apa yang sedang penulis teliti. Kedua, yang bersangkutan adalah seorang muslimah asli Vietnam (sangat jarang muslimin Champa di Vietnam

dapat mencapai pendidikan tinggi apalagi di luar negeri dan seorang perempuan). Ketiga, muslimah asal Champa ini adalah sesama alumni IPB. Sayangnya, ketika berada di Vietnam, penulis belum beruntung berjumpa langsung dengannya untuk melakukan interviu mendalam guna melengkapi penelitian.



Gambar 3.13  
Kho Di Dza, muslimah etnis Champa asal Vietnam yang menyelesaikan studi S-1-nya di Institut Pertanian Bogor (IPB).

Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)

Penelitian Kho Di Dza memotret sistem sertifikasi halal di Indonesia dan Malaysia dalam kurun waktu 2013–2014 dengan fokus pada sertifikasi halal, sistem jaminan halal, Indonesia, Malaysia, dan Vietnam. Berikut isi abstraknya.

*“Sertifikasi halal untuk fasilitas produksi pangan, produk pangan, atau rumah pemotongan hewan adalah pemeriksaan terhadap manusia, praktik, dan produk-produk yang mematuhi hukum-hukum Islam oleh organisasi yang kompeten. Makanan bersertifikat halal umumnya memperoleh tanda khusus atau logo yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah diperiksa secara independen. Ada ratusan organisasi di seluruh dunia yang menawarkan jasa sertifikasi halal, namun definisi halal yang tepat tidak selalu sama. Perbedaan ini disebabkan oleh persepsi metode sertifikasi halal untuk satu organisasi tidak sama dengan organisasi yang lain. Tujuan pengkajian ini adalah menganalisis perbedaan sistem sertifikasi halal antara Indonesia dan Malaysia, serta ide pengembangan model sistem sertifikasi halal di Vietnam. Pengkajian ini dilakukan dengan mengobservasi secara langsung dan analisis doku-*

*men resmi dari lembaga sertifikasi halal. Observasi langsung dilakukan di LPPOM MUI di Indonesia. Dokumen resmi diperoleh dari kantor LPPOM MUI di Indonesia, BHH JAKIM di Malaysia, dan CBI HCMC di Vietnam serta dari website resmi mereka. Perbedaan sistem sertifikasi halal antara Indonesia dan Malaysia diamati pada proses sertifikasi halal dan sistem jaminan halal. Model sistem sertifikasi halal di Vietnam diusulkan untuk memasukkan struktur organisasi, sumber daya manusia, metodologi pelaksanaan, sistem jaminan halal, dan kebijakan umum.”*

- \* CBI adalah pusat informasi dan promosi impor dari negara-negara berkembang di Ho Chi Minh City (dahulu bernama Saigon), Vietnam.

Kesimpulan Kho Di Dza (2014) adalah sebagai berikut.

1. Terdapat perbedaan sistem halal antara Indonesia dan Malaysia yang terletak pada sistem sertifikasi halal, prosedur sertifikasi halal, dan sistem jaminan halal.
2. Terdapat perbedaan aturan dalam prosedur sertifikasi halal di Indonesia dan Malaysia, antara lain pendaftaran, *pre-audit*, audit, evaluasi pascaaudit, dan pengeluaran sertifikat halal.
3. Berdasarkan hasil pengkajian ini, dapat diketahui kondisi yang sesuai untuk perkembangan sistem sertifikasi halal di Vietnam.
4. Badan lembaga halal di Vietnam perlu bekerja sama dengan lembaga halal lain, menetapkan regulasi untuk produk halal, membangun sebuah struktur organisasi yang kuat, memiliki sumber daya manusia yang unggul, serta metodologi sertifikasi halal yang baik dan benar.

Selanjutnya, Kho Di Dza (2014) juga menyarankan hal-hal berikut.

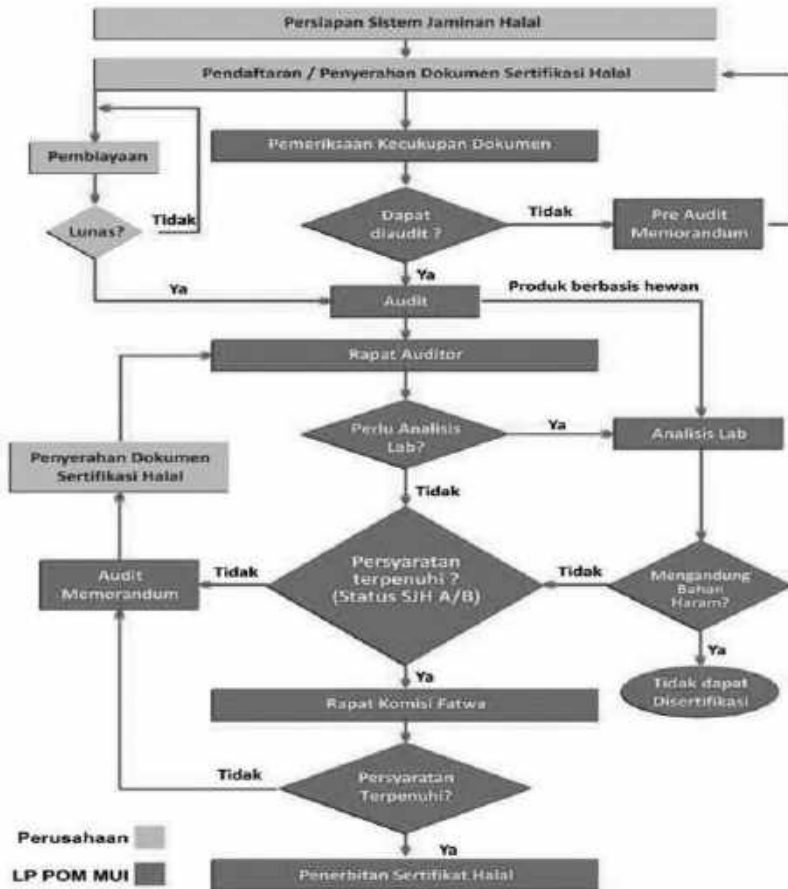
1. Diharapkan badan sertifikasi halal di Vietnam menambahkan penyusunan manual sistem jaminan halal yang sesuai dengan kondisi di Vietnam.
2. Diharapkan sebuah badan sertifikasi halal yang standar di setiap negara minoritas Islam untuk pengawasan yang lebih ketat dan

berkelanjutan terhadap produk sebagai upaya perlindungan konsumen dari segi keamanan serta kehalalannya.

3. Lembaga sertifikasi halal di Vietnam diharapkan bekerja sama serta dapat dukungan dari lembaga halal lain dan masyarakat seluruh dunia.
4. Pemerintah Vietnam hendaklah menetapkan regulasi halal untuk produk halal.
5. Kemudian, lembaga halal Vietnam perlu membangun sebuah organisasi yang terdiri atas direktur, wakil direktur lembaga sertifikasi halal, bidang *auditing*, bidang komisi fatwa, bidang sistem jaminan halal, bidang penelitian dan pengkajian ilmiah, bidang sertifikat dan logo halal, serta bidang sosialisasi dan informasi halal.
6. Setelah itu, lembaga halal di Vietnam harus memiliki tim *auditor* yang berpengalaman dan paham terhadap produk serta komisi fatwa dari pakar ulama Islam.
7. Lembaga halal Vietnam hendaklah menerapkan metodologi sertifikasi halal yang meliputi proses penerimaan pendaftaran, *pre-audit*, audit, rapat *auditor*, rapat komisi fatwa, pengeluaran sertifikat halal, serta pemeriksaan mendadak kepada perusahaan.
8. Badan halal di Vietnam dibutuhkan juga menyusun sebuah sistem jaminan halal untuk meyakinkan produk konsisten selama masa berlaku sertifikasi halal dan menentukan kebijakan umum untuk perusahaan pemohon sertifikat halal.

Kho Di Dza (2014) membandingkan alur sistem yang ada dari pemerintah negara, terkait manajemen halal yang ditelitinya sebagai berikut.

## 1. Indonesia, LPPOM MUI



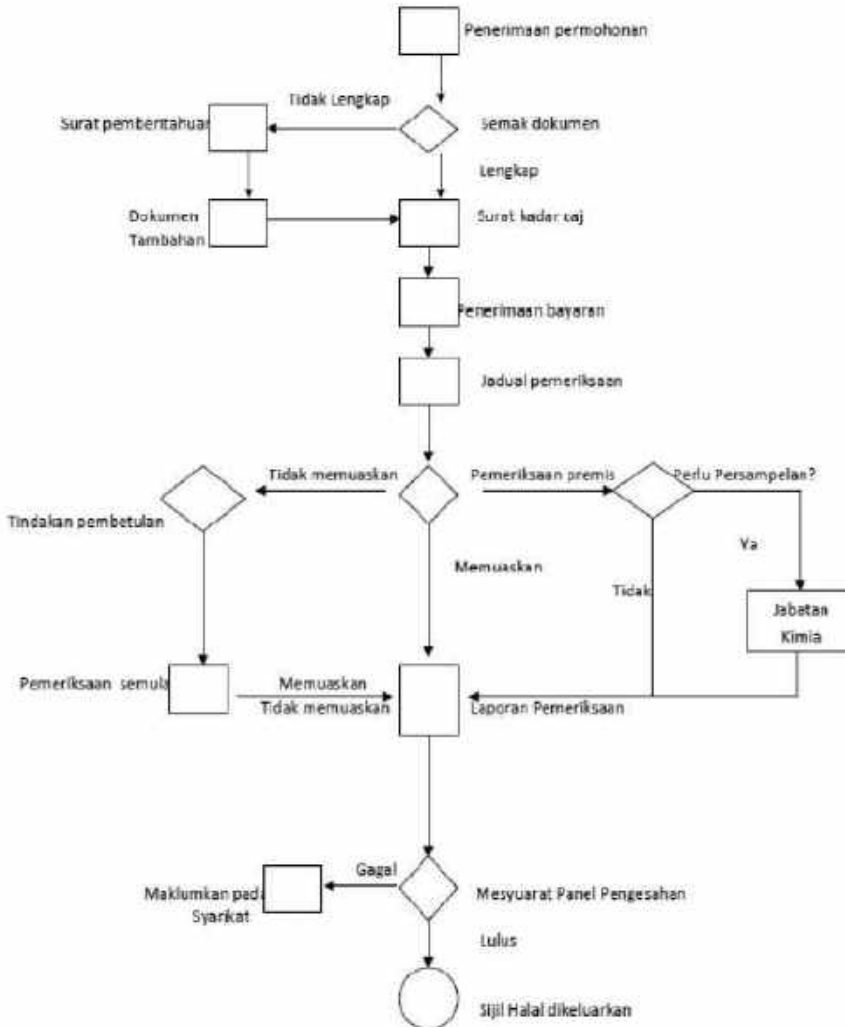
Sumber: LPPOM MUI (2014)

Gambar 3.14

Alur Sistem LPPOM MUI, Indonesia.



## 2. Malaysia, JAKIM



Sumber: Bahagian Halal JAKIM-Malaysia (2014)

Gambar 3.15

Alur Sistem JAKIM, Malaysia.

Dari kedua negara, Indonesia dan Malaysia yang dirujuk oleh Kho Di Dza (2014), dapat terlihat tingkat kesederhanaan proses penyerifikasian halal yang dipakai di Vietnam. Meski alur sistem yang dimiliki HAV terlihat sudah bagus, secara kelembagaan, HAV terhitung

baru karena baru beroperasi secara penuh pada tahun 2017. Lebih lanjut, Vietnam yang secara resmi menerbitkan *Appointment of Halal Certification Body* kepada Halal Certification Agency (HCA) yang berkedudukan di Kota Hanoi melalui Surat Keputusan dari pemerintah Vietnam sejak tanggal 26 Juli 2011 No. 631/TGCP-TGK, hanya mempercayakan kepada Haji Mohammed Omar Tran Xuan Giap dari HCA yang berkedudukan di Hanoi sebagai ujung tombak ekspor produk halal asal Vietnam ke mancanegara.

### 3. Proses sertifikasi halal di Commission Board of Islamic Community

Gambar 3.16  
Alur Sistem CBI HCM,  
Vietnam.



Sumber: Kho Di Dza dalam skripsinya di  
IPB, Bogor (2014)

#### in Ho Chi Minh City (CBI HCM)–Vietnam

Abdullah (2018) dalam bukunya yang berjudul *“Mere(i)butkan Sertifikasi Halal: Tanggung Jawab Negara terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Indonesia”*, menjelaskan temuannya khusus penyertifikasian halal Vietnam di Ho Chi Minh City saja,

bahwa perwakilan masyarakat Islam Ho Chi Minh City, dibangun secara kekuatan hukum dengan Surat Keputusan No. 28/QD-UB pada tanggal 7 Januari 1992, lalu pada tahun 1994 melakukan pertimbangan atas aplikasi sertifikasi halal. Selanjutnya, diadakan sebuah konferensi dan pertemuan untuk memperkenalkan sebuah lembaga pemberi sertifikat halal yang kemudian dinamakan Commission Board of Islamic Community in Ho Chi Minh City (CBI HCMC) untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat Islam Vietnam di Ho Chi Minh City. Lembaga ini juga melayani sitem pendaftaran sertifikasi halal secara daring (*online*), selain melalui faksimile dan pos.

Pada tahap *pre-audit*, CBI HCMC melakukan pemeriksaan dokumen yang diperlukan, kemudian pendaftaran perusahaannya, nama produk yang didaftarkan, daftar bahan yang digunakan, serta wajib melengkapi diagram alur proses produksinya. Pada tahap audit, CBI HCMC melakukan penjadwalan oleh tim *auditor* yang terdiri atas empat orang. Waktu untuk pemeriksaannya ditentukan kemudian, yang disusul oleh ketentuan pembayaran setelah CBI HCMC mengobservasi tempat produksi untuk pemeriksaan yang berdasarkan ketentuan di dalam Islam. Setelah pemeriksaan dilakukan, tim auditor akan menilai dan memberikan saran maupun peringatan terhadap pelaksanaan, yang mana perusahaan wajib mematuhi seluruh SOP produksi yang sesuai dengan syariat Islam.

Lembaga halal CBI HCMC tidak melakukan pertemuan pascaaudit di perusahaan. Oleh karena itu, CBI HCMC memiliki independensi terhadap hasil keputusan status halal sebuah produk berdasarkan hasil laporan atas pemeriksaan yang telah dilakukan. Dalam jangka waktu satu minggu, hasil pemeriksaan dari lembaga halal CBI HCMC secara resmi dikeluarkan.

Jangka waktu berlakunya hasil pemeriksaan di Vietnam hanya satu tahun (di Indonesia selama dua tahun) dan pemeriksaan secara random dan berkala akan dilakukan. Jika di dalam praktiknya, kemudian ditemukan adanya penyimpangan, CBI HCMC akan menarik kembali status halal pada produk yang pernah disertifikasi tersebut. Satu bulan sebelum jangka waktu status halal produk habis masanya,

wajib untuk mengajukan sertifikasi kembali sehingga status halal diperoleh untuk setahun ke depannya. CBI HCMC belum menyediakan laboratorium untuk pengujian sampel dengan produk yang *high risk*.

Dengan memahami posisi lembaga penyertifikasian halal di Vietnam seperti yang telah dijelaskan (yang masih belum harmoni dalam penatalaksanaannya dan masih banyak kekosongannya di sana-sini), ada baiknya bagi Indonesia untuk terus secara berkelanjutan mem-*benchmark* seluruh kegiatan ekspor halal Vietnam ke mancanegara. Caranya adalah dengan mempelajari bagaimana strategi yang dilakukan dan mencoba untuk secepat mungkin mengejar ketertinggalan kita dalam urusan kepastian jaminan produk halalnya. Sementara itu, bagi masyarakat muslimin Vietnam, sebagai pelaku dari proses penyertifikasian halal, harus lebih terbuka dengan seluruh masukan, terkait prasyarat dan syarat yang diajukan oleh LPPOM MUI jika ingin berhasil mengeksport produk halalnya ke Indonesia.



# BAB IV

## VIETNAM DAN INDONESIA



### 4.1 Pariwisata Halal di Vietnam

Vietnam adalah salah satu negeri di Asia Tenggara yang sangat agresif menawarkan potensi alam dan budaya yang melekat pada sejarah panjang perang di sana. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke negaranya, Vietnam mampu memoles dan menyuguhkan segudang destinasi. Dalam banyak bidang, keberhasilan Vietnam selalu membayangi Indonesia, terlebih saat ini, Vietnam menjadi sebagai salah satu negara tujuan wisata muslim di Asia Tenggara.

Terlepas dari keberhasilannya, pemerintah Vietnam hingga kini masih bertanya-tanya, mengapa masih sedikit turis Indonesia yang datang untuk berlibur ke negaranya. Dr. Ha Van Sieu selaku Vice Chairman Vietnam National Administration of Tourism Ministry of Culture, Sports and Tourism memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut bahwa setidaknya ada dua penyebab. Pertama, belum banyaknya pilihan penerbangan langsung dari Indonesia ke Vietnam. Kedua, yang paling krusial jaminan makanan halal. Van Sieu menyebutkan, pada 2016 lalu, terdapat sekitar 70.000 turis Indonesia datang ke Vietnam tiap tahunnya. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 10 persen dari tahun sebelumnya, ditarget sekitar 100.000 turis Indonesia akan datang ke Vietnam pada tahun-tahun mendatang.

Jika kita mencari informasi dari *Google* dengan mengetik kata dalam bahasa Indonesia “wisata halal Vietnam”, pencarian akan diarahkan langsung pada laman *searches related to wisata halal Vietnam* yang mencakup

1. *itinerary* wisata Vietnam;
2. *tour* paket Vietnam;
3. *tour* ke Vietnam;
4. *tour to Vietnam from* Indonesia;
5. *panorama tour* Vietnam;
6. paket *tour* Vietnam 2018;
7. Vietnam *tour*;
8. *tour guide* Indonesia di Vietnam.

Dalam waktu 0.71 detik, kita akan memperoleh hasil pencarian sebanyak 498.000 informasi dengan halaman utama dari yang paling atas hingga paling bawah, tertera berikut ini.

(1)

Paket Tour Vietnam Muslim 4D3N | Sentosa Wisata

<https://sentosawisata.com/paket-wisata-ho-chi-minh-vietnam-muslim/>

Feb 24, 2018 - Promo Paket Tour Vietnam Muslim 4D3N Makanan Halal Harga Murah mulai Rp 3jutaan. *Book Now* 087889375533 Wisata Ho Chi Minh 2018

(2)

Wisata Muslim di Ho Chi Minh City Vietnam - Fahmi Anhar

<https://fahmianhar.com/wisata-muslim-di-ho-chi-minh-city-vietnam/>

Jul 21, 2015 - Lokasi restoran halal dan masjid-masjid yang ada di Ho Chi Minh City Vietnam ada di sini. Semoga bermanfaat bagi yang akan wisata muslim di ...

(3)

Tidak Perlu Bingung Mencari Makanan Halal di Vietnam, Berikut ...

<https://lifestyle.okezone.com> › *Lifestyle* › *Food*

Jan 19, 2018 - Wajar bila turis muslim agak khawatir bila akan berlibur ke Vietnam meski negara ini memiliki banyak destinasi wisata alam dan budaya yang ...

(4)

WISATA MUSLIM 5 DAYS VIETNAM SPECIAL - Gardi Tour

<https://garditour.co.id> › *Wisata Muslim* › *Asia*

SKU: GAT/026/05D-HAN/SS/18 Categories: Asia, Wisata Muslim Tags:

Asia, paket *tour*, paket *tour* Asia, paket *tour* Vietnam special, Vietnam, wisata halal, wisata ...

(5)

80 % Penduduk Komunis, Vietnam Buka Destinasi Wisata Halal ...

<https://www.gomuslim.co.id/.../80-penduduk-komunis-vietnam-bu...>

Jul 29, 2016 - Vietnam, inilah destinasi wisata halal yang unik. Pertama kali kita akan mendatangi Ho Chi Minh (Saigon). Ada banyak tawaran restoran halal ...

(6)

Wisata Kuliner Halal di Kota Ho Chi Minh - Wisata Vietnam

[www.wisatavietnam.net](http://www.wisatavietnam.net) › Travel blog › Vietnam › Kuliner

Wisata kuliner Vietnam: Wisata Kuliner Halal di Kota Ho Chi Minh dan Vietnam Muslim *Tour*. Menyediakan paket *tour* dan liburan ke Vietnam harga murah.

(7)

Paket Tour Best of Vietnam Spectacular 2018 | Cheria Holiday

<https://www.cheria-travel.com> › vietnam

May 2, 2018 - Ayo, berangkat bersama Cheria Halal Holiday ke Vietnam. kali ini Cheria Halal Holiday menawarkan kepada Anda Paket Tour Halal Vietnam. ... sekali wisata wisata yang indah dan menarik lho, berikut paket *tour* Vietnam.

(8)

Muslim Travel Vietnam, Vietnam Muslim Tour, Muslim tour, Halal tour ...

<https://www.muslimtravelvietnam.com/>

*Muslim Travel Vietnam are local tour operator in Vietnam focus on muslim people. We deeply understand about your habit when travelling such as Halal food, ...*

(9)

Pergi Berlibur Ke Ho Chi Minh City dalam Wisata Halal Vietnam ...

<https://www.reservasiku.com> › Asia › Destinasi › Vietnam

Feb 5, 2019 - Wisata Vietnam - Menjelajahi Kota Ho Chi Minh, dalam liburan wisata halal Vietnam, dengan berbagai tempat dan restoran yang sudah pasti ...

Namun, jika kita mencari informasi dari *google* dengan mengetik dalam bahasa Inggris kata “halal Vietnam *travel*”, penulis menemukan hasil yang lebih banyak, yaitu 32.400.000 temuan di dalam laman depannya dalam hitungan 0,58 detik sebagai berikut.

(1)

*Vietnam | Travel Guides For Muslim Travellers | Have Halal, Will Travel*  
<https://www.havehalalwilltravel.com/blog/tag/vietnam/>

*First-Timer's Guide To Vietnam: The 7D6N Muslim-Friendly Itinerary You've Been ... 6 Pho-nomenal Halal Vietnamese Eateries For Your Ho Chi Minh Trip.*

(2)

*7D6N Muslim-Friendly Vietnam Itinerary For An Epic Adventure ...*  
<https://www.havehalalwilltravel.com/blog/first-timers-vietnam-muslim-itinerary/>

*Apr 4, 2018 - From authentic Vietnamese food to stunning landscapes, we've got you covered! ... If this is your first Vietnam trip, you will want to know where you can ... The restaurant offers Halal Singaporean and Malaysian dishes with a ...*

(3)

*Muslim Travel Vietnam, Vietnam Muslim Tour, Muslim tour, Halal tour ...*  
<https://www.muslimtravelvietnam.com/>

*Muslim Travel Vietnam are local tour operator in Vietnam focus on muslim people. We deeply understand about your habit when travelling such as Halal food, ...*

(4)

*Nov 16, 2014 - Vietnam is a breathtakingly exotic and compelling destination to visit. In addition to its beautiful landscapes, traditional festivals and powdery ...*  
*Tidak Perlu Bingung Mencari Makanan Halal di Vietnam, Berikut ...*

<https://lifestyle.okezone.com> › Lifestyle › Food

(5)

*Jan 19, 2018 - Makanan halal jarang ditemukan di Vietnam karena tak banyak ... Namun, Anda tak perlu khawatir lagi saat traveling ke Vietnam karena di Ho ...*

(6)

*Muslim Travel Vietnam - Home | Facebook*

<https://www.facebook.com> › Places › Ho Chi Minh City, Vietnam › Tour Agency

*Muslim Travel Vietnam - 57-59 Ho Tung Mau, Ben Nge, Dist 1, Ho Chi Minh City, ... Discover the beauty of Mekong river with sampan boat and halal food.*

*Halal food in Vietnam? - Vietnam Forum - TripAdvisor*

<https://www.tripadvisor.com> › Asia › Vietnam › Vietnam Travel Forum



(7)

Mar 14, 2013 - Asia; Vietnam; Vietnam Travel Forum ... Is halal food readily available in Vietnam? Is there ... [saigonnezumi.com/halal-restaurants-in-saigon...](http://saigonnezumi.com/halal-restaurants-in-saigon...)

(8)

Muslim Travel: 5 Places for Halal Food in Ho Chi Minh City - TripZilla  
<https://www.tripzilla.com/halal-food-ho-chi-minh-city/56038>

Mar 30, 2017 - One of the biggest challenges of a Muslim travelling to a non-Muslim country is finding halal food. In Vietnam, there are over a thousand ...

(9)

Muslim friendly travel guide to Vietnam - Tripfez

<https://www.tripfez.com/destination/vietnam/>

Traveling to Vietnam? Book best Muslim friendly hotels in any city. Find prayer times, and travel advice for Muslim travelers (hint: halal food!)

(10)

Vietnam Muslim Tour

[www.islamvietnam.com/](http://www.islamvietnam.com/)

Vietnam Muslim Tour. Best Selling Hanoi Halong Bay Muslim Tour Package 4 Days • Hanoi Muslim ... + Halal Dinner On Saigon River. + Cu Chi Tunnel 1/2 Day.

Selanjutnya, pencarian akan diarahkan langsung pada laman *searches related to halal vietnam travel*, yaitu

1. *kfc vietnam halal*;
2. *bismillah tour vietnam*;
3. *have halal will travel*;
4. *cheap halal food in ho chi minh*;
5. *have halal will travel da nang*;
6. *wisata halal vietnam*;
7. *halal saigon*;
8. *halal travels*.

Kemudahan dalam pencarian melalui internet memang didesain secara sistem oleh pemerintah Vietnam melalui departemen kepariwisataannya. Demikian juga jika kita memesan paket wisata atau hotel secara *online*, kita akan memperoleh respons dalam hitungan detik secara *real time*. Namun, apakah semudah itu pasar wisata

muslimin dunia (termasuk Indonesia di dalamnya) dapat diarahkan untuk datang dan berlibur ke Vietnam? Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa preferensi utama pasar wisata muslimin di dunia adalah ketersediaan konsumsi yang halal dan hotel yang syariah (atau muslim *friendly*).

#### 4.1.1 Restoran Halal Vietnam

Membahas pariwisata, tentunya tak bisa terlepas dari keperluan sandang, papan, dan yang terpenting adalah pangan. Oleh karena itu, untuk dapat meraih pasar muslimin yang lebih banyak, pemerintah Vietnam mulai menggalakkan ketersediaan kuliner halal di seluruh Vietnam, khususnya di destinasi unggulan mereka.

Turis muslimin yang ingin mencari tawaran pariwisata halal pemerintah Vietnam dapat mengunjungi laman <https://www.tripadvisor.com>. Sebagai contoh, ingin mencari 10 restoran halal di Kota Hanoi maka dalam hitungan detik akan diperoleh informasi sebagai berikut.

1. Zaika–Dining Lounge Bar (Indian)  
91 Reviews, scores 4,5
2. Grills & Gravy Restaurant & Café (Indian)  
75 Reviews, scores 5
3. P.K Spice Restaurant (Indian)  
472 Reviews, scores 4,5
4. Little India (Indian)  
916 Reviews, scores 4,5
5. Dalcheeni (Indian)  
579 Reviews, scores 4,5
6. Namaste Hanoi (Indian)  
2694 Reviews, scores 4,5
7. Khazaana Indian Restaurant Since 1992 (Indian)  
553 Reviews, scores 4,5
8. Nan and Kabab Halal Retso (Indian)  
222 Reviews, scores 4,5
9. Handi Restaurant Hanoi (Indian)  
32 Reviews, scores 5

10. Khazaana (Indian)  
216 Reviews, scores 4
11. 1001 Nights (Lebanis, Mediteranian, International)  
54 Reviews, scores 4
12. Red House Hanoi (Asian, Seafood, Vietnam, Singaporean)  
100 Reviews, scores 4,5
13. Nisa Restaurant (Asian, Malaysian)  
59 Reviews, scores 3,5
14. Spices (Indian)  
32 Reviews, scores 5
15. Sherazade Kitchen (International, Asian, Indonesian, Malaysian, Korean)  
2 Reviews, scores 5
16. Al Sultan Restaurant & Café (Arabian)  
17 Reviews, scores 4

Hasil pencarian hanya diperoleh 10 restoran halal di Hanoi dari total 16 nama restoran halal yang muncul. Dari 16 restoran yang muncul, didominasi oleh restoran India muslim Vietnam. Hanya terdapat 5 restoran non-Indian yang terdiri atas kuliner bauran asal Arabisan, Malaysian, Korean, Malaysian, Vietnam, Singaporean, Lebanis, Mediteranian, International (*Western*), dan Indonesian (yang hadir menyempil di restoran Sherazade Kitchen). Kebanyakan menu yang dihadirkan adalah yang berasal Korea, Malaysia, dan Barat. Kemudian, muncul pertanyaan apakah tidak ada restoran khas Indonesia untuk pasar Vietnam yang hadir dan dimiliki oleh orang Indonesia? Atau restoran dengan menu Indonesia, namun dimiliki oleh orang Vietnam?

Jika kita mencari melalui *Google* dengan kata "*Indonesian restaurant Hanoi*", ditemukan 675.000 hasil pada laman utama dalam hitungan 0.83 detik sebagai berikut.

(1)

*The Best Indonesian Food in Hanoi - TripAdvisor*

<https://www.tripadvisor.com> › Asia › Vietnam › Hanoi › Hanoi Restaurants

*Best Indonesian Food in Hanoi: See TripAdvisor traveler reviews of Indonesian Restaurants in Hanoi.*

(2)

*The only Indonesian Restaurant in Hanoi - Review of Batavia ...*

<https://www.tripadvisor.com> › ... › Hanoi Restaurants › Batavia Restaurant & Cafe

*Batavia Restaurant & Cafe: The only Indonesian Restaurant in Hanoi - See 35 traveler reviews, 56 candid photos, and great deals for Hanoi, Vietnam, ...*

(3)

*Indonesian food in Hanoi - Review of Juni's Kitchen, Hanoi, Vietnam ...*

<https://www.tripadvisor.com> › ... › Hanoi › Hanoi Restaurants › Juni's Kitchen

*Juni's Kitchen: Indonesian food in Hanoi - See 8 traveler reviews, candid photos, and great deals for Hanoi, Vietnam, at TripAdvisor.*

(4)

*Batavia Restaurant & Cafe - Home - Hanoi, Vietnam - Menu, Prices ...*

<https://www.facebook.com> › Places › Hanoi, Vietnam › Coffee Shop

(5)

*Batavia Restaurant & Cafe - 116 Ngoc Ha Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam - Rated ... Buy Indonesian snacks with just HALF of their original price at our HAPPY ...*

(6)

*Excellent Indonesian Food - Review of Juni's Kitchen, Hanoi, Vietnam ...*

<https://www.tripadvisor.co.za> › ... › Hanoi › Hanoi Restaurants › Juni's Kitchen

*Juni's Kitchen: Excellent Indonesian Food - See 8 traveller reviews, candid photos, and great deals for Hanoi, Vietnam, at TripAdvisor.*

(7)

*Restoran Indonesia di Hanoi - TripAdvisor*

<https://www.tripadvisor.co.id> › ... › Hanoi › Restoran di Hanoi

*Makanan Indonesia Terbaik di Hanoi, Vietnam: Lihat ulasan wisatawan TripAdvisor tentang Restoran Indonesia di Hanoi.*

(8)

*Original Indonesian Food - Review of Batavia Restaurant & Cafe ...*

<https://www.tripadvisor.co.nz> › ... › Hanoi Restaurants › Batavia Restaurant & Cafe

*Batavia Restaurant & Cafe: Original Indonesian Food - See 35 traveller*

*reviews, 50 candid photos, and great deals for Hanoi, Vietnam, at TripAdvisor.*

(9)

*Madame Hien Restaurant, Hanoi - Restaurant Reviews, Phone ...*

*<https://en.tripadvisor.com.hk> › Asia › Vietnam › Hanoi › Hanoi Restaurants*

*Madame Hien Restaurant, Hanoi: See 2151 unbiased reviews of Madame Hien Restaurant, rated 4 of 5 on TripAdvisor and ranked #163 of 2917 restaurants in ...*

(10)

*10 Best Restaurants in Hanoi Old Quarter - Vietnam Travel Guide*

*[www.vietnam-guide.com/hanoi/top10/best-restaurants-hanoi-old-quarter.htm](http://www.vietnam-guide.com/hanoi/top10/best-restaurants-hanoi-old-quarter.htm)*

*The majority of restaurants in Hanoi Old Quarter tend to be humble-looking dining venues hidden in narrow alleyways and bustling street markets, where you ...*

(11)

*Home for Indonesian products opens in Hanoi - News VietNamNet*

*[english.vietnamnet.vn/fms/.../home-for-indonesian-products-opens-in-hanoi.html](http://english.vietnamnet.vn/fms/.../home-for-indonesian-products-opens-in-hanoi.html)*

*Oct 10, 2017 - A permanent exhibition house for Indonesian products officially opened in Hanoi on October 10.*

Selanjutnya, pencarian akan diarahkan langsung pada laman *searches related to Indonesia restaurant Hanoi* berikut.

1. Batavia Restaurant Hanoi
2. Batavia Restaurant Hanoi menu
3. Juni's kitchen Hanoi
4. Batavia Hanoi menu
5. Restoran Indonesia di Hanoi

Karena kata Batavia Hanoi ditemukan paling banyak, penelitian, kemudian diarahkan ke restoran tersebut. Sang pemilik adalah pasangan suami istri orang Indonesia asli yang suaminya adalah staf lokal KBRI di Hanoi. Azhar Rizal dan Hera adalah nama pemilik restoran yang sangat ramah dan mensponsori makan (gratis) rombongan peneliti dalam beberapa kali kunjungan ke sana. Batavia Restaurant &

Café beralamat di Jalan 25 Xuan Dieu, Quang An, Tay Ho, Hanoi. Restoran ini kini menjelma menjadi oasis bagi masyarakat Indonesia yang berada di Kota Hanoi maupun yang sedang berkunjung sebagai turis.

Batavia Restaurant & Café mulai beroperasi penuh sejak Desember 2017 lalu, buka dari pukul 07.00 pagi hingga pukul 23.00 malam setiap harinya. Menu yang tersedia biasanya selalu dicari oleh konsumennya. Menu-menu tersebut adalah nasi goreng, nasi kuning, soto ayam, satai kambing, gado-gado, sup buntut, ayam penyet, dan rendang. Batavia Restaurant & Café juga menyediakan menu lokal Vietnam semisal *Pho* (dibaca *Fe*) yang berbentuk mi kuah dengan irisan daging sapi dilengkapi dengan sayuran segar dan menu Barat lainnya.

Dari hasil interviu mendalam dengan kedua pemilik restoran, diperoleh hal istimewa. Selain menjaga cita rasa kuliner Indonesia yang disajikan dengan membawa para ahli masak dari Indonesia, Batavia Restaurant & Café juga menjaga standar halal dari seluruh sajian yang dihidangkan di meja makan, khususnya dengan menyembelih sendiri ayam hidup yang dibeli dari pasar setempat. Lebih lanjut, lama menetap selama 16 tahun di Vietnam sebagai staf lokal, membuat Rizal Azhar semakin serius bersama sang istri menjangkau konsumen halal (juga yang non-Islam), tidak hanya dari Indonesia dan Malaysia, tetapi juga dari negara lainnya.



Gambar 4.1  
Penulis bersama Ibu Hera  
yang merupakan pemilik  
Batavia Restaurant & Café.

Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)

Melihat hasil pencarian di *Google* dan ulasan dari *Tripadvisor*, manajemen *Batavia Restaurant & Café* tinggal berfokus pada strategi promosi dari yang sudah digunakan saat ini. Sebagai contoh, perlakuan khusus kepada konsumen yang datang ke restoran. Ketika telah selesai bersantap, konsumen diham-piri dengan sopan untuk memberi tahu bahwa pihak restoran mem-berikan diskon khusus (mungkin sekitar 10 persen). Namun dengan permintaan khusus, diskon diperoleh jika konsumen bersedia masuk ke *apps* *Tripadvisor* untuk memberikan ulasan positif dan mengklik bintang. Contoh lain, meminta mereka untuk meng-*update* status di media sosial



Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)

Gambar 4.2

Salah satu menu yang tersaji di *Batavia Restaurant & Café*.

miliknya, seperti di *Instagram*, *Twitter*, atau *Facebook* dengan mencantumkan nama restoran dan berfoto dengan pilihan menu makanan yang tersaji. Hal semacam itu dapat menguntungkan keduanya, yakni produsen dan konsumen. Cara ini sebagaimana yang selama ini dilakukan oleh armada dari manajemen *Gojek* dan *Grab*. Jika strategi pemasaran tersebut dilakukan secara tekun dan berkelanjutan, perlahan, namun pasti, *Batavia Restaurant & Café* diharapkan dapat menjadi salah satu restoran halal terdepan di Kota Hanoi yang bersaing dengan restoran *India Muslim Vietnam* yang telah lebih dahulu berkibar.

Restoran berikutnya yang juga berkibar di Hanoi adalah *Juni's Kitchen*. Restoran yang bergaya ala rumah makan Padang ini melengkapi kehadiran Indonesia di Kota Hanoi. Restoran yang menyajikan makanan Indonesia dan Asia ini beralamat di No. 19 *Xom Chua Kim Lien Ngo So 1 Au Co, Vietnam*, dengan nomor telepon +84 122 320 2282. Lebih lanjut, hal menyenangkan dari restoran ini adalah karena restoran ini telah mengantongi label halal.



Gambar 4.3  
Juni's Kitchen, salah satu restoran di Hanoi, Vietnam yang sudah tidak beroperasi.

Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)

Salah satu menu favorit di Juni's Kitchen adalah rendang Padang. Daya tarik lainnya dari restoran ini adalah lokasinya yang terletak persis menghadap West Lake. Dengan demikian, bersantap apa pun menjadi lebih nikmat karena pengunjung dapat melihat pemandangan danau paling besar di Kota Hanoi. Sayangnya, saat penulis mengeceknya di internet dengan memasukkan kata kunci "*Indonesian food in Hanoi*", Juni's Kitchen yang banyak memperoleh bintang lima, tertulis kata "*closed*."



Sumber: [www.google.com](http://www.google.com)

Gambar 4.4

Restoran Juni's Kitchen telah mengantongi sertifikat halal.

Di Ho Chi Minh City, lebih banyak tersedia restoran halal dibandingkan dengan di Kota Hanoi. Sekalipun banyak pilihan restoran, para turis muslim yang datang ke Vietnam biasanya bersikap ekstra waspada dengan kuliner halal yang akan dikonsumsinya.

Melalui Tripadvisor dengan mengetik "*halal restaurants in Ho Chi Minh City*" yang diunduh pada 17 Februari 2019 dari <https://>



[www.tripadvisor.com/Restaurants-g293925-zfz10751-Ho\\_Chi\\_Minh\\_City.html](http://www.tripadvisor.com/Restaurants-g293925-zfz10751-Ho_Chi_Minh_City.html), diperoleh sebagai berikut.

### 1. Zeytun Restaurant



452 reviews

*International Mediterranean Middle Eastern Arabic Lebanese Turkish Vegetarian Friendly Vegan Options Halal Gluten Free Options*

- "Very delicious middle eastern food" 12/30/2018
- "The best shish kofta" 09/04/2017

---

### 2. The Daun Restaurant



415 reviews

*Asian Vietnamese Singaporean Malaysian Vegetarian Friendly Vegan Options Halal Gluten Free Options*

- "Cheap and tasty!" 02/11/2019
- "Experiencing Pho" 02/11/2019

---

### 3. King Kebab



625 reviews

- "Not as good as original but still satisfy..." 02/04/2019
- "Addictive" 12/25/2018

---

### 4. Baba's Kitchen



2,883 reviews

*Indian Asian Vegetarian Friendly Vegan Options Halal Gluten Free Options*

- "Always Great" 02/12/2019
- "Friendly and Great food" 02/11/2019

## 5. Natraj Indian Cuisine Restaurant



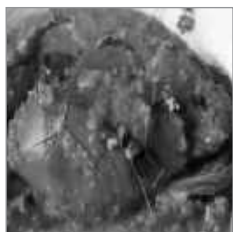
239 reviews

*Indian Asian Vegetarian Friendly Vegan Options Halal Gluten Free Options*

- “Best Indian food in Saigon” 02/15/2019
- “Tasty evening with Indian cousins” 01/19/2019

---

## 6. Redhouse Saigon



152 reviews

*Seafood Asian Brew Pub Pub Vietnamese South American Ecuadorean Halal*

- “Great Halal place in Vietnam!” 12/07/2018
- “Their speciality chicken curry.” 07/13/2018

---

## 7. Benaras



200 reviews

*Vegetarian Friendly Vegan Options Gluten Free Options Halal*

- “In love with this Indian Cuisine” 02/15/2019
- “Lives up to their reviews!” 02/14/2019

---

## 8. Beirut - Mediterranean Kitchen & Lounge



306 reviews

*Lebanese Mediterranean Middle Eastern International Vegetarian Friendly Vegan Options Halal*

- “Best Lebanese & food belly dancers in Ho Chi Minh City” 03/24/2017
- “... - Falafel Tabbouleh and Beirut’s Si...” 10/10/2018

## 9. Namaste India



218 reviews

*Indian Asian Vegetarian Friendly Vegan Options  
Halal Gluten Free Options*

- "I love indian food" 04/12/2016
  - "Best biryani in Saigon" 03/03/2018
- 

## 10. Pasha Restaurant

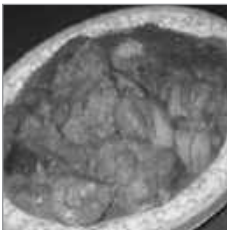


264 reviews

*Mediterranean Turkish Cafe Healthy Vegetarian  
Friendly Vegan Options Halal*

- "Good food!!" 02/14/2019
  - "a great place" 09/12/2018
- 

## 11. Taj Mahal Restaurant



153 reviews

*Indian Asian Pakistani Vegetarian Friendly Veg-  
an Options Halal*

- "Great Indian food" 01/02/2019
  - "Lamb vindaloo was good, as chicken kor-  
ma." 01/08/2018
- 

## 12. Mumtaz Indian Restaurant



903 reviews

*Indian Asian Vegetarian Friendly Vegan Options  
Halal Gluten Free Options*

- "Excellent Food" 12/09/2018
  - "Excellent indian food with a very good  
pri..." 11/18/2018
-

### 13. Kampung Pandan Restaurant



65 reviews

*Asian Vietnamese Malaysian Vegetarian Friendly Vegan Options Halal*

- *"Nasi lemak" 12/30/2016*
- *"I love Nasi Goreng Pattaya and Roti at..." 11/09/2018*

---

### 14. Al Sham Restaurant



58 reviews

*Arabic Lebanese Mediterranean Middle Eastern Vegetarian Friendly Vegan Options Halal*

- *"Delicious Middle Eastern food at an affordable price!" 12/09/2018*
- *"Really tasty baba ganoush and hummus." 09/24/2017*

---

### 15. Pho Muslim



29 reviews

*Asian Vietnamese Soups Halal*

- *"Best halal Pho in HCM CITY" 10/05/2018*
- *"Best halal pho in HCMC" 05/05/2018*

---

### 16. Caphe Bombay



125 reviews

*Indian Asian Vegetarian Friendly Vegan Options Halal Gluten Free Options*

- *"Close restaurant" 10/05/2018*
- *"Do they think I'm a dumb?!?!?" 12/29/2017*

### 17. Halal Saigon



148 reviews

*Asian Vietnamese Malaysian Vegetarian Friendly Vegan Options Halal*

- "Good halal/halaal food in Vietnam Ho Chi M..." 12/16/2018
- "Halal food in Saigon" 12/02/2018

---

### 18. Ganges Indian Cuisine Restaurant



144 reviews

*Indian Vegetarian Friendly Vegan Options Halal Gluten Free Options*

- "Delicious Indian Food!" 02/06/2019
- "Best indian food" 02/03/2019

---

### 19. Hummus and Grill Halal Restaurant



72 reviews

*Indian Turkish Middle Eastern Arabic International Persian Halal Vegetarian Friendly Vegan Options Kosher Gluten Free Options*

- "Dinner" 02/08/2019
- "Falafel so nice" 02/01/2019

---

### 20. D'Nyonya Penang Restaurant



79 reviews

*Asian Malaysian Halal*

- "Average quality, unfriendly staff, basic d..." 11/19/2018
- "Halal food in Ho Chi Minh City Vietnam" 04/30/2018

### 21. Amun Garden Restaurant & Lounge



27 reviews

Moroccan Turkish Middle Eastern Halal

- "Best hookah in town" 09/04/2018
- "... and salmon couscous here is the bes..." 07/28/2018

---

### 22. Hjh Basiroh Hj Aly



72 reviews

Asian Vietnamese Malaysian Halal

- "Serves good halal food at reasonable price" 06/03/2017
- "... that is the standard price for hala..." 02/18/2016

---

### 23. Saigon Green House



86 reviews

Asian Vietnamese Malaysian Halal Vegetarian Friendly

- "Affordable halal food" 12/10/2018
- "I ordered Vietnamese chicken curry, kan..." 03/31/2017

---

### 24. Shanti Indian and Arab Cuisine



27 reviews

Indian Vegan Options Halal Vegetarian Friendly

- "Best Indian Restaurant in Hochiminh"
- "... was the biryani...overall good expe..." 11/23/2018

## 25. Restaurants Sahraan



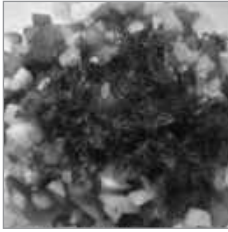
47 reviews

*Middle Eastern Egyptian Mediterranean Barbecue Halal*

- "A very enjoyable place and tasty food h..." 10/07/2017
- "... so tasty food.It is so clean also.l..." 07/27/2016

---

## 26. Berru



31 reviews

*Turkish Mediterranean Greek Wine Bar Middle Eastern Halal Vegetarian Friendly Vegan Options*

- "Wonderful and simple Turkish food" 05/01/2017
- "... of kebabs, spinach pastry and baklava." 08/07/2017

---

## 27. Warung 1 Malaysia



38 reviews

*Asian Malaysian Halal*

- "... shop with reasonable price as well." 10/09/2017
- "Food in Musa Kariem Restaurant" 08/29/2017

---

## 28. Spice India



133 reviews

*Indian Asian Vegetarian Friendly Halal Vegan Options*

- "Good Restaurant with reasonably priced men..." 11/08/2018
- "Nice!" 04/09/2018

## 29. Kebab Station



22 reviews

*Middle Eastern Arabic Fast Food Turkish Diner Halal*

- *"REAL falafel" 02/05/2019*
- *"Yum!" 01/23/2019*

---

## 30. Serai (Malaysian Kitchen)



67 reviews

*Asian Malaysian Vietnamese Vegetarian Friendly Halal*

- *"Pricey" 12/09/2018*
- *"Family Vacation to Ho Chi Minh" 05/07/2018*

---

## 4.2 Vietnam, Indonesia, dan Industri

Vietnam adalah anggota dari Association of South East Asian Nations (ASEAN), Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), dan World Trade Organization (WTO). Negara ini menempati posisi ke-47 terbesar dunia menurut pendapatan domestik bruto (PDB) dan ke-35 terbesar dunia menurut kemampuan belanja masyarakatnya. Setelah Reformasi Doi Moi pada pertengahan 1980-an, Vietnam bermetamorfosis dari ekonomi terencana yang terpusat menjadi ekonomi campuran dengan menggunakan perencanaan indikatif lima tahunan yang kemudian mengalami pertumbuhan pesat.

Menurut Hayton (2011) dalam bukunya yang berjudul *"Vietnam: Raising Dragon"* menggambarkan Vietnam sebagai sebuah keelokan yang tersembunyi yang pada masa lalu dipimpin oleh seorang pejuang yang melawan kolonialisme Prancis, imperialisme Amerika Serikat, dan kapitalisme domestik. Hingga akhirnya, negara ini kini malah menjadi mitra ekonomi mereka.



Sebagai sebuah negara yang berhaluan sosialis komunis, Vietnam menerima masuknya perusahaan-perusahaan asing untuk berkembang di sana. Salah satu yang mencolok adalah masuknya investasi besar Samsung. Lebih jauh, Hayton (2011) mengutip istilah yang dikeluarkan oleh World Bank yang mengatakan Vietnam ibarat sebuah “*poster boy*” untuk negara-negara yang menerapkan liberalisme ekonomi. Khususnya, pada saat Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) atau kemitraan komprehensif pada tahun 2015, Vietnam menjadi salah satu negara yang langsung meratifikasi perjanjian tersebut sesuai dengan spirit dari Reformasi Doi Moi yang sebelumnya telah diimplementasikan pemerintah Vietnam sejak 33 tahun silam.

Menurut perkiraan PricewaterhouseCoopers pada bulan Februari 2017, Vietnam mungkin menjadi negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, dengan hampir semua perusahaan Vietnam berbasis SMEs atau *small medium enterprises* atau UKM-UMKM. Data yang bersumber dari The Economic Challenges, Metro TV pada November 2018, menunjukkan bahwa per November 2018, pertumbuhan ekonomi Vietnam mampu menembus ke angka 8,17 persen.

Vietnam juga telah menjadi eksportir pertanian terkemuka dan menjadi negara tujuan yang menarik bagi investasi asing di Asia Tenggara (IMF, 2002). Sebagai informasi, Bunyan Saptono (2018), Ketua Bidang Kerja Sama Luar Negeri Dewan Masjid Indonesia (DMI) serta mantan Duta Besar Indonesia untuk beberapa negara dan pernah ditugaskan di Vietnam pada pos pertamanya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Departemen Luar Negeri (sekarang Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia), saat dirinya bertugas di sana, mengatakan bahwa Vietnam belajar bertani kopi pada Indonesia. Dirinya terlibat aktif dalam proses transformasi keilmuan pertanian kopi yang diberikan Indonesia pada Vietnam. Vietnam pun kini mampu menggeser posisi Indonesia sebagai negara pengeksport kopi terbesar dunia kedua setelah Brasil.

Menurut informasi PricewaterhouseCoopers (2017), saat ini ekonomi Vietnam sebagian besar bergantung pada investasi langsung asing untuk menarik modal dari luar negeri guna mendukung perekonomiannya. Lebih lanjut, PricewaterhouseCoopers (2017) dalam







*“The World in 2050”* menjelaskan bahwa investasi asing di hotel mewah dan *resorts* di Vietnam naik untuk mendukung industri pariwisatanya.






























Langkah Vietnam untuk langsung meratifikasi perjanjian CPTPP sesuai dengan spirit dari Reformasi Doi Moi berpengaruh pada dorongan kinerja ekonomi Vietnam yang kemudian berlari sangat kencang. Data yang diberikan oleh KBRI di Hanoi menyebutkan bahwa nilai total perdagangan global Vietnam pada tahun 2018 lalu sebesar USD 482,2 miliar pada saat nilai total perdagangan global Indonesia pada tahun yang sama adalah USD 368,6 miliar.

Vietnam unggul dalam ekspor produk pertanian, sepatu, dan pakaian jadi. Pemerintah Vietnam memang mendorong ekspor setinggi-tingginya dengan memperhatikan apa yang diminta dunia internasional (termasuk dalam permintaan hasil industri halal dari pasar muslim dunia). Hal ini tentunya didukung oleh kemudahan regulasi untuk investasi, seperti upah buruh yang kompetitif dan ketentuan pajak yang fleksibel. Dengan kata lain, keunggulan faktor formal di Vietnam didukung oleh faktor sosial kultural lain, yaitu karakter masyarakat pada umumnya di Vietnam yang memiliki determinasi dan daya juang yang tinggi karena pengalaman pahit pada masa lalu. Mereka pun tak ingin kembali ke dalam masa pahit seperti yang pernah dialami dahulu.

Terkait dengan perbandingan dua negara Indonesia dan Vietnam, dapat dilihat dalam Table 4.1, sebagai berikut.

Tabel 4.1  
Perbandingan dua negara Indonesia dan Vietnam.

<i>Official Name</i>	 <b>Republic of Indonesia</b>	 <b>Socialist Republic of Vietnam</b>
<i>Native Name</i>	<b>Republik Indonesia</b>	<b>Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam</b>
<i>Emblem</i>		
<i>Flag</i>		
<i>Population</i>	<b>263.991.400</b>	<b>92.700.000</b>
<i>Area</i>	<b>1.904.569 km<sup>2</sup> (735.358 sq mi)</b>	<b>332.698 km<sup>2</sup> (128.455 sq mi)</b>
<i>Population Density</i>	<b>138,61/km<sup>2</sup> (359,0/sq mi)</b>	<b>276,03/km<sup>2</sup> (714,9/sq mi)</b>
<i>Time zones</i>	<b>3</b>	<b>1</b>
<i>Capital</i>	<b>Jakarta</b>	<b>Hanoi</b>
<i>Largest City</i>	<b>Jakarta – 9.607.787</b>	<b>Ho Chi Minh City – 3.467.331</b>
<i>Government</i>	<b>Unitary presidential constitutional republic</b>	<b>Marxist-Leninist one-party socialist republic</b>
<i>Established</i>	<b>17 August 1945 (Declared) 27 December 1949 (Recognized)</b>	<b>2 September 1945 (Declared) 4 June 1954 (Recognized)</b>

<i>Predecessor States</i>	<p><b>Dutch Colonial Period (1602–1949)</b></p> <p> <b>Dutch East India Company (1602– 1800)</b></p> <hr/> <p> <b>Dutch East Indies (1800–1949)</b></p> <p> <b>Republic of Indonesia (1945–1949)</b></p> <p> <b>Emergency Government (1948–1949)</b></p> <hr/> <p> <b>Dutch New Guinea (1949–1962)</b></p> <hr/> <p><b>Japanese Occupation Period (1942–1945)</b></p> <p> <b>Occupied Dutch East Indies (1942–1945)</b></p> <hr/> <p><b>Post-Colonial Period (1949–present)</b></p> <p> <b>Republic of Indonesia</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  <b>Republic of the United States of Indonesia (1949–1950)</b></li> <li>•  <b>Liberal Democracy period (1950–1957)</b></li> <li>•  <b>Guided Democracy period (1957–1965)</b></li> <li>•  <b>Transition period (1965–1966)</b></li> <li>•  <b>New Order period (1966–1998)</b></li> <li>•  <b>Reformasi period (1998–presen</b></li> </ul>	<p><b>Nguyễn Dynasty (1802–1945)</b></p> <p> <b>Nguyễn dynasty (1802–1885)</b></p> <hr/> <p><b>French Colonial Period (1898–1946)</b></p> <p> <b>French Indochina</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  <b>Protectorate of Annam</b></li> <li>•  <b>Protectorate of Tonkin</b></li> <li>•  <b>French Cochinchina</b></li> </ul> <hr/> <p><b>Japanese Occupation Period (1940-1945)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  <b>Occupied French Indochina (1940-1945)</b></li> <li>•  <b>Empire of Vietnam (1945)</b></li> </ul> <hr/> <p><b>Post-Colonial period (1945 - 1976)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  <b>French Indochina (1945-1948)</b></li> <li>•  <b>Provisional Central Government of Vietnam (1948-1949)</b></li> <li>•  <b>State of Vietnam (1949-1955)</b></li> </ul> <hr/> <p> <b>North Vietnam (1945-1976)</b></p> <hr/> <p> <b>South Vietnam (1955-1975)</b></p> <p> <b>Provisional Revolutionary Government of the Republic of South Vietnam (1969-1976)</b></p> <hr/> <p><b>Post-Unification Period (1976–present)</b></p> <p> <b>Socialist Republic of Vietnam (1976– present)</b></p>	
	<b>First Leader</b>	<b>Soekarno</b>	<b>Hồ Chí Minh</b>
	<b>Current Leader</b>	 <b>President: Joko Widodo</b>	<b>President: Trần Đại Quang</b>  <b>Prime Minister: Nguyễn Xuân Phúc</b>
<b>Current Deputy</b>	<b>Vice President: Jusuf Kalla</b>	<b>Vice President: Đặng Thị Ngọc Thịnh</b>	

<b>Legislature</b>	<b>People's Consultative Assembly</b>	<b>National Assembly of Vietnam</b> <b>Chairman: Nguyễn Thị Kim Ngân</b>
<b>Upper House</b>	<b>Regional Representative Council</b> <b>President: Oesman Saptia Odang</b>	
<b>Lower House</b>	<b>People's Representative Council</b> <b>Speaker: Setya Novanto</b>	
<b>Judiciary</b>	<b>Supreme Court</b> <b>Chief Justice: Muhammad Hatta Ali</b> <b>Constitutional Court</b> <b>Chief Justice: Arief Hidayat</b>	<b>Supreme Court</b> <b>Chief Justice: Nguyễn Hòa Bình</b>
<b>National language</b>	<b>Indonesian</b>	<b>Vietnamese</b>
<b>GDP (nominal)</b>	<b>US\$ 1.020 trillion (\$3,895 per capita)</b>	<b>US\$ 215.829 billion (\$2,305 per capita)</b>
<b>GDP (PPP)</b>	<b>US\$ 3.010 trillion (\$11,633 per capita)</b>	<b>US\$ 648.243 billion (\$6,925 per capita)</b>

Sumber: Wikipedia (diunduh pada 28 Januari 2019)

Amir Sodikin dalam *Kompas.com* mempertanyakan siapa yang ketinggalan antara Indonesia dan Vietnam di tengah tata permainan bisnis global Presiden Donald Trump. Trump mengubah dunia dengan inisiatif “perang dagang” yang mengatur ulang alur manufaktur global dan rantai pasokan penting. Dampaknya, para eksportir mulai memilih untuk meninggalkan Tiongkok guna mengurangi risiko.

Dengan populasi di atas 90 juta orang penduduk di ASEAN yang mencakup Indonesia, Filipina, dan Vietnam, ketiga negara ini bersaing untuk menarik investasi di industri dan penawaran tenaga kerjanya. Dari ketiga negara tersebut, Vietnam terlihat yang paling unggul. Salah satu indikatornya adalah produsen *smartphone* terbesar di dunia bermerk Samsung telah memilih Vietnam dan berinvestasi lebih dari USD 17 miliar. Sejak tahun 2017, investasi Samsung telah berkontribusi (memengaruhi) hampir seperempat dari total ekspor Vietnam yang mencapai USD 214 miliar.

Sedikit ke luar dari ibu kota Hanoi, terdapat Kota Bac Ninh dan Thai Nguyen. Dua kota tersebut terlihat seperti kota kecil yang tersebar sepanjang daratan Sungai Merah (Red River). Di sana terdapat fasilitas berskala raksasa yang dipenuhi oleh lebih dari 149.000 orang pekerja.

Vietnam pada tahun 2017 juga berhasil menarik *foreign direct investment* (FDI) atau investasi asing langsung sebesar USD 35,88 miliar. Sebagai perbandingan, Indonesia yang memiliki populasi hampir tiga kali lebih besar dibandingkan dengan Vietnam, hanya mampu menarik USD 32,34 miliar.

Mengutip kembali Amir Sodikin dalam *Kompas.com*, diasumsikan terdapat isu utama yang menentukan daya saing sebuah negara, yaitu pendidikan untuk tenaga kerja siap pakai. Vietnam maupun Indonesia memiliki jutaan tenaga kerja muda. Namun, apakah telah terjadi *link and match* antara pendidikan dan vokasi yang disediakan dengan kebutuhan industrinya? Indonesia dan Vietnam sama-sama menghasilkan lebih dari 100.000 orang sarjana insinyur setiap tahunnya, terdapat kesenjangan kebutuhan insinyur untuk dua sampai lima tahun ke depannya. Persatuan Insinyur Indonesia memberikan sinyal jika dunia industri kini dan ke depannya membutuhkan tambahan 280.000 orang insinyur baru pada tahun 2023. Padahal dari sisi Vietnam, sebuah agensi tenaga kerja *online* di Vietnam bernama VietnamWorks, memprediksi negara Vietnam akan kekurangan 500.000 insinyur teknologi informasi (TI) pada tahun 2020.

Menilik sejarahnya, Vietnam hidup dalam perang selama lebih dari tiga puluh tahun melawan penjajah Prancis, Amerika Serikat, dan Tiongkok. Namun demikian, melalui Reformasi Doi Moi pada 1986, dari PDB Vietnam pada tahun 1987, pada tahun 2017 mampu melesat menjadi USD 223,8 miliar.

### **4.3 Industri Indonesia di Vietnam**

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia mengatakan bahwa pemerintah Indonesia–Vietnam telah sepakat menghapus dan menghilangkan hambatan dagang produk industri dan perdagangan yang masih terjadi di antara kedua Negara. Komitmen ini merupakan hasil pertemuan Presiden Joko Widodo dan Presiden Vietnam Trần Đại Quang. Dalam perbincangan kedua pimpinan negara tersebut, antara lain dibahas perdagangan bilateral sekaligus target yang akan dicapai sebesar USD 10 miliar pada tahun 2020.

Pemerintah Indonesia telah meminta kepada pemerintah Vietnam untuk mempermudah pajak ekspor untuk semen dan ekspor mobil Indonesia. Selain itu, meninjau kembali kebijakan tentang *double inspection* untuk otomotif sehingga ekspor mobil Indonesia ke Vietnam dapat kembali berjalan normal.

Selama ini, pemerintah Vietnam menerapkan kebijakan terkait uji tipe dan uji emisi melalui Regulasi No. 116/2017/ND-CP (*Decree on Requirements for Manufacturing, Assembly and Import Of Motor Vehicles and Trade in Motor Vehicle Warranty and Maintenance Services*). Pemerintah Vietnam memang telah menerapkan kebijakan impor mobil CBU atau *completely built up* dari negara-negara ASEAN. Padahal, jumlah pengapalan mobil Indonesia ke Vietnam cukup lumayan besar, yakni sekitar 30–40 ribu unit per tahun dari total ekspor mobil nasional ke seluruh negara yang rata-rata mencapai 225 ribu unit per tahun. Pada bulan Januari sampai bulan Juli 2018 tahun lalu, ekspor mobil Indonesia ke Vietnam hanya sekitar 1.528 unit.

Pihak Vietnam meminta kepada Indonesia agar memberikan keleluasaan terhadap penerapan lokal konten atau TKDN pada produk ponsel. Dengan kata lain, skema penghitungan TKDN di Indonesia, tidak hanya untuk peranti keras (*hardware*), tetapi juga dapat dikompensasi dengan peranti lunak (*software*) dan yang lain. Selanjutnya, Vietnam menanyakan bea masuk yang dikenakan Indonesia untuk produk baja impor dari Vietnam yang sudah ada keputusan melalui lembaga arbitrase WTO.

Melalui peningkatan kerja sama, tren perdagangan Indonesia–Vietnam terus meningkat beberapa tahun belakangan ini. Pada 2017, total nilai perdagangan Indonesia–Vietnam tahun lalu tumbuh sebesar 8,64 persen sehingga menjadi USD 6,82 miliar dibandingkan dengan sebelumnya pada tahun 2016 yang hanya mencapai USD 6,27 miliar. Dalam upaya membangun pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia juga menyampaikan keinginan para investor nasional untuk mengembangkan usahanya di Vietnam. Untuk itu, pemerintah Vietnam diharapkan dapat memberi kemudahan, apalagi Indonesia merupakan salah satu investor pertama yang ada di Vietnam.

Investasi Indonesia di Vietnam selama tahun 2017 mencapai USD 45,84 juta. Hingga akhir Desember 2017, total investasi Indonesia di Vietnam mencapai 69 proyek dengan nilai sebesar USD 477,02 juta. Indonesia berada di peringkat ke-30 dari daftar negara investor di Vietnam. Sementara itu, Vietnam tercatat memiliki delapan proyek investasi di Indonesia yang bernilai USD 51 juta di industri pengolahan, pertambangan, media, dan manufaktur.

Data yang diberikan oleh KBRI di Hanoi terkait dengan perdagangan bilateral Indonesia–Vietnam pada tahun 2018 tetap memiliki peluang karena mencatat nilai surplus di atas Vietnam. Indonesia masih tetap unggul di atas Vietnam, khususnya dalam produk batu bara dan otomotif. Namun lebih jauh, di dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh harian *Kompas* pada Sabtu, 9 Maret 2019, mengatakan jika Vietnam adalah mitra sekaligus kompetitor bagi Indonesia. Dengan ilustrasi total perdagangan global dari Indonesia dan Vietnam dalam miliar dollar AS, berikut ini.

## Perdagangan Indonesia dan Vietnam

Total Perdagangan Global 2018  
Dalam Miliar Dolar AS



Sumber: KBRI di Hanoi, dalam *Kompas*, edisi Sabtu, 9 Maret 2019

Gambar 4.5

Perdagangan Indonesia dan Vietnam.



Berdasarkan ilustrasi total perdagangan bilateral Indonesia dan Vietnam dalam miliar US Dollar, pada tahun 2016, 2017, dan 2018, adalah sebagai berikut.



Sumber: KBRI di Hanoi, dalam Kompas, edisi Sabtu, 9 Maret 2019

Gambar 4.6

Perdagangan Bilateral 2016–2018.

#### 4.3.1 Ciputra dan Real Estate Hanoi

Nama besar Ciputra sebagai “bapak” *real estate* di Indonesia sudah tidak diragukan lagi, begitu juga nama besarnya harum di Vietnam. Di dalam *website* promonya, terpampang kalimat “*foreign investor attaches nearly 20 years in Vietnam*” yang cukup mencolok dengan alamat <http://cipurahanoi.com.vn/en/tin-tuc/foreign-investor-attaches-nearly-20-years-vietnam/>.



Sumber: [www.google.com](http://www.google.com)

Gambar 4.7

Logo Ciputra Grup.

Di ibu kota Vietnam, perusahaan dari Ciputra Grup ini hadir menjadi salah satu etalase modernitas hunian Kota Hanoi. Khususnya, *branding* yang dibangun dengan gaya modern pascareformasi ekonomi Doi Moi lalu. Ciputra Grup menyatakan *positioning*-nya di Kota Hanoi sebagai hunian kota modern, dengan sentuhan berteknologi kekinian.



Sumber: Dokumentasi Penulis (2018)

Gambar 4.8

Ciputra Grup hadir menjadi etalase modernitas hunian Kota Hanoi.

Kehadiran *real estate* Ciputra masih tetap dengan ciri khasnya, yaitu patung kuda. Ciri ini membuat lokasinya mudah ditemukan bagi siapa saja yang berniat mencari tahu atau berminat sebagai calon pembeli. Harga yang dipatok memang termasuk tinggi bagi pasar lokal Vietnam. Namun dengan meningkatnya kemakmuran di Vietnam, berakibat *trickle down effect* kepada daya beli masyarakatnya. Namun demikian, belum diketahui seberapa banyak muslimin Vietnam yang mampu membeli hunian di *real estate* Ciputra Hanoi tersebut atau melakukan unit usaha industri halal (syariah) di sana.

#### 4.3.2 GO-JEK dan Go-Viet

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian proaktif menumbuhkan pelaku usaha rintisan digital atau *startup* di Indonesia. Upaya ini merupakan salah satu langkah untuk mewujudkan target penciptaan wirausaha industri baru sebanyak 20.000 orang pada tahun 2019. Meluasnya ekspansi GO-JEK di ASEAN memang dimulai

dari negeri Vietnam, mengusung nama *brand* Go-Viet sebagai penyedia jasa transportasi berbasis aplikasi di Vietnam. Goviet resmi diluncurkan pada bulan September 2018 yang langsung dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo. Sedemikian penting seorang presiden datang karena hal ini menjadi indikator yang dapat dibanggakan Indonesia bahwa *startup* dari Indonesia terbukti mampu berekspansi di regional ASEAN.



Sumber: [www.google.com](http://www.google.com) (2018)  
Gambar 4.9 Logo GO-JEK dan Go-Viet.

Go-Viet merupakan mitra lokal di Vietnam dari GO-JEK, salah satu perusahaan *unicorn* ASEAN yang berasal dari Indonesia. Di Indonesia, banyak pelaku UKM-UMKM yang terpengaruh dengan keberhasilan GO-JEK sehingga mampu mencapai posisi *competitive advantage*. Dagangan mereka laku tanpa harus membuka toko. Sebagian besar dari usaha tersebut terdapat para pelaku industri rumahan halal berlogo sertifikasi halal LPPOM MUI. Oleh karena itu, ke depannya akan sangat menarik untuk meneliti sejauh mana kehadiran Go-Viet asal GO-JEK Indonesia mampu memengaruhi usaha kecil dan mikro masyarakat muslimin Vietnam sehingga juga mampu untuk mencapai *competitive advantage*-nya di antara persaingan yang ada di Vietnam.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan, Kita sadari bahwa kini Vietnam benar-benar sudah berlari lebih kencang dari Indonesia. Indonesia justru kini yang perlu berendah hati mempelajari kemajuan Vietnam, mem-*benchmark* setiap keberhasilan di sana, mengurai bagaimana strategi dan metode yang mereka gunakan, serta dari mana saja datangnya investasi yang masuk ke Vietnam, termasuk dalam dinamika industri halal di Vietnam.



# DAFTAR PUSTAKA



## BUKU

- Abdullah, I. 2018. *Mere(i)butkan Sertifikasi Halal: Tanggung Jawab Negara terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal dalam Sistem Hukum Indonesia*. Depok: Melvana
- Amin, M. 2017. *Solusi Hukum Islam (Makharij Fiqhiyyah) sebagai Pendorong Arus Baru Ekonomi Syariah di Indonesia (Orasi Ilmiah)*. Malang: Kementerian Agama UIN Maulana Malik Ibrahim
- Amiruddin, J. dan Hasram, K. 2018. *Muslim dan Halal di Vietnam*. Bandung: LEKKAS
- Andaya, L.Y. 2008. *Leaves of the Same Tree: Trade and Ethnicity in the Straits of Malaka*. Honolulu: University of Hawaii Press
- Azra, A. 2013. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad 17 dan 18*. Jakarta: Kencana
- BHH JAKIM (Bahagian Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia). 2013. *Pedoman Sistem Manajemen Jaminan Halal untuk Sertifikasi Halal Malaysia*. Selangor: BHH JAKIM
- Beresford, M. 1988. *Vietnam: Politics, Economics and Society*. London and New York: Pinter Publication
- \_\_\_\_\_. 2006. *Vietnam: the Transition for Central Planning, in Rodan, G et al (Eds.). The Political Economy of South-East Asia: Markets, Power, and Contestation*. Oxford: Oxford University Press. Third Edition

- CBI HCM (Commission Board of Islam in Ho Chi Minh City). 2012. *Halal Certificate Granting Procedures to Vietnam Products*. Ho Chi Minh: CBI HCM
- Eisen, A. 1984. *Women and Revolution in Vietnam*. London: Zed Books.
- Farah, Ceser, E. 2003. *Islam: Beliefs and Observances*. New York: Barron's
- Kho Di Dza. 2014. *Mempelajari Sistem Sertifikasi Halal di Indonesia dan Malaysia, serta Pengembangan Model Sistem Sertifikasi Halal Di Vietnam (Skripsi)*. Bogor: IPB
- LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). 2008. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Edisi Tahun 2008*. Jakarta: LPPOM MUI
- \_\_\_\_\_. 2010. *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal Edisi Tahun 2010*. Jakarta: LPPOM MUI
- \_\_\_\_\_. 2012. *Persyaratan Sertifikasi Halal*. Jakarta: LPPOM MUI
- \_\_\_\_\_. 2013. *Strategi dan Teknik Implementasi Sistem Jaminan Halal.2013*. Bogor: LPPOM MUI
- Haque-Fawzi, M.G. 2018. *Jawa dan Halal di Thailand*. Jakarta: al-Wassat.
- Hayton, B. 2011. *Vietnam: Rising Dragon*. Connecticut: Yale University Press
- Hoang, V.C. 1964. *From Colonialism to Communism*. New York: Praeger
- Hue-Tam, H. T. 2001. *The Country of Memory: Remaking the Past in Late Socialist Vietnam*. Oakland: University of California Press
- International Monetary Fund. 2002. *Foreign Direct Investment in Viet Nam: Results, Achievements, Challenges and Prospect*. Conference on Foreign Direct Investment. Hanoi August 16–17, 2002
- Nguyễn Khắc Viện. 2013. *Vietnam, a Long History*. Hanoi: Thế Giới Publishers
- Nirwanda, S. 2017. *Halal Lifestyle, Tren Global & Peluang Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Purnomo, D. 2011. *Halal Agro-industry Development Strategy in Anticipating Global halal Business*. Bogor: IPB

- Reid, A. 1988. *Southeast Asia in the Age of Commerce 1450–1680*. Connecticut, Yale: University Press
- SarDesai D.R. 2013. *Southeast Asia: Past and Present (Seventh Edition)*. Boulder: Westview Press
- Seekins, Donald M. 2002. *Trung Sisters, Rebellion of (39–43)*, in Sandler, Stanley, ed., *Ground Warfare: An International Encyclopedia*. Santa Barbara, California: ABC-Clio. Vol. 3, p. 898, Col. 1
- Sholeh, Asrorun Ni’am. 1975. *Pedoman dan Prosedur Penetapan Fatwa*. Jakarta: Sekretaris Komisi Fatwa MUI
- Tanjung dan Devi. 2013. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bekasi: Gramata Publishing
- Taylor, K. W. 1983. *The Birth of Vietnam*. Berkeley: University of California Press
- \_\_\_\_\_. *A History of the Vietnamese*. Cambridge: Cambridge University Press
- Taylor, P. 2007. *Cham Muslims of the Mekong Delta: Place and Mobility in the Cosmopolitan Periphery*. Singapore: NUS Press
- Van Arkadie, B and Mallon, R. 2004. *Viet Nam: a Transition Tiger*. Canberra: Asia Pacific Press
- Westphal, A.R. 2012. *New Social Architecture and the Dilemma of Culture in Sustainable Design: the Case of the Cambodian Center for Cham Studies (a Thesis)*. Minnesota: University of Minnesota
- Wiku Adisasmito. 2008. *Analisis Kebijakan Nasional MUI dan BPOM dalam Labeling Obatan dan Makanan*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Womack, B. 2006. *China and Vietnam: The Politics of Asymmetry*. Cambridge: Cambridge University Press
- Sainteny, J. 1972. *Ho Chi Minh and His Vietnam: A Personal Memoir*. Chicago: Cowles Book Company
- Walker, H.D. 2012. *East Asia: a New History*. e-Book: AuthorHouse

## JURNAL

- Hamid, M.E. 2006. *Understanding the Cham Identity in Mainland Southeast Asia: Contending Views*. *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 21, No. 2
- Nakamura, R. 2017. *The Coming of Islam to Champa*. *Journal of the Royal Asiatic Society*, August, 28 (4):1–31
- Pribbenow, M. 2003. *The Ology War: Technology and Ideology in the Defense of Hanoi, 1967*, in *Journal of Military History* (1), hlm.183
- Scupin, R. 1995. *Historical, Ethnographic, and Contemporary Political Analyses of the Muslims of Kampuchea and Vietnam*. *Journal of Social Issues in Southeast Asia*, Vol. 10, No. 2, hlm. 301–328
- Tran, T.V.A. 1992. *The Direct Loan of Capital from the Bank to Development Production and Gender Equality*. *Social Sciences (Vietnam)*, vol. 34 (1992), hlm. 25–26
- Taylor, P. 2006. *Economy in Motion: Muslim Traders in the Mekong Delta*. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*. Canberra: The Australian National University, 7 (3); 238
- Vietnam Censur. 1999. *Population Aged 5 and Over as of 1 April 1999 by Religion, by Sex and by School Attendance*. *Tổng Cục Thống kê Việt Nam*, 1999-04-01
- Womack, S (1995). *The Remaking of a Legend: Women and Patriotism in the Hagiography of the Trung sisters*. *Crossroads: An Interdisciplinary Journal of Southeast Asian Studies*. Vol. 9, No. 2, 1995, hlm. 31–50

## INTERNET

- Anonim. 2014. "Muslim Population." 5 Mei 2014. <http://www.muslimpopulation.com>
- Sodikin, Amir. "Indonesia dan Vietnam, Siapa yang Ketinggalan?" 28 Januari 2019. *Kompas.com*, <https://internasional.kompas.com/read/2018/10/08/11270741/indonesia-dan-vietnam-siapa-yang-ketinggalan>
- Biro Pers Setpres. "RI-Vietnam Sepakat Hapus Hambatan Dagang Produk Industri." 28 Januari 2019. <http://www.kemenperin.go.id/artikel/19670/RI-Vietnam-Sepakat-Hapus-Hambatan-Dagang-Produk-Industri>

- BHH JAKIM (Bahagian Hab Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia). "Makanan dan Minuman. Garis Panduan." 20 April 2013. <http://www.halal.gov.my/v3/index.php/ms/garis-panduan/makanan-a-minuman>
- BHH JAKIM (Bahagian Hab Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia). "Prosedur Permohonan Mengenai Pensijilan Halal." 20 April 2013. <http://www.halal.gov.my/v3/index.php/ms/mengenai-pensijilan-halal/prosedur-permohonan>
- BHH JAKIM (Bahagian Hab Halal Jabatan Kemajuan Islam Malaysia). "Korporat Halal." 20 April 2013. <http://www.halal.gov.my/v3/index.php/ms/korporat/sejarah-halal>
- CIA World Factbook 2016. 23 Desember 2018. <https://ilmupengetahuanum.com/profil-negara-vietnam/>
- LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia). "Association Halal Industry of Kazakhstan Kunjungi MUI." 13 April 2014
- Pew Forum. 2015. "Proyeksi Keagamaan di Vietnam.", 20 November 2018. <http://www.pewforum.org/2015/04/02/religious-projection-table/>
- PricewaterhouseCoopers. 2017. "The World in 2050." 28 Januari 2019. <https://www.pwc.com/gx/en/issues/economy/the-world-in-2050.html>
- Salemink, O. dan Stokhof, M. 2009. "Bawean Ethnic Identity in Vietnam." 28 Januari 2018  
[https://www.academia.edu/6247886/Salemink\\_and\\_Stokhof\\_2009\\_State\\_classification\\_and\\_its\\_discontents\\_-\\_Bawean\\_ethnic\\_identity\\_in\\_Vietnam\\_-\\_JVS](https://www.academia.edu/6247886/Salemink_and_Stokhof_2009_State_classification_and_its_discontents_-_Bawean_ethnic_identity_in_Vietnam_-_JVS)
- Syafie S. dan Othman N Md. 2006. "Halal Certification: An International Marketing Issues and Challenge." 25 Desember 2012. [http://www.ctwcongress.de/ifsam/download/track\\_13/pap00226.pdf](http://www.ctwcongress.de/ifsam/download/track_13/pap00226.pdf)
- United Nation. 2016. "New Law on Gender Equality Will Greatly Improve Viet Nam's Legal Regime For Women's Advancement, Anti-Discrimination Committee Told." 11 Oktober 2016. [www.un.org](http://www.un.org). Archived from the original
- <http://www.web.budaya-tionghoa.net/the-history-of-china/the-history-of-han-dynasty/2731-tradisi-perlawananan-vietnam-bermula-dari-trung-sisters>, diunduh pada 26 November 2018



[www.angelfire.com/vt/vietnamesemuslims/masjidList.html](http://www.angelfire.com/vt/vietnamesemuslims/masjidList.html), diunduh pada 26 November 2018

<http://www.Liputan6.com>, Washington diunduh pada 18 November 2018

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5895d234d1736/simak-yuk-8-tahap-proses-penetapan-fatwa-di-mui>, diunduh pada 22 September 2017

<https://travel.kompas.com/read/2016/12/06/182200427/mengapa.sedikit.turis.indonesia.liburan.ke.vietnam>, diunduh pada 17 Februari 2019

[https://www.tripadvisor.co.nz/ShowUserReviews-g293924-d7953714-r286590138-Juni\\_s\\_Kitchen-Hanoi.html](https://www.tripadvisor.co.nz/ShowUserReviews-g293924-d7953714-r286590138-Juni_s_Kitchen-Hanoi.html), diunduh pada 17 Februari 2019

[https://www.tripadvisor.com/Restaurants-g293925-zfz10751-Ho\\_Chi\\_Minh\\_City.html](https://www.tripadvisor.com/Restaurants-g293925-zfz10751-Ho_Chi_Minh_City.html), diunduh pada 17 Februari 2019

<https://www.vir.com.vn/room-remains-for-growth-in-luxury-hotel-segment.html>, diunduh pada 28 Januari 2019

[https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia%E2%80%93Vietnam\\_relations](https://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia%E2%80%93Vietnam_relations), diunduh pada 28 Januari 2019

<http://ciputrahanoi.com.vn/en/tin-tuc/foreign-investor-attaches-nearly-20-years-vietnam/>, diunduh pada 28 Januari 2019





## PENULIS SELAYANG PANDANG

Marissa Grace Haque-Fawzi

Penulis adalah dosen dan peneliti dengan *home-base* di Indonesia Banking School (IBS), sebuah institusi pendidikan yang didirikan oleh Yayasan Bank Indonesia yang merupakan bank sentral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, penulis dikenal sebagai aktris film, fotomodel, penari, produser film, yang kemudian sempat sebentar berpolitik dan masuk sebagai anggota DPR-RI di Senayan.

Doktor Ilmu Manajemen Lingkungan dari Institut Pertanian Bogor (IPB) ini juga alumni Magister dari beberapa fakultas dan universitas, yaitu Fakultas Ekonomika Bisnis Universitas Gadjah Mada, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Pascasarjana Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, serta Fakultas Linguistik Terapan Bahasa Inggris Universitas Katolik Atmajaya. Sementara itu, gelar S-1-nya diperoleh dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti.

Dikaitkan dengan beragam bidang keilmuan yang dimilikinya, di usianya yang sekarang ini, penulis selalu melakukan beragam aktivitas terkait dengan hal yang serba syariah, khususnya belakangan ini berfokus pada manajemen dalam industri halal, baik di dalam maupun luar negeri. Sebelumnya, penulis telah

memulai dengan menerbitkan buku halal di Thailand. Saat ini, akan segera terbit buku dan paper akademik untuk jurnal nasional maupun internasional terkait halal di Vietnam. Menyusul segera dalam waktu dekat, halal di Jepang, di Belanda, di Inggris, dan di India (untuk sekadar menjelaskan sebagian dari sekian puluh negara dan institusi yang telah resmi menjadi mitra halal LPPOM MUI).

Baginya, sangat jelas bahwa Islam adalah *Rahmatan lil 'alamin*. Kini, dirinya semakin kerap menyuarakan ungkapan *halal is for everyone*, yang kini semakin dilengkapi dengan kalimat “*halal is my life*” sesuai dengan semangat diseminasi informasi halal yang digaungkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia yang disingkat LPPOM MUI.





REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

# SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202023330, 17 Juli 2020

## Pencipta

Nama : **Dr. Hj. Marissa Haque Fawzi**  
Alamat : Perum Pelangi Bintaro No.9, RT.005, RW.002, Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15412  
Kewarganegaraan : Indonesia

## Pemegang Hak Cipta

Nama : **Dr. Hj. Marissa Haque Fawzi**  
Alamat : Perum Pelangi Bintaro No.9, RT.005, RW.002, Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15412  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Ciptaan : **Buku**  
Judul Ciptaan : **Muslimin Vietnam Dan Industri Halalnya Mereka Juga Belajar Ke LPPOM MUI**

Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 4 April 2019, di Bekasi

Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000194770

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.  
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.  
NIP. 196611181994031001